



KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



GFS STRATEGIS

TINGKAT WILAYAH
TAHUN 2025 *PRELIMINARY*



HANDAL

Harmonis Amanah Digital Akuntabel Loyal

PRIMA

PROFESSIONAL RESPONSIVE INNOVATION INTENSIVE



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab
Rahmat Mulyono

Ketua Tim
Luqman Joyo Kartono

Kontributor Data LKPP
Moch. Fahrudin
Melly Yustriana

Kontributor Data LKPD
Selamet Riyadi
Fitri Anisah

**Konsolidasi Data dan Penyusun
Laporan**
Tengku Yustisia Abdul Rahman
Dinda Ornaz Annisa



KANTOR WILAYAH
DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

*new DJPb
in Town*

new DJPB
in Town



DAFTAR ISI

GFS Strategis Tahun 2025 *Preliminary*
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT





DAFTAR ISI

i

DAFTAR ISI



ii

DASHBOARD



01

FLASH REPORT



13

LAMPIRAN



1 Gambaran Umum Kondisi Keuangan

3 Perkembangan Kondisi Keuangan berdasarkan Analisis Laporan Keuangan

7 Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Berdampak pada Kinerja Keuangan dan Statistik

8 Resume Pelaksanaan Kegiatan

10 Kesimpulan dan Rekomendasi

- LRA, LO, Neraca LKPK-TW
- LRA, LO, Neraca LKPP-TW
- LRA, LO, Neraca LKPKD-TW
- LO & Neraca LSKP-TW
- LO & Neraca LSKPP-TW
- LO & Neraca LSKPKD-TW
- Metadata
- Analisis Rasio dan Indikator Fiskal
- Dokumen Pendukung Lainnya

New DJPB
in Town



DASHBOARD

LKPK-TW & LSKP-TW

GFS Strategis Tahun 2025 *Preliminary*
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



DASHBOARD GFS STRATEGIS

Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
TAHUN 2025 PRELIMINARY



LKPK-TW

Merupakan **konsolidasi** antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (**LKPP-TW**) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (**LKPKDK-TW**) dalam satu periode

NERACA KONSOLIDASIAN



Aset
Rp174,78 T

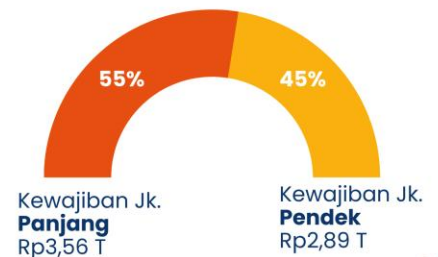
Kewajiban
Rp6,45 T

Ekuitas
Rp168,33 T

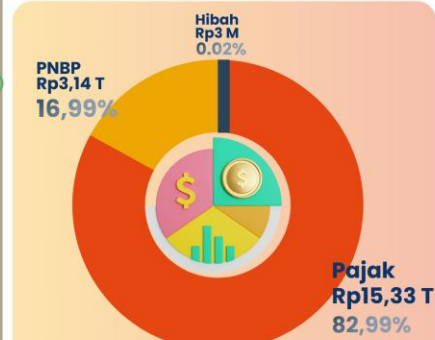
Aset Konsolidasian



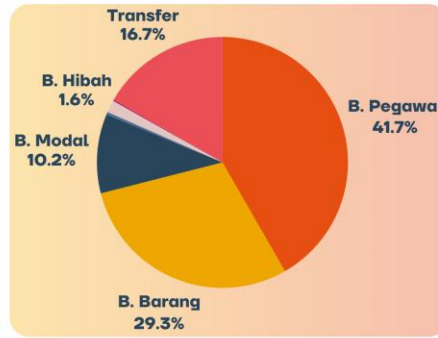
Kewajiban Konsolidasian



Pendapatan Konsolidasian



Belanja Konsolidasian



LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN



Pendapatan Konsolidasian



Beban Konsolidasian



Defisit dari Kegiatan Operasional
Rp23,01 T

Surplus dari Kegiatan Non Operasional
Rp82,24 M

Surplus/(Defisit) - LO
Rp(22,93 T)



DASHBOARD GFS STRATEGIS

Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
TAHUN 2025 PRELIMINARY



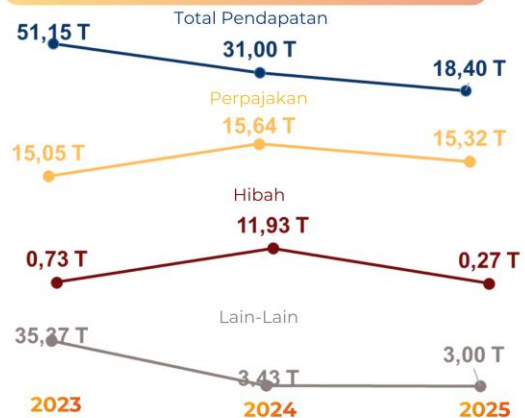
LSKP-TW

Laporan Operasional Statistik

Merupakan ikhtisar transaksi Pemerintah Pusat dan Daerah pada periode tertentu, meliputi transaksi pendapatan dan beban, investasi neto pada aset non keuangan, akuisisi neto aset keuangan dan jumlah neto kewajiban yang timbul.

Pendapatan	Rp 18,35 T
Beban	Rp 28,09 T
Gross Operating Balance	Rp (9,74) T
Net Operating Balance	Rp (9,74) T
Akuisisi Aset Non Keuangan Neto	Rp 4,47 T
Net Lending/Borrowing	Rp (14,22) T
Akuisisi Aset Keuangan	Rp (14,29) T
Keterjadian Kewajiban Neto	Rp (75,48) M

Tren Pendapatan Operasional Statistik



Komposisi Beban Operasional



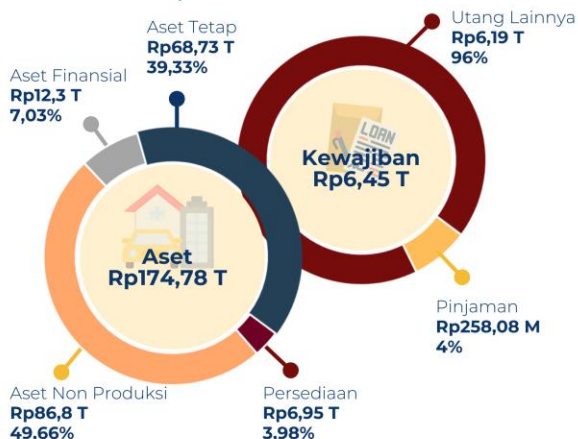
Tren Beban Operasional Statistik



Neraca Statistik

Neraca Statistik Pemerintah menyajikan data Aset, Kewajiban, dan Kekayaan Neto Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi.

Komposisi Neraca Statistik



Kekayaan Bersih



Perbandingan Aset Tetap



new DJP
in To

FLASH REPORT

GFS Strategis Tahun 2025 *Preliminary*
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



HANDAL
Honesty Accuracy Digital Innovation Local



FLASH REPORT

1. Gambaran Umum Kondisi Keuangan LKPP-TW, LKPDK-TW, LKPK-TW, dan LSKP-TW Provinsi Kalimantan Barat Preliminary Tahun 2025

a. LKPP-TW

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah Kalimantan Barat pada sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp12,98 triliun secara umum mengalami penurunan sebesar 1,98 persen (yoy). Penurunan tersebut berasal dari Pendapatan Perpajakan yang turun sebesar Rp262,43 miliar atau 2,20 persen (yoy). Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mengalami kenaikan sebesar Rp449,23 juta atau 0,03 persen (yoy). Belanja Pemerintah Pusat mengalami kontraksi sebesar 20,98 persen (yoy) menjadi Rp9,77 triliun per 31 Desember 2025. Realisasi TKDD sebesar Rp20,23 triliun mengalami kontraksi sebesar 1,95 persen (yoy). Selanjutnya, pada pos Neraca, Total Aset Pemerintah mengalami penurunan sebesar 0,46 persen dari posisi per 31 Desember 2024 menjadi Rp107,88 triliun per 31 Desember 2025. Jumlah Kewajiban mengalami kenaikan sebesar 2,42 persen menjadi Rp5,01 triliun dan Ekuitas juga mengalami penurunan 1,39 persen menjadi Rp102,87 triliun per 31 Desember 2025. Pada pos Laporan Operasional (LO), terdapat defisit sebesar Rp21,98 triliun yang berasal dari Beban Operasional sebesar Rp32,24 triliun yang lebih besar dari Pendapatan Operasional sebesar Rp10,17 triliun. Jumlah Pendapatan Operasional mengalami penurunan sebesar 22,85 persen (yoy) yang disebabkan oleh penurunan pada realisasi pendapatan perpajakan sebesar 25,17% dan PNBP sebesar 0,90% (yoy).

b. LKPDK-TW

Realisasi Pendapatan Pemerintah Daerah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp22,80 triliun, mengalami penurunan sebesar 15,58 persen yang disebabkan oleh penurunan secara umum pada komponen pembentuk pendapatan, di antaranya Pendapatan Asli Daerah (PAD) turun sebesar 6,87 persen (yoy) menjadi Rp5,48 triliun, Pendapatan Transfer turun sebesar 17,93 persen (yoy) dengan realisasi sebesar Rp17,26 triliun, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah turun sebesar 34,73 persen (yoy) menjadi Rp61,72 miliar. Sementara itu, Belanja Pemerintah Daerah Konsolidasian sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp20,01 triliun, secara umum mengalami kontraksi sebesar 26,75 persen (yoy). Kontraksi tersebut didominasi oleh penurunan Belanja Modal sebesar Rp2,49 triliun atau 53,47 persen (yoy) menjadi Rp2,16 triliun sampai dengan 31 Desember 2025. Terdapat Surplus sebesar Rp2,79 triliun dan Pembiayaan Neto sebesar Rp635,44 miliar. Dengan demikian, per 31 Desember 2025, SiLPA Pemerintah sebesar Rp3,43 triliun atau naik sebesar 193,22 persen (yoy). Pada pos Neraca, Total Aset pemerintah daerah sebesar Rp66,9 triliun atau tumbuh positif sebesar Rp963,54 miliar atau 1,46 persen dari posisi per 31 Desember 2024. Jumlah Kewajiban mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8,70 persen menjadi Rp1,51 triliun per 31 Desember 2025. Jumlah Ekuitas pemerintah per 31 Desember 2025 sebesar Rp65,46 triliun atau tumbuh positif sebesar 1,72 persen. Pada pos LO, terdapat defisit sebesar Rp944,55 miliar yang naik sebesar 665,02 persen (yoy). Kenaikan defisit tersebut disebabkan oleh menurunnya



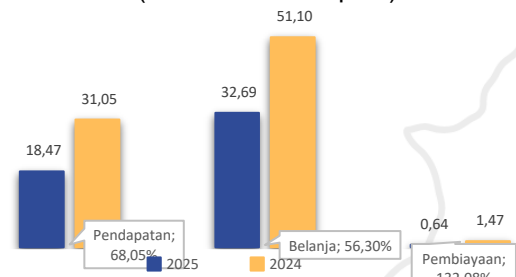
Pendapatan Operasional sebesar 14,79 persen (yoy) menjadi Rp21,48 triliun.

c. LKPK-TW

Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp18,47 triliun atau secara umum tumbuh negatif sebesar 40,49 persen (yoy). Penurunan tersebut didominasi oleh Pendapatan Hibah yang turun sebesar Rp31,74 miliar atau 91,37 persen (yoy) menjadi Rp3 miliar. Sementara itu, Pendapatan Perpajakan dan PNPB mengalami kontraksi masing-masing sebesar 2,71 persen (yoy) dan 79,42 persen (yoy). Sementara itu, Belanja dan Transfer Konsolidasian sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp32,69 triliun atau tumbuh negatif sebesar 36,02 persen (yoy). Per 31 Desember 2025, terdapat Defisit sebesar Rp14,22 triliun dan Pembiayaan Neto sebesar Rp635,44 miliar. Dengan demikian, SiKPA Konsolidasian sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp13,58 triliun atau turun 4,51 persen (yoy). Sementara itu, pada Neraca Konsolidasian, Total Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp174,78 triliun atau tumbuh positif 0,31 persen dari posisi per 31 Desember 2024 yang didominasi oleh pertumbuhan positif pada nilai Aset Lancar sebesar Rp3,45 triliun atau 32,65 persen. Jumlah Kewajiban juga mengalami kenaikan sebesar 16,06 persen menjadi Rp6,45 triliun dari posisi per 31 Desember 2024 yang didominasi oleh kenaikan jumlah Kewajiban Jangka Pendek sebesar 48,13 persen. Kewajiban Jangka Panjang mengalami penurunan sebesar 1,29 persen. Total Ekuitas Konsolidasian per 31 Desember 2025 sebesar Rp168,33 triliun atau tumbuh negatif Rp27,1 miliar atau 0,21 persen. Pada pos LO, terdapat defisit sebesar Rp22,93 triliun yang disebabkan oleh turunnya Pendapatan

Operasional sebesar 20,85 persen (yoy) menjadi Rp15,72 triliun dan penurunan Beban Operasional sebesar 4,91 persen (yoy) menjadi Rp38,73 triliun. Turunnya Pendapatan Operasional tersebut didominasi oleh turunnya Pendapatan Hibah yang disebabkan oleh kegiatan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah yang hanya dilaksanakan di tahun 2024 turun sebesar Rp475,2 miliar atau 99,37 persen (yoy) per 31 Desember 2025.

Grafik 1. Komponen LKPK-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 *Preliminary* (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Diolah dari LKPK-TW Kalimantan Barat Tahun 2024 dan 2025 *Preliminary*

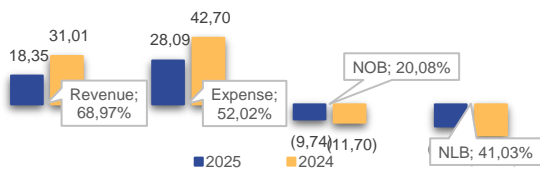
d. LSKP-TW

Kinerja Pendapatan Statistik Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp18,35 triliun atau turun 40,82 persen (yoy) yang secara umum disebabkan oleh penurunan pada Pendapatan Hibah (*Grants*) yang turun sebesar Rp11,90 triliun atau 99,77 persen (yoy). Pajak (*Taxes*) mengalami kontraksi sebesar Rp320,85 miliar atau 2,05 persen (yoy). Pendapatan Lainnya (*Other Revenue*) tumbuh negatif 12,50 persen (yoy) menjadi Rp3 triliun. Beban Statistik juga mengalami penurunan sebesar 34,22 persen (yoy) menjadi Rp28,09 triliun. Dari Pendapatan Statistik dan Beban Statistik tersebut menghasilkan *Gross Operating Balance* dan *Net Operating Balance* sebesar negatif Rp9,74 triliun. Sementara itu, nilai *Net Lending/Borrowing* pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat bernilai



negatif Rp14,22 triliun yang menunjukkan posisi *Net Borrowing* atau adanya kekurangan sumber daya keuangan. Selanjutnya, pada Neraca Statistik Pemerintah Umum per 31 Desember 2025 menunjukkan posisi *Net Worth* sebesar Rp168,332 triliun. Nilai tersebut tumbuh negatif sebesar 0,21 persen dari posisi per 31 Desember 2024. Aset Non Keuangan tumbuh negatif sebesar 1,41 persen menjadi Rp162,49 triliun sementara Aset Keuangan mengalami kenaikan sebesar 30,52 persen menjadi Rp12,29 triliun. Kewajiban mengalami kenaikan sebesar 16,06 persen menjadi Rp6,45 triliun.

Grafik 2. Komponen LSKPU-TW Kalimantan Barat Tahun 2025 dan 2024 *Preliminary* (dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Diolah dari LSKPU-TW Kalimantan Barat 2024 dan 2025 *Preliminary*

2. Perkembangan Kondisi Keuangan Berdasarkan Analisis Laporan Keuangan

a. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)

Rasio Solvabilitas Jangka Pendek Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan LKPK-TW *Preliminary* Tahun 2025 menunjukkan angka sebesar 484,47 persen. Sementara itu, Rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada LKPK tingkat wilayah Kalimantan Barat menunjukkan angka 4.909,76 persen. Berdasarkan Rasio Solvabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki kemampuan keuangan yang sangat baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah Aset Lancar

yang lebih besar 4 kali dari Kewajiban Jangka Pendeknya. Sedangkan dalam jangka panjang, Total Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 49 kali lebih besar dari jumlah Kewajiban Jangka Panjangnya.

b. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian (LKPKD)

1) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Barat bervariasi antara 6,68 persen sampai 50,10 persen. Rasio Kemandirian tertinggi terdapat pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 50,10 persen. Sementara itu, kabupaten/kota dengan Rasio Kemandirian tertinggi terdapat pada Pemerintah Kota Pontianak sebesar 38,41% dan terendah pada Pemerintah Kabupaten Melawi sebesar 6,68%. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tingkat wilayah Kalimantan Barat menunjukkan bahwa 6 dari 15 pemda (40 persen) masih termasuk dalam kategori kemandirian keuangan daerah yang "Sangat Kurang" dan 6 dari 15 pemda (40 persen) lainnya termasuk dalam kategori kemandirian keuangan daerah yang "Kurang". Selain itu, secara rata-rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Barat sebesar 16,74 persen atau termasuk kategori "Kurang" yang menunjukkan bahwa 83,26 persen dari total pendapatan daerah secara rata-rata masih berasal dari kontribusi pihak eksternal. Hal tersebut juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah dalam pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).



2) Rasio Solvabilitas Anggaran

Secara rata-rata, Rasio Solvabilitas Anggaran pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar 109,34 persen. Rasio Solvabilitas Anggaran paling tinggi terdapat pada Pemkot Pontianak dengan rasio sebesar 134,83 persen dan terendah pada Pemerintah Kabupaten Sanggau dengan rasio sebesar 77,97 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata pemda lingkup Kalimantan Barat memiliki jumlah pendapatan yang dapat menutupi belanja pemerintah selama periode anggaran.

3) Rasio Solvabilitas Layanan

Rata-rata Rasio Solvabilitas Layanan pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp8.455.610,- untuk menyelenggarakan pelayanan publik per individu. Apabila dilihat secara rinci, Pemerintah Kota Pontianak memiliki Rasio Solvabilitas Layanan tertinggi, yaitu sebesar Rp15.220.045,- untuk menyelenggarakan pelayanan publik per individu. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki Rasio Solvabilitas Layanan sebesar Rp2.981.408,- untuk menyelenggarakan pelayanan publik per individu. Namun, apabila dilihat di antara kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah dengan rasio solvabilitas layanan terendah yaitu sebesar Rp3.848.478,-. Rasio Solvabilitas Layanan tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata, pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat memiliki total aset yang lebih dari cukup untuk menyediakan dan

mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.

4) Rasio Solvabilitas Operasional

Pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat secara rata-rata memiliki Rasio Solvabilitas Operasional sebesar 91,78 persen dengan rasio tertinggi terdapat pada Pemprov Kalimantan Barat sebesar 121,88 persen dan terendah pada Pemkab Sanggau sebesar 63,59 persen. Rasio solvabilitas operasional di bawah 100 persen menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah tidak dapat menutupi seluruh beban operasional pemerintah selama periode anggaran.

5) Rasio Fleksibilitas Keuangan

Rata-rata Rasio Fleksibilitas Keuangan pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat sebesar negatif 8,22 persen pada *Preliminary* Tahun 2025. Rasio Fleksibilitas Keuangan tertinggi terdapat pada Pemprov Kalbar sebesar 21,88 persen dan terendah pada Pemkab Sanggau sebesar negatif 36,41 persen. Hal tersebut menunjukkan secara rata-rata pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat memiliki fleksibilitas keuangan yang kurang baik. Pemerintah dapat dikatakan kurang mampu meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan kewajiban, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang. Pemerintah memiliki sedikit fleksibilitas atau ruang untuk pengeluaran di luar beban operasional. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah bersangkutan dalam hal pengelolaan utang dan finansial untuk memastikan bahwa pemerintah



daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang serta menjalankan aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang.

c. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

1) Analisis Keseimbangan Fiskal

Analisis Keseimbangan Fiskal tingkat wilayah Kalimantan Barat dapat dilihat dari *Gross/Net Operating Balance* (GOB/NOB), *Net Lending/ Borrowing* (NLB), Keseimbangan Operasi Primer, dan Keseimbangan Primer. Berdasarkan **GOB** dan **NOB** sebesar negatif Rp9,74 triliun dapat dikatakan bahwa pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat berada dalam kondisi defisit. Beban Statistik lebih besar dari Pendapatan Statistik. Sementara itu, nilai **NLB** pemerintah umum yang bernilai negatif Rp14,22 triliun menunjukkan posisi *Net Borrowing* atau adanya kekurangan sumber daya keuangan yang mengindikasikan bahwa pemerintah memerlukan sumber pembiayaan tambahan untuk kegiatan operasionalnya. Sedangkan apabila ditinjau dari **Keseimbangan Operasi Primer** sebesar negatif Rp9,73 triliun menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat memenuhi seluruh pengeluaran operasionalnya, termasuk pembayaran kewajiban bunga utang, melalui pendapatan operasionalnya. Sedangkan **Keseimbangan Primer** yang menunjukkan nilai negatif sebesar Rp14,2 triliun menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah setelah dikurangi belanja (tidak termasuk pembayaran bunga utang) tidak cukup untuk menutup beban bunga utang yang harus dibayarkan. Dengan kata lain, pemerintah masih harus mencari sumber pembiayaan lain

untuk membayar bunga utang yang ada.

2) Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

a) Pajak Langsung (*Direct Taxes*)

Pajak Langsung Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp4,19 triliun yang sebagian besar berasal dari kontribusi Pemerintah Pusat. Kontribusi Pajak Langsung yang sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat dapat disebabkan oleh basis pajak yang dimiliki pemerintah pusat lebih luas daripada pajak daerah. Di sisi lain, kontribusi pajak daerah yang relatif lebih kecil dapat mengindikasikan potensi pajak dari pemerintah daerah yang masih belum optimal.

b) Pajak Tidak Langsung (*Indirect Taxes*)

Pajak Tidak Langsung Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp11,13 triliun yang sebagian besar berasal dari kontribusi Pemerintah Pusat yang menyumbang 69,99 persen dari total pajak tidak langsung yang dapat berasal dari kontribusi PPN dan Bea Masuk yang berada dalam kendali pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkontribusi sebesar 30,01% terhadap pajak tidak langsung yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk memperkuat potensi pajak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.



c) Pajak Modal (*Capital Taxes*)

Pajak Modal Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat berasal dari pemerintah kabupaten/kota tingkat wilayah Kalimantan Barat. Pajak Modal dapat berasal dari *Taxes on Property* atau Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada *Preliminary* Tahun 2025, Pajak Modal tercatat sebesar Rp0,- akibat terjadinya pemindahan akun PBB dan BPHTB yang sebelumnya termasuk pada akun *Other nonrecurrent taxes on property* menjadi akun *Other recurrent taxes on property*.

d) Belanja Konsumsi Final Pemerintah (*Government Final Consumption Expenditure*)

Belanja Konsumsi Final Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp20,36 triliun yang berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga, dikurangi penjualan barang dan jasa. Belanja Konsumsi Final Pemerintah yang bernilai positif tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berperan dalam mendorong perekonomian di tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Barat, misalnya melalui pembelian barang dan jasa dan kompensasi pegawai.

e) Tabungan Bruto (*Gross Saving*)

Tabungan Bruto Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan

31 Desember 2025 sebesar negatif Rp9,23 triliun. Tabungan Bruto Pemerintah Umum yang bernilai negatif tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan operasi bruto lebih kecil daripada *net capital transfer*, yang berarti bahwa pemerintah mengalami defisit dalam operasionalnya. Hal tersebut memberikan sinyal perlunya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola defisit yang terjadi.

3) Analisis Indikator Pembiayaan

Total Pembiayaan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar negatif Rp14,22 triliun yang seluruhnya berasal dari Pembiayaan Dalam Negeri (*Domestic Financing*). Total Pembiayaan yang bernilai negatif tersebut menunjukkan transaksi aset keuangan pemerintah yang lebih kecil dari transaksi kewajiban. Angka positif tersebut juga menunjukkan situasi di mana pengeluaran pembiayaan pemerintah melebihi jumlah penerimaannya atau dapat mengindikasikan bahwa pemerintah lebih banyak membayar utang daripada memperoleh utang baru.

4) Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

Utang Bruto Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat pada 31 Desember 2025 sebesar Rp6,52 triliun menunjukkan total nilai dari seluruh utang yang dimiliki oleh pemerintah pada suatu periode, tanpa mempertimbangkan aset atau investasi yang dimiliki oleh pemerintah. Tingginya jumlah Utang Bruto yang dimiliki pemerintah dapat berdampak pada timbulnya beban keuangan yang besar bagi pemerintah yang selanjutnya dapat berimplikasi pada penurunan fleksibilitas keuangan pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu memiliki strategi pengelolaan utang yang efektif serta



terus berupaya untuk dapat meningkatkan PAD. Sementara itu, **Utang Neto** Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat pada 31 Desember 2025 bernilai negatif Rp1,46 triliun menunjukkan bahwa pemerintah memiliki lebih banyak aset yang dapat digunakan untuk membayar utangnya. Utang Neto menggambarkan posisi utang pemerintah dengan mempertimbangkan nilai aset yang dapat digunakan untuk membayar utang.

3. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang Berdampak pada Kinerja Keuangan dan Statistik

a. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Pusat

- 1) Pada LKPK-TW, penerimaan pajak mengalami kontraksi, khususnya pajak dalam negeri yang tumbuh negatif sebesar 3,35 persen menjadi Rp14,91 triliun. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh berkurangnya Pendapatan Pajak Penghasilan sebesar Rp1,6 triliun atau 30,44 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh kebijakan pemindahan kewajiban perpajakan dari kantor cabang ke kantor pusat melalui penggunaan NPWP satuan kerja induk, sehingga pengakuan Pajak Penghasilan terpusat pada kantor pajak induk.
- 2) Dana Desa merupakan komponen TKD dengan tingkat realisasi terendah, yaitu sebesar 83,41 persen. Rendahnya realisasi tersebut dipengaruhi oleh:
 - (i) Penyaluran Dana Desa *Non-Earmark* Tahap II yang baru terealisasi pada 779 desa dari total 2.046 desa di Kalimantan Barat; dan
 - (ii) Terdapat 13 desa yang belum menyalurkan Dana Desa *Earmark* Tahap II, dengan rincian 11 desa belum menyalurkan sejak Tahap I,

serta 2 desa baru yang belum melakukan penyaluran pada Tahap II, yaitu Desa Empunak Tapang Keladan (Kabupaten Sintang) dan Desa Kedondong (Kabupaten Ketapang).

- 3) Penyaluran DBH juga relatif rendah, yaitu sebesar 86,85 persen, sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 29/MK/PK/2025. Hal ini disebabkan oleh masih adanya perhitungan DBH Lebih Bayar pada sebagian besar pemerintah daerah di Kalimantan Barat serta terdapatnya Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Pajak pada beberapa pemerintah daerah, sehingga menghambat penyaluran DBH PPh.
- 4) Penyaluran DAK Fisik mengalami kontraksi, dengan terdapat empat subbidang pada tiga daerah yang tidak dapat disalurkan. Kabupaten Kubu Raya mengalami gagal salur pada bidang Perlindungan Perempuan dan Anak serta subbidang Perpustakaan pada bidang Pendidikan. Kabupaten Kapuas Hulu mengalami gagal salur pada bidang Air Minum. Sementara itu, Kabupaten Kayong Utara mengalami gagal salur pada Bidang Kesehatan dan KB, khususnya subbidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan
- 5) Berdasarkan data MONSAKTI periode 12 Tahun 2025, masih terdapat beberapa permasalahan pengelolaan dan pelaporan keuangan pada satuan kerja di lingkup Kanwil DJPb Kalimantan Barat, antara lain saldo akun tidak normal pada lima satuan kerja. Salah satu yang paling signifikan terjadi pada satuan kerja Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah XII atas transaksi RPATA kegiatan Pengawasan Revitalisasi (Rehabilitasi) Istana Kadriyah Pontianak pada akun Utang yang



Belum Diterima Tagihannya. Permasalahan tersebut disebabkan oleh kesalahan penanggalan BAST dan telah diselesaikan melalui jurnal penyesuaian pada periode 13 (*Unaudited*) Tahun 2025.

b. Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah

- 1) Pada Laporan Realisasi Anggaran LKPKD-TW Kalimantan Barat Periode *Preliminary* Tahun 2025, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah hanya 24,02 persen, sedangkan pendapatan transfer berkontribusi 75,71 persen kepada total pendapatan. Hal ini menunjukkan ketergantungan fiskal pemerintah daerah yang tinggi terhadap dana transfer.
- 2) Sebagian besar BUMD yang berada di bawah pemerintah daerah lingkup Provinsi Kalimantan Barat membukukan rugi bersih yang berpotensi membebani APBD.
- 3) Masih terbatasnya pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat yang telah mengoptimalkan kas daerah melalui penempatan pada instrumen investasi atau deposito.
- 4) Belum terdapat peraturan daerah mengenai pengelolaan piutang daerah pada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat sehingga proses penyisihan dan penghapusan piutang daerah belum mempunyai *legal standing* yang dapat mengakomodasi pengelolaan piutang.
- 5) Struktur belanja *mandatory* amanat UU HKPD pada pemerintah daerah lingkup Provinsi Kalimantan Barat belum optimal. Proporsi alokasi Belanja Pegawai mencapai 45,26% dibandingkan keseluruhan Belanja Daerah, mengalami deviasi 15,26% dari ketentuan UU HKPD (maksimal 30% dari Belanja Daerah diluar

tunjangan guru dari transfer ke daerah). Sementara itu, pada kewajiban daerah untuk mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa, rata-rata realisasi belanja infrastruktur pelayanan publik pada Kalimantan Barat adalah 10,81% atau berada cukup jauh dibandingkan amanat UU HKPD.

4. Resume Pelaksanaan Kegiatan

a. Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan Semester II Tahun 2025 pada Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat

Kegiatan Sosialisasi Standar Akuntansi Pemerintahan Semester II Tahun 2025 dilaksanakan pada Kamis, 16 Oktober 2026, bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan 15 BPKAD lingkup Provinsi Kalimantan Barat serta Satker UAPPA-W lingkup Kalimantan Barat.

Narasumber kegiatan dihadirkan dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, yaitu Kepala Seksi Dukungan Pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kepala Seksi Fasilitas Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Materi yang dibahas meliputi PSAP 18 tentang Pendapatan dari Transaksi Nonpertukaran dan PSAP 19 tentang Pengaturan Bersama.



b. Koordinasi LKPD dan Asistensi Permasalahan BPKAD Kota Singkawang

Kegiatan koordinasi dan asistensi dilaksanakan pada 11–12 September



2025 bertempat di BPKAD Kota Singkawang. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan asistensi dalam penyusunan LKPD, penyusunan rencana properti investasi, serta identifikasi BUMD, yaitu PDAM Gunung Poteng Kota Singkawang, dalam rangka penyusunan LSKP-Korporasi Publik Tahun 2026.

Selain itu, dibahas juga berbagai permasalahan lain yang dihadapi BPKAD Kota Singkawang, termasuk *sharing session* terkait implementasi Aplikasi SIPD dan peningkatan akurasi data realisasi bulanan yang disampaikan pemerintah daerah kepada DJPK.



c. Focus Group Discussion “Strategi Meningkatkan dan Mempertahankan Opini BPK”

Kegiatan dilaksanakan pada 22 September 2025 bertempat di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan pengelola keuangan 15 Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Narasumber kegiatan antara lain perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Barat dan perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat. Pada kegiatan tersebut, dibahas strategi untuk mempertahankan opini WTP serta meningkatkan opini BPK bagi pemda yang masih mendapatkan predikat WDP.



d. Koordinasi LKPD dan Asistensi Permasalahan Akuntansi BKD Kota Pontianak

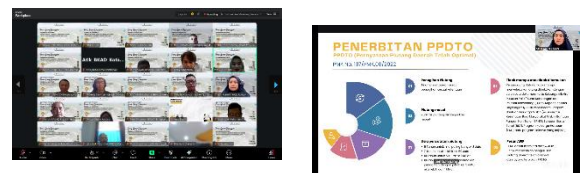
Kegiatan dilaksanakan pada 27 November 2025 bertempat BKD Kota

Pontianak. Pada kegiatan tersebut, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat memberikan asistensi terkait permasalahan transaksi non pertukaran, konsesi jasa, serta piutang daerah dan penetapan Perda mengenai pengelolaan piutang daerah. Selain itu, pada kegiatan tersebut juga dibahas terkait peluang investasi daerah dan peran Kanwil DJPb dalam peningkatan aksesibilitas pembiayaan daerah.



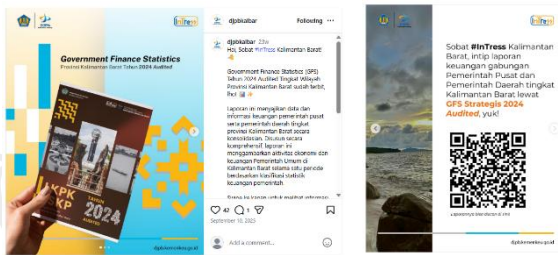
e. Focus Group Discussion “Mengurai Sistem Pengendalian Penanganan Piutang Daerah”

Kegiatan dilaksanakan pada 20 Januari 2026 melalui daring aplikasi Zoom Meetings dan Live Youtube pada t.kemenkeu.go.id/FGDPiutangDaerahKalbar. Kegiatan dihadiri oleh perwakilan pengelola keuangan 15 Pemerintah Daerah lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Narasumber kegiatan antara lain Kepala Seksi Piutang Negara KPKNL Pontianak, Kepala Seksi Piutang Negara II Kanwil DJKN Kalimantan Barat, dan Kepala Seksi Bimbingan Penagihan, Kanwil DJP Kalimantan Barat. Pada kegiatan tersebut, dibahas strategi dan tata cara untuk menangani piutang daerah mulai dari pengurusan, penagihan, hingga penghapusan piutang daerah dengan efektif, persuasif, namun tetap berlandaskan payung hukum yang kuat.



f. Publikasi LKPK-TW dan LSKP-TW Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 Audited

Telah dilakukan publikasi LKPK-TW dan LSKP-TW Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 *Audited* pada 29 Mei 2025 pada halaman Instagram Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat (@djpbkalbar) yang berisi *highlight* laporan konsolidasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta laporan statistik keuangan tingkat Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 26 September 2025. Selain melalui media sosial, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan *sharing session* terkait GFS kepada *stakeholder* pada kegiatan Koordinasi LKPD pada BKAD Provinsi Kalimantan Barat, BKD Kota Pontianak, dan BPKAD Kota Singkawang.



5. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan data pada LKPK-TW Provinsi Kalimantan Barat Tahun *Preliminary* 2025, Pendapatan Konsolidasian tercatat sebesar Rp18,47 triliun atau mengalami kontraksi sebesar 40,49 persen (*year on year/yoy*). Sementara itu, Belanja dan Transfer Konsolidasian terealisasi sebesar Rp32,69 triliun atau tumbuh negatif sebesar 36,02 persen (*yoy*). Dengan demikian, terdapat defisit sebesar Rp14,22 triliun dan Pembiayaan Neto sebesar Rp635,44 miliar. Posisi SiKPA Konsolidasian sampai dengan 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp13,58 triliun atau menurun 4,51 persen (*yoy*).

Pada Laporan Operasional, tercatat defisit sebesar Rp22,93 triliun, meningkat 8,92 persen (*yoy*). Kenaikan defisit ini disebabkan oleh penurunan Pendapatan Operasional sebesar 20,85 persen (*yoy*)

menjadi Rp15,72 triliun, sementara Beban Operasional juga menurun sebesar 4,91 persen (*yoy*) menjadi Rp38,73 triliun. Penurunan Pendapatan Operasional terutama dipengaruhi oleh turunnya Pendapatan Hibah sebesar Rp475,2 miliar atau 99,37 persen (*yoy*).

Berdasarkan data LSKPU-TW Provinsi Kalimantan Barat *Preliminary* 2025, Pendapatan Statistik tercatat sebesar Rp18,35 triliun atau turun 40,82 persen (*yoy*), yang secara umum disebabkan oleh penurunan Pendapatan Hibah (*Grants*) sebesar 99,77 persen (*yoy*). Beban Statistik tercatat sebesar Rp28,09 triliun atau turun 34,22 persen (*yoy*), sehingga terdapat defisit sebesar Rp9,74 triliun berdasarkan nilai *Net Operating Balance (NOB)*. Sementara itu, *Net Borrowing* sebesar negatif Rp14,22 triliun menunjukkan adanya kekurangan sumber daya keuangan. *Net Worth* Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp168,33 triliun atau mengalami penurunan sebesar 0,21 persen dibandingkan posisi per 31 Desember 2024.

Kondisi keuangan Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan analisis laporan keuangan secara umum menunjukkan solvabilitas keuangan yang cukup baik, ditinjau dari solvabilitas jangka pendek dan panjang, solvabilitas anggaran, dan solvabilitas layanan. Sementara itu, dalam hal fleksibilitas keuangan, Pemda lingkup Kalimantan Barat masih berada pada posisi kurang baik mengingat masih terdapat pemda dengan rasio fleksibilitas keuangan negatif. Selanjutnya, berdasarkan rasio kemandirian menunjukkan bahwa 6 dari 15 pemda termasuk dalam kategori kemandirian keuangan daerah yang "Sangat Kurang" yang menunjukkan ketergantungan yang tinggi terhadap pihak eksternal dalam membiayai kegiatan operasionalnya.

Berdasarkan Analisis Keseimbangan Fiskal, Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat berada pada kondisi defisit yang ditunjukkan oleh GOB dan NOB yang bernilai negatif sebesar Rp9,74 triliun.



Keseimbangan primer pemerintah umum menunjukkan nilai negatif yang menandakan bahwa pemerintah belum mampu memenuhi kewajiban bunga utang tanpa perlu melakukan penambahan kewajiban baru. Selanjutnya, berdasarkan Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya menunjukkan bahwa kontribusi baik Pajak Langsung maupun Pajak Tidak Langsung sebagian besar berasal dari pemerintah pusat yang disebabkan basis pajak yang dimiliki pemerintah pusat lebih luas dibandingkan dengan pemerintah daerah. Sementara itu, berdasarkan Analisis Indikator Pembiayaan menunjukkan Total Pembiayaan yang bernilai negatif yang menandakan transaksi kewajiban yang lebih besar dari transaksi aset keuangan pemerintah. Sedangkan pada Analisis Indikator Kekayaan dan Utang menunjukkan Utang Neto pemerintah yang bernilai negatif yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki lebih banyak aset yang dapat digunakan untuk membayar utangnya.

Permasalahan pengelolaan keuangan pemerintah pusat antara lain kontraksi pendapatan perpajakan, rendahnya penyaluran DBH, penyaluran DAK Fisik yang mengalami kontraksi serta terdapat 4 subbidang pada 3 daerah yang tidak dapat salur DAK Fisik, penyaluran Dana Desa *Earmark* Tahap 2 di mana terdapat 13 desa yang belum salur per 31 Desember 2025, serta saldo tidak normal pada beberapa satker di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tingkat pemerintah daerah, masih terdapat sejumlah permasalahan dalam pengelolaan keuangan. Ketergantungan fiskal yang tinggi, sebagian besar BUMD di lingkup Provinsi Kalimantan Barat masih membukukan rugi bersih yang berpotensi membebani APBD, serta amanat UU HKPD No 1 Tahun 2022 yang belum diselenggarakan secara optimal. Selain itu, pengelolaan kas daerah belum optimal, tercermin dari masih terbatasnya pemerintah daerah yang menempatkan kasnya pada

instrumen investasi atau deposito sebagai upaya optimalisasi pendapatan.

Di samping itu, belum seluruh pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat memiliki peraturan daerah yang mengatur pengelolaan piutang daerah. Kondisi ini menyebabkan proses penyisihan dan penghapusan piutang belum didukung oleh dasar hukum yang memadai, sehingga berpotensi menghambat tata kelola piutang yang akuntabel dan tertib.

Berdasarkan kondisi keuangan dan statistik pemerintah tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Barat pada *Preliminary* tahun 2025, dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut.

1. Penguatan integrasi data pada sistem perpajakan agar kebijakan pemindahan kewajiban perpajakan ke Lokasi NPWP induk tetap dapat memberikan gambaran penerimaan perpajakan berdasarkan lokasi ekonominya.
2. Pemerintah daerah perlu melakukan peninjauan terhadap BUMD yang masih mencatatkan rugi bersih, mengidentifikasi penyebab kerugian, serta mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan kinerja BUMD agar dapat berkontribusi pada APBD.
3. Mengingat keseimbangan fiskal dan keseimbangan primer masih bernilai negatif, diperlukan strategi pengendalian defisit secara bertahap melalui peningkatan pendapatan berkelanjutan dan pengendalian pembiayaan. Pemerintah daerah perlu memastikan bahwa penambahan hutang/kewajiban baru dilakukan secara selektif dan mempertimbangkan kapasitas fiskal jangka menengah.
4. Pemerintah daerah perlu meninjau kebijakan dan strategi investasi daerah sebagai upaya untuk meningkatkan PAD berdasarkan PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi agar tercipta transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan investasi pemerintah.



5. Pemerintah daerah perlu meninjau kebijakan penerimaan pendapatan non pertukaran dan pengaturan bersama yang diatur dalam PSAP 18 dan PSAP 19 yang baru wajib diimplementasikan pada tahun 2026 untuk dituangkan dalam kebijakan akuntansi daerah.
6. Untuk meningkatkan PAD dalam rangka meningkatkan kemandirian daerah, pemerintah daerah perlu melakukan pengembangan dengan fokus pada sektor-sektor potensial dan unggulan yang menyumbang pada pendapatan daerah yang cukup tinggi tanpa mengabaikan sektor ekonomi lainnya, seperti fokus pada pengembangan sektor pariwisata dan industri yang dapat berkontribusi langsung pada Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan BPHTB.
7. Pemerintah daerah perlu menyusun kebijakan manajemen kas yang lebih optimal melalui penempatan dana pada instrumen investasi yang aman dan mudah dicairkan (likuid) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan bunga dan memperbaiki fleksibilitas fiskal.



New DJPB
in Town



LAMPIRAN LRA, NERACA, LO LKPK-TW

GFS Strategis Tahun 2025 *Preliminary*
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



HANDAL
HUMAN HUMAN HUMAN HUMAN HUMAN



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
PENDAPATAN KONSOLIDASI	18.474.149.955.986	31.045.135.490.591	-40,49%
Pendapatan Perpajakan Konsolidasi	15.331.796.183.062	15.758.842.981.577	-2,71%
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.139.357.063.900	15.251.548.153.378	-79,42%
Pendapatan Hibah	2.996.709.024	34.744.355.636	-91,37%
BELANJA DAN TRANSFER	32.691.422.299.654	51.096.422.249.216	-36,02%
BELANJA KONSOLIDASI	27.229.575.627.563	36.621.626.098.098	-25,65%
Belanja Pegawai	13.666.799.474.308	14.063.278.549.304	-2,82%
Belanja Barang dan Jasa	9.620.234.622.151	13.945.760.265.666	-31,02%
Belanja Modal	3.350.946.521.916	6.924.810.076.855	-51,61%
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	10.815.708.803	22.942.531.167	-52,86%
Belanja Subsidi	364.617.500	2.190.015.581	-83,35%
Belanja Hibah	517.593.748.139	1.606.015.104.776	-67,77%
Belanja Bantuan Sosial	32.093.879.121	42.651.645.963	-24,75%
Belanja Lain-Lain	30.727.055.625	13.977.908.786	119,83%
TRANSFER KONSOLIDASI	5.461.846.672.091	14.474.796.151.119	-62,27%
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	2.545.619.327.846	3.054.594.880.596	-16,66%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	361.128.047.145	72.366.915.553	399,02%
Transfer Bantuan Keuangan	2.184.491.280.701	2.982.227.965.043	-26,75%
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT KE DAERAH DAN DANA DESA	2.916.227.344.245	11.420.201.270.523	-74,46%
Dana Bagi Hasil	227.039.043.306	956.355.074.480	-76,26%
Dana Alokasi Umum	1.107.391.619.233	7.517.739.381.007	-85,27%
Dana Alokasi Khusus Fisik	77.019.957.103	1.515.640.480.170	-94,92%
Dana Insentif Daerah	3.523.178.000	6.381.677.000	-44,79%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.228.468.135.987	1.298.890.056.966	-5,42%
Dana Desa	272.785.410.616	125.194.600.900	117,89%
SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A-B-C)	(14.217.272.343.668)	(20.051.286.758.625)	-2,58%
PEMBIAYAAN	635.440.410.383	1.474.722.724.945	-56,91%
Penerimaan Pembiayaan	885.456.939.311	1.865.066.961.985	-52,52%
Pengeluaran Pembiayaan	250.016.528.928	390.344.237.040	-35,95%
SISA LEBIH (KURANG) ANGGARAN (D+E)	(13.581.831.933.285)	(18.576.564.033.680)	-4,51%



**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**
Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
ASET	174.782.035.667.300	174.235.467.665.738	0,31%
Aset Lancar	13.998.149.533.253	10.553.048.134.746	32,65%
Kas dan setara kas	4.888.847.170.725	2.197.339.299.770	122,49%
Investasi jangka pendek	108.000.000.000	68.000.000.000	58,82%
Belanja dibayar di muka dan uang muka belanja	26.313.367.728	42.813.936.008	-38,54%
Piutang	2.023.131.416.472	1.790.921.694.181	12,97%
Piutang Perpajakan	1.194.939.930.890	1.032.652.635.482	15,72%
Piutang Bukan Pajak	1.806.970.705.665	1.662.740.212.220	8,67%
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	620.743.272	584.645.137	6,17%
Piutang Lain-Lain	24.395.647.057	17.623.823.060	38,42%
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(1.003.795.610.411)	(922.679.621.718)	8,79%
Persediaan	6.951.857.578.328	6.453.973.204.788	7,71%
Investasi Jangka Panjang	4.311.306.591.487	4.264.306.591.487	1,10%
Investasi jangka panjang non permanen	61.871.413	61.871.413	0,00%
Investasi jangka panjang permanen	4.311.244.720.074	4.264.244.720.074	1,10%
Aset Tetap	151.921.861.379.047	154.912.343.702.823	-1,93%
Tanah	86.800.294.758.506	86.142.127.112.453	0,76%
Peralatan dan Mesin	25.912.066.653.053	24.420.712.102.012	6,11%
Gedung dan Bangunan	33.903.796.450.605	33.058.859.080.729	2,56%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	78.637.151.177.212	76.567.157.679.817	2,70%
Aset Tetap Lainnya	1.841.852.109.927	1.746.219.236.437	5,48%
Konstruksi dalam Pengerjaan	1.579.364.247.537	1.846.562.430.198	-14,47%
Konsesi Jasa	3.507.516.169.746	3.507.516.169.746	0,00%
Akumulasi Penyusutan	(80.260.180.187.539)	(72.376.810.108.568)	10,89%
Aset Tetap yang Belum Diregister	-	-	-
Properti Investasi	5.380.003.147	5.478.504.028	-1,80%
Dana Cadangan	0	27.468.900.302	-100,00%
Dana Cadangan	0	27.468.900.302	-100,00%
Piutang Jangka Panjang	5.915.298.430	6.125.046.122	-3,42%
Tagihan piutang penjualan angsuran	1.595.364.867	1.575.385.210	1,27%
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	4.391.966.658	4.591.690.553	-4,35%
Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	32.557.800	-100,00%
Penyisihan piutang jangka panjang	(72.033.095)	(74.587.441)	-3,42%
Aset Lainnya	4.539.422.861.936	4.466.696.786.229	1,63%
Kemitraan dengan pihak ketiga	728.500.851.194	728.246.121.768	0,03%
Aset tidak berwujud	703.976.046.460	525.514.046.006	33,96%
Dana yang dibatasi penggunaannya	203.573.682.348	295.196.002.232	-31,04%
Aset lain-lain	3.618.015.098.850	3.552.319.480.738	1,85%
Akumulasi penyusutan/amortisasi	(714.642.816.916)	(634.578.864.515)	12,62%
KEWAJIBAN	6.449.263.361.491	5.556.864.467.956	16,06%
Kewajiban Jangka Pendek	2.889.375.884.343	1.950.598.707.384	48,13%
Utang perhitungan pihak ketiga	518.107.784	518.107.784	0,00%
Utang kepada pihak ketiga	1.101.899.842.156	1.259.020.166.055	-12,48%
Utang bunga	9.802.763.059	9.802.763.059	0,00%
Utang transfer	656.666.814.743	95.485.958.416	587,71%



Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
Bagian lancar utang jangka panjang	27.332.811.713	62.144.237.040	-56,02%
Utang yang belum ditagihkan*	382.864.111	0	100,00%
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	188.211.774.555	274.862.110.657	-31,53%
Pendapatan Diterima di Muka	800.222.938.341	144.193.585.735	454,96%
Uang muka	19.562.000	260.384.809	-92,49%
Utang jangka pendek lainnya	104.318.405.881	104.311.393.829	0,01%
Kewajiban Jangka Panjang	3.559.887.477.148	3.606.265.760.572	-1,29%
Utang jangka panjang dalam negeri	233.076.991.398	252.354.377.999	-7,64%
Kewajiban Konsesi Jasa	3.326.810.485.750	3.353.911.382.573	-0,81%
EKUITAS	168.332.772.305.809	168.678.603.197.783	-0,21%

*Berasal dari akun Persediaan yang Belum Diregister pada LKPP yang berasal dari sistem SPAN. Akan hilang pada laporan *unaudited* dan *audited*.

LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional – LO	15.720.682.587.254	19.861.506.262.952	-20,85%
Pendapatan Perpajakan – LO	12.618.097.677.244	15.847.498.280.977	-20,38%
Pendapatan Bukan Pajak – LO	2.202.653.548.823	2.814.315.067.531	-21,73%
Pendapatan Transfer – LO	66.524.062.111	30.086.490.727	121,11%
Pendapatan BLU – LO	801.495.846.606	614.538.933.035	30,42%
Pendapatan Hibah – LO	2.996.709.024	478.202.686.182	-99,37%
Pendapatan Lainnya - LO	28.914.743.446	76.864.804.500	-62,38%
Beban Operasional	38.730.688.985.644	40.728.485.361.533	-4,91%
Beban Pegawai	13.874.846.721.518	14.331.089.460.053	-3,18%
Beban Persediaan	592.029.804.530	650.426.794.505	-8,98%
Beban Barang dan Jasa	9.245.327.439.895	13.392.723.804.840	-30,97%
Beban Bunga	10.815.708.803	20.584.710.225	-47,46%
Beban Subsidi	364.617.500	2.190.015.581	-83,35%
Beban Hibah	517.593.748.139	1.614.861.436.614	-67,95%
Beban Bantuan Sosial	32.125.879.121	43.743.482.890	-26,56%
Beban Lain-Lain/Tidak Terduga	-	-	-
Beban Akrual Lainnya	7.724.041.610.575	7.527.227.383.317	2,61%
Beban Transfer	6.733.543.455.563	3.145.638.273.508	114,06%
Transfer Pempus ke Daerah dan dana Desa	4.187.924.127.717	2.007.031.152.869	108,66%
Dana Bagi Hasil	175.801.481.306	198.247.735	88577,67%
Dana Bagi Hasil Pajak	174.038.013.306	0	100,00%
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0	198.247.735	-100,00%
Dana Bagi Hasil Cukai	1.763.468.000	0	100,00%
Dana Alokasi Umum	1.107.391.619.233	13.614.488.351	8033,92%
Dana Alokasi Khusus	765.716.342.948	0	100,00%
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dana Insentif Daerah	3.523.178.000	5.910.960.000	-40,40%
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	539.771.750.142	48.688.880.430	1008,61%
Dana Desa	1.595.719.756.088	1.938.618.576.353	-17,69%
Beban Transfer Lain-Lain	-	-	-
Beban Transfer Pemda	2.545.619.327.846	1.138.607.120.639	123,57%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	355.136.499.602	93.424.722.400	280,13%
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.991.547.543	5.951.885.098	0,67%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik	9.851.783.366	0	100,00%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.174.639.497.335	1.039.230.513.141	109,25%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(23.010.006.398.390)	(20.866.979.098.581)	10,27%
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	82.245.668.830	(179.014.223.226)	-145,94%
SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA	0	(4.790.665.603)	-100,00%
SURPLUS (DEFISIT) LO	(22.927.760.729.560)	(21.050.783.987.410)	8,92%



New DJPB
in Town



LAMPIRAN LRA, NERACA, LO LKPP-TW

GFS Strategis Tahun 2025 Preliminary
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



HANDAL
Honesty Accuracy Digital Innovation Loyalty



LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH			
I. Pendapatan Perpajakan	11.639.867.780.075	11.902.301.578.087	-2,20%
1. Pajak Dalam Negeri	11.222.722.647.075	11.574.619.974.087	-3,04%
2. Pajak Perdagangan Internasional	417.145.133.000	327.681.604.000	27,30%
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.341.170.858.029	1.340.721.625.509	0,03%
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	-	-	-
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	-	-	-
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	600.634.463.242	621.813.087.217	-3,41%
4. Pendapatan PNBP Lainnya	740.536.394.787	718.908.538.292	3,01%
III. Pendapatan Hibah	-	-	-
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	12.981.038.638.104	13.243.023.203.596	-1,98%
B. BELANJA NEGARA			
I. Belanja Pemerintah Pusat	9.767.148.595.276	12.360.701.965.645	-20,98%
1. Belanja Pegawai	4.611.403.281.365	4.234.674.509.274	8,90%
2. Belanja Barang	3.950.908.360.285	5.837.444.808.345	-32,32%
3. Belanja Modal	1.187.367.511.626	2.274.614.912.926	-47,80%
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-
5. Belanja Subsidi	-	-	-
6. Belanja Hibah	-	-	-
7. Belanja Sosial	17.469.442.000	13.967.735.100	25,07%
8. Belanja Lain-Lain	-	-	-
II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa	20.226.198.818.736	20.628.816.107.090	-1,95%
1. Dana Transfer Umum	12.980.979.228.401	13.908.446.382.005	-6,67%
a. Dana Bagi Hasil	1.313.884.911.500	1.310.900.175.870	0,23%
b. Dana Alokasi Umum	12.980.979.228.401	12.597.546.206.135	3,04%
2. Dana Transfer Khusus	4.283.661.097.747	4.639.912.206.183	-7,68%
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	765.716.342.948	1.489.714.484.091	-48,60%
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.517.944.754.799	2.792.667.242.208	25,97%
c. Hibah Kepada Daerah	-	-	-
3. Dana Insentif Daerah	51.953.825.000	140.326.341.000	-62,98%
4. Dana Otonomi Khusus	-	-	-
5. Dana Keistimewaan DIY	-	-	-
6. Insentif Fiskal	-	-	-
7. Dana Desa	1.595.719.756.088	1.940.131.177.902	-17,75%
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	29.993.347.414.012	32.989.518.072.735	-9,08%
C. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN (A – B)	(17.012.308.775.908)	(19.746.494.869.139)	13,85%
D. PEMBIAYAAN	-	-	0,00%
E. SISA LEBIH (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN – SILPA (SIKPA) (D-C)	(17.012.308.775.908)	(19.746.494.869.139)	13,85%



**NERACA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
Aset Lancar	8.362.249.172.324	4.986.409.789.025	67,70%
Kas dan setara kas	616.711.343.985	1.016.946.956.994	-39,36%
Kas di Bendahara Pengeluaran	81.572.296	279.946.809	-70,86%
Kas di Bendahara Penerimaan	1.574.000	0	100,00%
Kas Lainnya dan Setara Kas	286.715.332.756	647.602.020.800	-55,73%
Kas pada Badan Layanan Umum	329.912.864.933	369.064.989.385	-10,61%
Investasi jangka pendek	108.000.000.000	68.000.000.000	58,82%
Belanja dibayar di muka (prepaid)	6.930.168.603	24.251.680.009	-71,42%
Uang muka belanja (prepayment)	10.228.565.859	485.860	2105149,63%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	4.702.385.754	14.109.522.627	-66,67%
Piutang	1.482.195.478.892	1.243.670.608.110	19,18%
Piutang Perpajakan	1.081.661.779.615	919.374.484.207	17,65%
Piutang Bukan Pajak	1.027.852.644.182	877.307.002.247	17,16%
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	620.743.272	584.645.137	6,17%
Piutang dari KUN (Uang Muka Yang Akan Diterima)	-	-	-
Piutang dari Kegiatan BLU	13.721.751.255	6.949.927.258	97,44%
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(641.661.439.432)	(560.545.450.739)	14,47%
Persediaan	6.133.481.229.231	5.635.596.855.691	8,83%
Persediaan yang Belum Diregister*	-	-	-
Aset Tetap	98.698.653.962.541	99.626.477.232.384	-0,93%
Tanah	68.884.649.958.886	68.232.582.660.553	0,96%
Peralatan dan Mesin	14.383.331.898.475	13.280.952.865.951	8,30%
Gedung dan Bangunan	10.254.209.967.227	9.995.330.692.127	2,59%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	36.996.322.635.021	35.989.089.095.889	2,80%
Aset Tetap Lainnya	154.969.124.690	143.313.742.932	8,13%
Konstruksi dalam Pengerjaan	753.122.093.855	1.020.320.276.516	-26,19%
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	-	-	-
Aset Konsesi Jasa	3.507.516.169.746	3.507.516.169.746	0,00%
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(36.235.467.885.359)	(32.542.628.271.330)	11,35%
Properti Investasi	5.380.003.147	5.478.504.028	-1,80%
Properti Investasi	6.394.258.710	6.394.258.710	0,00%
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.014.255.563)	(915.754.682)	10,76%
Piutang Jangka Panjang	432.119.727	134.308.809	221,74%
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	504.152.822	704.864.199	-28,48%
Piutang jangka panjang lainnya	0	32.557.800	-100,00%
Penyisihan piutang tak tertagih - piutang jangka panjang	(72.033.095)	(74.587.441)	-3,42%
Aset Lainnya	813.514.028.530	743.640.890.770	9,40%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	-	-	-
Aset tidak berwujud	449.468.847.738	271.434.366.560	65,59%
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	203.573.682.348	295.196.002.232	-31,04%
Aset lain-lain	663.190.723.478	600.034.312.862	10,53%
Akumulasi penyusutan aset lainnya	(347.566.374.653)	(300.566.230.052)	15,64%
Akumulasi amortisasi aset lainnya	(155.152.850.381)	(122.457.560.832)	26,70%
JUMLAH ASET	107.880.229.286.269	108.378.835.571.031	-0,46%
Kewajiban Jangka Pendek	1.679.699.289.767	699.795.538.989	140,03%
Utang kepada pihak ketiga	186.758.941.614	255.933.589.694	-27,03%
Utang transfer	731.273.666.326	251.723.337.326	190,51%



Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
Utang kelebihan pembayaran pendapatan	42.621.530.687	129.271.866.789	-67,03%
Pendapatan diterima dimuka	718.627.581.983	62.598.229.377	1048,00%
Utang jangka pendek lainnya	398.007.157	8.130.994	4794,94%
Uang muka dari KPPN	19.562.000	260.384.809	-92,49%
Kewajiban Jangka Panjang	3.329.138.202.750	3.250.590.555.514	2,42%
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Lainnya	2.327.717.000	0	100,00%
Kewajiban konsesi jasa	3.326.810.485.750	3.353.911.382.573	-0,81%
JUMLAH KEWAJIBAN	5.008.837.492.517	4.053.706.921.562	23,56%
EKUITAS	102.871.391.793.752	104.325.128.649.469	-1,39%
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	107.880.229.286.269	108.378.835.571.031	-0,46%

*Berasal dari sistem SPAN. Akan terkoreksi pada laporan *unaudited* dan *audited*.

LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
KEGIATAN OPERASIONAL			
Pendapatan Operasional			
Pendapatan Perpajakan	8.926.169.274.257	11.928.383.417.279	-25,17%
Pendapatan Pajak Penghasilan	3.031.039.440.490	4.705.851.899.216	-35,59%
Pendapatan PPN dan PPnBM	5.080.687.630.783	6.098.720.060.701	-16,69%
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	208.634.658.399	504.474.989.247	-58,64%
Pendapatan Cukai	211.706.930.000	129.210.395.000	63,85%
Pendapatan Pajak Lainnya	11.852.942.585	160.900.716.115	-92,63%
Pendapatan Bea Masuk	55.016.153.000	76.214.898.000	-27,81%
Pendapatan Bea Keluar	327.231.519.000	253.010.459.000	29,34%
Pendapatan Pajak Lain-lain	-	-	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.246.903.982.115	1.258.261.639.985	-0,90%
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	640.545.703.901	643.722.706.950	-0,49%
Pendapatan Badan Layanan Umum	606.358.278.214	614.538.933.035	-1,33%
Pendapatan Hibah	-	-	-
Pendapatan Hibah	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian	-	-	-
Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	-	-	-
Jumlah Pendapatan Operasional	10.173.073.256.372	13.186.645.057.264	-22,85%
Beban Operasional			
Beban Pegawai	4.819.450.528.575	4.455.492.271.687	8,17%
Beban Persediaan	590.729.806.480	649.438.474.565	-9,04%
Beban Barang dan Jasa	1.538.693.193.721	2.715.346.342.013	-43,33%
Beban Pemeliharaan	663.953.040.211	543.334.749.063	22,20%
Beban Perjalanan Dinas	257.492.659.337	718.729.538.472	-64,17%
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	696.733.946.765	1.151.602.522.132	-39,50%
Beban Bantuan Sosial	17.501.442.000	13.967.735.100	25,30%
Beban Transfer	20.120.463.243.736	20.542.107.543.095	-2,05%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.433.263.392.259	3.477.710.798.072	-1,28%
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	100.247.753.374	131.824.480.999	-23,95%
Jumlah Beban Operasional	32.238.529.006.458	34.399.554.455.198	-6,28%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(22.065.455.750.086)	(21.212.909.397.934)	4,02%
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	10.699.506.715	5.128.408.184	108,63%
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.424.026.382	80.984.333.891	-93,30%
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	5.275.480.333	(75.855.925.707)	106,95%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	83.707.762.826	79.436.840.555	5,38%
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.737.574.329	8.627.507.799	-21,91%
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	76.970.188.497	70.809.332.756	8,70%
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	82.245.668.830	(5.046.592.951)	1729,73%
SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA	-	-	0,00%



Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
SURPLUS (DEFISIT) LO	(21.983.210.081.256)	(21.217.955.990.885)	3,61%



New DJPB
in Town



LAMPIRAN LRA, NERACA, LO LKPKD-TW

GFS Strategis Tahun 2025 *Preliminary*
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



HANDAL
Human Human Digital Digital Human Local



LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
PENDAPATAN	22.803.082.792.373	27.010.727.123.562	-15,58%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.478.104.527.270	5.881.992.771.872	-6,87%
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	3.691.928.402.987	3.856.541.403.490	-4,27%
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	939.017.981.130	842.163.237.715	11,50%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	262.970.454.331	260.280.433.621	1,03%
Lain-lain PAD yang Sah - LRA	584.187.688.822	923.007.697.045	-36,71%
PENDAPATAN TRANSFER – LRA	17.263.254.604.860	21.034.161.709.753	-17,93%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan – LRA	15.891.889.612.388	19.085.280.468.751	-16,73%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LRA	1.371.364.992.472	1.948.881.241.002	-29,63%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	-	-	-
Bantuan Keuangan	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LRA	61.723.660.243	94.572.641.937	-34,73%
Pendapatan Hibah - LRA	2.996.709.024	34.744.355.636	-91,37%
Pendapatan Lainnya - LRA	58.726.951.219	59.828.286.301	-1,84%
BELANJA	20.008.046.360.133	27.315.519.013.048	-26,75%
BELANJA OPERASI	15.268.120.966.372	19.596.751.059.738	-22,09%
Belanja Pegawai	9.055.396.192.943	9.828.604.040.030	-7,87%
Belanja Barang dan Jasa	5.669.326.261.866	8.108.315.457.321	-30,08%
Belanja Bunga	10.815.708.803	22.942.531.167	-52,86%
Belanja Subsidi	364.617.500	2.190.015.581	-83,35%
Belanja Hibah	517.593.748.139	1.606.015.104.776	-67,77%
Belanja Bantuan Sosial	14.624.437.121	28.683.910.863	-49,02%
BELANJA MODAL	2.163.579.010.290	4.650.195.163.929	-53,47%
Belanja Modal Tanah	6.100.347.720	13.532.146.500	-54,92%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	388.975.518.517	776.940.754.351	-49,93%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	586.058.094.776	1.245.727.475.426	-52,95%
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.062.759.958.263	2.468.064.295.968	-56,94%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	83.977.491.732	138.485.129.188	-39,36%
Belanja Modal Aset Lainnya	2.873.905.086	7.445.362.496	-61,40%
Belanja Modal BLUD	32.833.694.196	-	100,00%
BELANJA TAK TERDUGA	30.727.055.625	13.977.908.786	119,83%
TRANSFER	2.545.619.327.846	3.054.594.880.596	-16,66%
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	361.128.047.145	72.366.915.553	399,02%
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	355.136.499.602	65.946.246.920	438,52%
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.991.547.543	6.420.668.633	-6,68%
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.184.491.280.701	2.982.227.965.043	-26,75%
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	9.851.783.366	481.459.033.175	-97,95%
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.174.639.497.335	2.500.768.931.868	-13,04%
SURPLUS/DEFISIT LRA	2.795.036.432.240	(304.791.889.486)	1017,03%
PEMBIAYAAN	635.440.410.383	1.474.722.724.945	-56,91%
Penerimaan Pembiayaan	885.456.939.311	1.865.066.961.985	-52,52%
Pengeluaran Pembiayaan	250.016.528.928	390.344.237.040	-35,95%
SISA LEBIH/KURANG ANGGARAN (SiLPA/SiKPA)	3.430.476.842.623	1.169.930.835.459	193,22%



NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
ASET	66.976.413.232.614	66.012.869.473.619	1,46%
Aset Lancar	5.710.507.212.512	2.706.709.404.368	110,98%
Kas dan Setara Kas	4.272.135.826.740	1.180.392.342.777	261,93%
Investasi Jangka Pendek	-	-	-
Piutang Pendapatan	967.003.064.341	1.054.948.740.158	-8,34%
Piutang Lainnya	10.673.895.802	10.673.895.802	0,00%
Penyisihan Piutang	(362.134.170.979)	(362.134.170.978)	0,00%
Beban Dibayar Dimuka	4.452.247.512	4.452.247.512	0,00%
Persediaan	818.376.349.097	818.376.349.097	0,00%
Aset Untuk Dikonsolidasikan	-	-	-
Investasi Jangka Panjang	4.311.306.591.487	4.264.306.591.487	1,10%
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	61.871.413	61.871.413	0,00%
Investasi Jangka Panjang Permanen	4.311.244.720.074	4.264.244.720.074	1,10%
Aset Tetap	53.223.207.416.506	55.285.866.470.439	-3,73%
Tanah	17.915.644.799.620	17.909.544.451.900	0,03%
Peralatan dan Mesin	11.528.734.754.578	11.139.759.236.061	3,49%
Gedung dan Bangunan	23.649.586.483.378	23.063.528.388.602	2,54%
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	41.640.828.542.191	40.578.068.583.928	2,62%
Aset Tetap Lainnya	1.686.882.985.237	1.602.905.493.505	5,24%
Konstruksi dalam Pengerjaan	826.242.153.682	826.242.153.682	0,00%
Akumulasi Penyusutan	(44.024.712.302.180)	(39.834.181.837.239)	10,52%
Dana Cadangan	0	27.468.900.302	-100,00%
Dana Cadangan	0	27.468.900.302	-100,00%
Aset Lainnya	3.731.392.012.109	3.728.518.107.023	0,08%
Tagihan Jangka Panjang	5.462.211.564	5.462.211.564	0,00%
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	728.500.851.194	728.246.121.768	0,03%
Aset Tidak Berwujud	42.583.606.840	42.524.605.815	0,14%
Aset Lain-lain	2.954.824.375.372	2.952.285.167.876	0,09%
KEWAJIBAN	1.515.032.720.557	1.659.394.925.303	-8,70%
Kewajiban Jangka Pendek	1.284.283.446.159	1.407.040.547.304	-8,72%
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	518.107.784	518.107.784	0,00%
Utang Bunga	9.802.763.059	9.802.763.059	0,00%
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	27.332.811.713	62.144.237.040	-56,02%
Pendapatan Diterima Dimuka	81.835.354.696	81.835.354.696	0,00%
Utang Belanja	915.140.900.542	1.003.086.576.361	-8,77%
Utang Jangka Pendek Lainnya	249.653.508.364	249.653.508.364	0,00%
Kewajiban Jangka Panjang	230.749.274.398	252.354.377.999	-8,56%
Utang Dalam Negeri	230.749.274.398	252.354.377.999	-8,56%
Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-	-
EKUITAS	65.461.380.512.057	64.353.474.548.316	1,72%



LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
PENDAPATAN - LO	21.480.148.446.901	25.209.937.595.914	-14,79%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.478.104.527.270	6.106.743.742.478	-10,29%
Pendapatan Pajak Daerah - LO	3.691.928.402.987	3.919.114.863.698	-5,80%
Pendapatan Retribusi Daerah – LO	939.017.981.130	917.546.586.402	2,34%
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	262.970.454.331	389.162.685.907	-32,43%
Lain-lain PAD yang Sah - LO	584.187.688.822	880.919.606.472	-33,68%
PENDAPATAN TRANSFER – LO	15.940.320.259.388	18.565.162.880.953	-14,14%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO	15.891.889.612.388	18.416.845.619.099	-13,71%
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya – LO	48.430.647.000	140.326.341.000	-65,49%
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO	0	7.990.920.854	-100,00%
Bantuan Keuangan - LO	-	-	-
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH – LO	61.723.660.243	538.030.972.483	-88,53%
Pendapatan Hibah - LRA	2.996.709.024	478.202.686.182	-99,37%
Pendapatan Lainnya - LRA	58.726.951.219	59.828.286.301	-1,84%
BEBAN	22.424.699.095.205	24.864.007.296.561	-9,81%
BELANJA OPERASI - LO	19.879.079.767.359	23.725.400.175.922	-16,21%
Beban Pegawai	9.055.396.192.943	9.875.597.188.366	-8,31%
Beban Barang dan Jasa	6.089.754.597.911	8.264.698.973.100	-26,32%
Beban Bunga	10.815.708.803	20.584.710.225	-47,46%
Beban Subsidi	364.617.500	2.190.015.581	-83,35%
Beban Hibah	517.593.748.139	1.614.861.436.614	-67,95%
Beban Bantuan Sosial	14.624.437.121	29.775.747.790	-50,88%
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.190.530.464.942	3.661.038.069.879	14,46%
Beban Penyisihan Piutang	0	63.533.579.836	-100,00%
Beban Lain-lain	0	193.120.454.532	-100,00%
BEBAN TRANSFER	2.545.619.327.846	1.138.607.120.639	123,57%
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	355.136.499.602	93.424.722.400	280,13%
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.991.547.543	5.951.885.098	0,67%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	9.851.783.366	0	100,00%
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.174.639.497.335	1.039.230.513.141	109,25%
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	-	-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(944.550.648.304)	345.930.299.353	-373,05%
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	(944.550.648.304)	(173.967.630.275)	442,95%
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0	(4.790.665.603)	-100,00%
SURPLUS/DEFISIT - LO	(944.550.648.304)	167.172.003.475	-665,02%



New DJPB
in Town



LAMPIRAN LO & NERACA LSKP-TW

GFS Strategis Tahun 2025 *Preliminary*
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
1 Revenue	18.351.119.932.760	31.008.531.170.902	-40,82%
11 Taxes	15.321.808.258.369	15.642.661.243.531	-2,05%
12 Social Contributions	27.025.651.719	11.934.511.589.287	-99,77%
13 Grants	3.002.286.022.672	3.431.358.338.083	-12,50%
14 Other Revenue	28.091.472.182.445	42.704.900.060.067	-34,22%
2 Expense	13.222.672.830.872	14.028.128.229.776	-5,74%
21 Compensation of Employees	8.376.197.180.813	12.028.162.026.003	-30,36%
22 Use of Goods and Services	-	-	-
23 Consumption of Fixed Capital	10.815.708.803	22.942.531.167	-52,86%
24 Interests	364.617.500	2.190.015.581	-83,35%
25 Subsidies	5.479.228.618.949	15.075.666.945.858	-63,66%
26 Grants	32.093.879.121	42.651.645.963	-24,75%
27 Social Benefits	970.099.346.387	1.505.158.665.719	-35,55%
28 Other Expense	(9.740.352.249.685)	(11.696.368.889.165)	-16,72%
GOB Gross Operating Balance (1-2+23+NOBz)	(9.740.352.249.685)	(11.696.368.889.165)	-16,72%
NOB Net Operating Balance (1-2+NOBz)	(9.740.352.249.685)	(11.696.368.889.165)	-16,72%
3 NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	4.476.920.093.983	8.354.917.869.460	-46,42%
31 Net/Gross Investment in Nonfinancial Assets	3.328.091.921.124	6.886.245.796.019	-51,67%
311 Fixed Assets	1.142.116.823.699	1.441.792.349.339	-20,78%
312 Inventories	-	-	-
313 Valuables	6.711.349.160	26.879.724.102	-75,03%
314 Nonproduced Assets	18.351.119.932.760	31.008.531.170.902	-40,82%
NLB Net Lending / Borrowing (1-2+NOBz-31)	(14.217.272.343.668)	(20.051.286.758.625)	-29,10%
3 TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)	(14.217.272.343.668)	(20.051.286.758.625)	-29,10%
32 Net Acquisition of Financial Assets (321+322+323)	(14.292.755.872.596)	(20.270.830.995.665)	-29,49%
321 Domestic Debtors	(14.292.755.872.596)	(20.270.830.995.665)	-29,49%
322 External Debtors	-	-	-
33 Net Incurrence of Liabilities (331+332)	(75.483.528.928)	(219.544.237.040)	-65,62%
331 Domestic Creditors	(75.483.528.928)	(219.544.237.040)	-65,62%
332 External Creditors	-	-	-



NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
6 NET WORTH	168.332.772.305.809	168.678.603.197.783	-0,21%
61 Nonfinancial Assets	162.486.447.288.916	164.815.050.073.869	-1,41%
611 Fixed Assets	68.734.294.952.082	72.218.949.756.628	-4,83%
6111 Building and structures	59.069.655.477.259	62.339.126.400.380	-5,24%
6112 Machinery and equipment	4.499.826.713.269	4.958.119.968.502	-9,24%
6113 Other fixed assets	5.164.812.761.554	4.921.703.387.746	4,94%
612 Inventories	6.951.857.578.328	6.453.973.204.788	7,71%
6121 Strategic stocks	75.479.400	111.107.400	-32,07%
6122 Other inventories	6.951.782.098.928	6.453.862.097.388	7,72%
614 Nonproduced Assets	86.800.294.758.506	86.142.127.112.453	0,76%
6141 Land	86.800.294.758.506	86.142.127.112.453	0,76%
6142 Mineral and energy resources	-	-	-
6143 Other naturally occurring assets	-	-	-
6144 Intangible nonproduced assets	-	-	-
62 Financial Assets	12.295.588.378.385	9.420.417.591.870	30,52%
6202 Currency and deposits	5.200.420.853.073	2.588.004.202.304	100,94%
6203 Debt securities	61.871.413	61.871.413	0,00%
6204 Loans	0	32.557.800	-100,00%
6205 Equity and investment fund	4.311.244.720.074	4.264.244.720.074	1,10%
6208 Other accounts receivable	2.783.860.933.824	2.568.074.240.279	8,40%
621 Domestic Debtors	12.295.588.378.384	9.420.417.591.870	30,52%
6212 Currency and deposits	5.200.420.853.073	2.588.004.202.304	100,94%
6213 Debt securities	61.871.413	61.871.413	0,00%
6214 Loans	0	32.557.800	-100,00%
6215 Equity and investment fund	4.311.244.720.074	4.264.244.720.074	1,10%
6218 Other accounts receivable	2.783.860.933.824	2.568.074.240.279	8,40%
622 External Debtors	-	-	-
6222 Currency and deposits	-	-	-
6225 Equity and investment fund	-	-	-
63 Liabilities	6.449.263.361.491	5.556.864.467.956	16,06%
6303 Debt securities	-	-	-
6304 Loans	258.082.086.111	314.498.615.039	-17,94%
6308 Other accounts payable	6.191.181.275.380	5.242.365.852.917	18,10%
631 Domestic Creditors	6.449.263.361.491	5.556.864.467.956	16,06%
6313 Debt securities	-	-	-
6314 Loans	258.082.086.111	314.498.615.039	-17,94%
6318 Other accounts receivable	6.191.181.275.380	5.242.365.852.917	18,10%
632 External Creditors	-	-	-
6323 Debt securities	-	-	-
6324 Loans	-	-	-
Memorandum items:			
6M2 Net Financial Worth (62-63)	5.846.325.016.894	3.863.553.123.914	51,32%



New DJPB
in Town



LAMPIRAN LO & NERACA LSKPP-TW

GFS Strategis Tahun 2025 *Preliminary*
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



HANDAL
Honesty Accuracy Digital Innovation Loyalty



LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
1 Revenue	12.970.340.705.389	13.237.894.795.412	-2,02%
11 Taxes	11.629.879.855.382	11.786.119.840.041	-1,33%
12 Social Contributions	-	-	-
13 Grants	14.999.602.608	17.999.996.800	-16,67%
14 Other Revenue	1.325.461.247.399	1.433.774.958.571	-7,55%
2 Expense	27.663.863.078.687	29.273.110.810.470	-5,50%
21 Compesation of Employees	4.611.403.281.365	4.234.674.509.274	8,90%
22 Use of Goods and Services	2.614.989.896.586	4.192.667.338.752	-37,63%
23 Consumption of Fixed Capital	-	-	-
24 Interests	-	-	-
25 Subsidies	-	-	-
26 Grants	20.226.198.818.736	20.628.816.107.090	-1,95%
27 Social Benefits	17.469.442.000	13.967.735.100	25,07%
28 Other Expense	193.801.640.000	202.985.120.254	-4,52%
GOB Gross Operating Balance (1-2+23+NOBz)	(14.693.522.373.298)	(16.035.216.015.058)	-8,37%
NOB Net Operating Balance (1-2+NOBz)	(14.693.522.373.298)	(16.035.216.015.058)	-8,37%
3 NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	(14.693.522.373.298)	(16.035.216.015.058)	-8,37%
31 Net/Gross Investment in Nonfinancial Assets	2.318.786.402.610	3.711.278.854.081	-37,52%
311 Fixed Assets	1.176.058.577.471	2.256.138.927.140	-47,87%
312 Inventories	1.142.116.823.699	1.441.792.349.339	-20,78%
313 Valuables	-	-	-
314 Nonproduced Assets	611.001.440	13.347.577.602	-95,42%
NLB Net Lending / Borrowing (1-2+NOBz-31)	(17.012.308.775.908)	(19.746.494.869.139)	-13,85%
3 TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)	(17.012.308.775.908)	(19.746.494.869.139)	-13,85%
32 Net Acquisition of Financial Assets (321+322+323)	(17.012.308.775.908)	(19.746.494.869.139)	-13,85%
321 Domestic Debtors	(17.012.308.775.908)	(19.746.494.869.139)	-13,85%
322 External Debtors	-	-	-
33 Net Incurrence of Liabilities (331+332)	-	-	-
331 Domestic Creditors	-	-	-
332 External Creditors	-	-	-



NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
6 NET WORTH	102.871.391.793.752	104.325.128.649.469	-1,39%
61 Nonfinancial Assets	105.447.455.541.101	105.715.997.480.641	-0,25%
611 Fixed Assets	30.429.324.352.984	31.847.817.964.397	-4,45%
6111 Building and structures	26.816.185.719.246	28.484.757.828.053	-5,86%
6112 Machinery and equipment	3.132.616.839.633	3.039.072.015.794	3,08%
6113 Other fixed assets	480.521.794.105	323.988.120.550	48,31%
6114 Weapon systems	-	-	-
612 Inventories	6.133.481.229.231	5.635.596.855.691	8,83%
6121 Strategic stocks	75.479.400	111.107.400	-32,07%
6122 Other inventories	6.133.405.749.831	5.635.485.748.291	8,84%
614 Nonproduced Assets	68.884.649.958.886	68.232.582.660.553	0,96%
6141 Land	68.884.649.958.886	68.232.582.660.553	0,96%
6142 Mineral and energy resources	-	-	-
6143 Other naturally occurring assets	-	-	-
6144 Intangible nonproduced assets	-	-	-
62 Financial Assets	2.432.773.745.168	2.662.838.090.390	-8,64%
6202 Currency and deposits	928.285.026.333	1.380.142.959.226	-32,74%
6203 Debt securities	-	-	-
6204 Loans	-	32.557.800	-100,00%
6205 Equity and investment fund	-	-	-
6208 Other accounts receivable	1.504.488.718.835	1.282.662.573.364	17,29%
621 Domestic	2.432.773.745.168	2.662.838.090.390	-8,64%
6212 Currency and deposits	928.285.026.333	1.380.142.959.226	-32,74%
6213 Debt securities	-	-	-
6214 Loans	-	32.557.800	-100,00%
6215 Equity and investment fund	-	-	-
6218 Other accounts receivable	1.504.488.718.835	1.282.662.573.364	17,29%
622 External Creditors	-	-	-
6222 Currency and deposits	-	-	-
6225 Equity and investment fund	-	-	-
63 Liabilities	5.008.837.492.517	4.053.706.921.562	23,56%
6303 Debt securities	-	-	-
6304 Loans	-	-	-
6308 Other accounts payable	5.008.837.492.517	4.053.706.921.562	23,56%
631 Domestic	5.008.837.492.517	4.053.706.921.562	23,56%
6313 Debt securities	-	-	-
6314 Loans	-	-	-
6318 Other accounts payable	5.008.837.492.517	4.053.706.921.562	23,56%
632 External Creditors	-	-	-
6323 Debt securities	-	-	-
6324 Loans	-	-	-
Memorandum items:			
6M2 Net Financial Worth (62-63)	(2.576.063.747.349)	(1.390.868.831.172)	85,21%





LAMPIRAN
LO & NERACA
LSKPKDK-TW

GFS Strategis Tahun 2025 *Preliminary*
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Untuk Periode yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2024	Naik/ Turun
1 Revenue	23.217.133.999.953	28.199.723.397.994	-17,67%
11 Taxes	3.691.928.402.987	3.856.541.403.490	-4,27%
12 Social Contributions	-	-	-
13 Grants	17.789.637.902.951	22.285.770.328.690	-20,17%
14 Other Revenue	1.735.567.694.015	2.057.411.665.813	-15,64%
2 Expense	18.263.963.876.340	23.860.876.272.101	-23,46%
21 Compensation of Employees	8.611.269.549.507	9.793.453.720.502	-12,07%
22 Use of Goods and Services	5.761.207.284.227	7.835.494.687.251	-26,47%
23 Consumption of Fixed Capital	-	-	-
24 Interests	10.815.708.803	22.942.531.167	-52,86%
25 Subsidies	364.617.500	2.190.015.581	-83,35%
26 Grants	3.089.384.572.795	4.875.937.861.272	-36,64%
27 Social Benefits	14.624.437.121	28.683.910.863	-49,02%
28 Other Expense	776.297.706.387	1.302.173.545.464	-40,38%
GOB Gross Operating Balance (1-2+23+NOBz)	4.953.170.123.613	4.338.847.125.893	14,16%
NOB Net Operating Balance (1-2+NOBz)	4.953.170.123.613	4.338.847.125.893	14,16%
3 NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	4.953.170.123.613	4.338.847.125.893	14,16%
31 Net/Gross Investment in Nonfinancial Assets	2.158.133.691.373	4.643.639.015.380	-53,52%
311 Fixed Assets	2.152.033.343.653	4.630.106.868.880	-53,52%
312 Inventories	-	-	-
313 Valuables	-	-	-
314 Nonproduced Assets	6.100.347.720	13.532.146.500	-54,92%
NLB Net Lending / Borrowing (1-2+NOBz-31)	2.795.036.432.240	(304.791.889.487)	1017,03%
3 TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)	2.719.552.903.312	(304.791.889.486)	992,27%
32 Net Acquisition of Financial Assets (321+322+323)	2.719.552.903.312	(524.336.126.526)	618,67%
321 Domestic Debtors	2.719.552.903.312	(524.336.126.526)	618,67%
322 External Debtors	-	-	-
33 Net Incurrence of Liabilities (331+332)	(75.483.528.928)	(219.544.237.040)	-65,62%
331 Domestic Creditors	(75.483.528.928)	(219.544.237.040)	-65,62%
332 External Creditors	-	-	-



NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Naik/ Turun
6 NET WORTH	65.461.380.512.058	64.353.474.548.314	1,72%
61 Nonfinancial Assets	57.038.991.747.815	40.371.131.792.231	41,29%
611 Fixed Assets	38.304.970.599.098	33.854.368.572.327	13,15%
6111 Building and structures	32.253.469.758.014	-	100,00%
6112 Machinery and equipment	1.367.209.873.636	1.919.047.952.708	-28,76%
6113 Other fixed assets	4.684.290.967.448	4.597.715.267.196	1,88%
6114 Weapon systems	-	-	-
612 Inventories	818.376.349.097	818.376.349.097	0,00%
6121 Strategic stocks	-	-	-
6122 Other inventories	818.376.349.097	818.376.349.097	0,00%
614 Nonproduced Assets	17.915.644.799.620	17.909.544.451.900	0,03%
6141 Land	17.915.644.799.620	17.909.544.451.900	0,03%
6142 Mineral and energy resources	-	-	-
6143 Other naturally occurring assets	-	-	-
6144 Intangible nonproduced assets	-	-	-
62 Financial Assets	10.025.367.160.617	6.913.816.880.390	45,00%
6202 Currency and deposits	4.272.135.826.740	1.207.861.243.078	253,69%
6203 Debt securities	61.871.413	61.871.413	0,00%
6204 Loans	-	-	-
6205 Equity and investment fund	4.311.244.720.074	4.264.244.720.074	1,10%
6208 Other accounts receivable	1.441.924.742.390	1.441.649.045.824	0,02%
621 Domestic	10.025.367.160.617	6.913.816.880.390	45,00%
6212 Currency and deposits	4.272.135.826.740	1.207.861.243.078	253,69%
6213 Debt securities	61.871.413	61.871.413	0,00%
6214 Loans	-	-	-
6215 Equity and investment fund	4.311.244.720.074	4.264.244.720.074	1,10%
6218 Other accounts receivable	1.441.924.742.390	1.441.649.045.824	0,02%
622 External Creditors	-	-	-
6222 Currency and deposits	-	-	-
6225 Equity and investment fund	-	-	-
63 Liabilities	1.602.978.396.374	1.659.394.925.303	-3,40%
6303 Debt securities	-	-	-
6304 Loans	258.082.086.111	314.498.615.039	-17,94%
6308 Other accounts payable	1.344.896.310.263	1.344.896.310.264	0,00%
631 Domestic	1.602.978.396.374	1.659.394.925.303	-3,40%
6313 Debt securities	-	-	-
6314 Loans	258.082.086.111	314.498.615.039	-17,94%
6318 Other accounts payable	1.344.896.310.263	1.344.896.310.264	0,00%
632 External Creditors	-	-	-
6323 Debt securities	-	-	-
6324 Loans	-	-	-
Memorandum items:	-	-	-
6M2 Net Financial Worth (62-63)	8.422.388.764.243	5.254.421.955.087	60,29%



new DJPB
in Kalimantan

METADATA

GFS Strategis Tahun 2025 *Preliminary*
KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT



HANDAL
Honesty Accuracy Digital Humane Local



METADATA

INFORMASI DASAR

1. Nama Data : Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah Tahun 2025 *Preliminary*
2. Penyelenggara Statistik : Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
3. Alamat : Jl. KS. Tubun No. 36 Pontianak
4. Nomor Telepon : (0561) 733466, 733444
5. Nomor Faksimili : (0561) 732029
6. Email : aklap016@gmail.com

DEFINISI DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah merupakan laporan statistik keuangan yang secara komprehensif menyajikan data aktivitas ekonomi dan keuangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat selama suatu periode berdasarkan klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah yang sejalan dengan standar internasional yang digunakan dalam menyusun laporan ekonomi dan statistik seperti Sistem Neraca Nasional (*System of National Accounts – SNA*), Manual Neraca Pembayaran (*The Balance of Payments Manual*), Manual Statistik Moneter dan Keuangan (*The Monetary and Financial Statistics Manual*).

LSKPU-TW merupakan konsolidasi dari kertas kerja LSKPP-TW dan Kertas Kerja LSKPDK-TW. Entitas pelaporan yang dicakup dalam Laporan ini adalah entitas Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dan seluruh Pemerintah Daerah.

LSKPU-TW disusun terdiri dari:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintahan Umum
2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintahan Umum
3. Metadata.

CAKUPAN DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Wilayah meliputi:

1. Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum yang merupakan hasil konsolidasi Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.



2. Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum yang merupakan hasil konsolidasi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah dengan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah setelah disesuaikan dengan transaksi resiprokal dan skala resiprokal pada kolom konsolidasi.

PERIODE PUBLIKASI

Triwulanan, Semesteran, Tahunan

WAKTU PUBLIKASI

Data triwulan dan semester diterbitkan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya periode data.

Data tahunan *Preliminary* diterbitkan tanggal 28 Februari tahun berikutnya.

Data tahunan *unaudited* diterbitkan tanggal 20 April tahun berikutnya.

Data tahunan final (*audited*) diterbitkan tanggal 31 Agustus tahun berikutnya.

STATUS DATA

1. Status Angka Sangat Sementara dengan tanda dua bintang (**) diberikan apabila:
 - a. LKPK-TW dan LSKP-TW Triwulanan dan Semesteran pada tahun berjalan yang disusun menggunakan angka estimasi.
 - b. LKPK-TW dan LSKP-TW Tahunan *Preliminary*.
2. Status Angka Sementara dengan tanda satu bintang (*) diberikan apabila:
 - a. LKPK-TW dan LSKP-TW Triwulanan dan Semesteran pada tahun berjalan yang telah dilakukan updating
 - b. LKPK-TW dan LSKP-TW Tahunan dengan data *Unaudited*
 - c. LKPK-TW dan LSKP-TW Tahunan yang belum seluruhnya disusun dengan data *Audited*
3. LKPK-TW dan LSKP-TW Tahunan berstatus angka tetap (tanpa tanda bintang) apabila telah seluruhnya disusun menggunakan data laporan keuangan yang telah diaudit.

SUMBER DATA

1. Kertas kerja LKPP-TW dan kertas kerja LKPKD-TW diunduh dari Aplikasi SIKRI-MP. Sementara itu, LO LKPKD dan Neraca LKPKD disusun dengan melakukan estimasi dari data LRA tahun berjalan dan Neraca TAYL menggunakan Kertas Kerja Estimasi Neraca dan LO.
2. Penyusunan LO LSKPP-TW, LO LSKPKD-TW, dan LO LSKP-TW menggunakan kertas kerja yang diunduh dari Aplikasi SIKRI MP, yaitu *Table 1 Revenue*, *Table 2 Expense*, dan *Table 3 Transactions in Assets and Liabilities* (dengan penyesuaian berupa penghapusan akun 3212 *Currency and Deposit*).



3. Penyusunan Neraca LSKPP-TW, Neraca LSKPDK-TW, dan Neraca LSKP-TW menggunakan kertas kerja yang diunduh dari Aplikasi SIKRI MP, yaitu *Table 6 Balance Sheet*.

METODOLOGI

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah disusun dengan mengkonsolidasikan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Pusat Tingkat Wilayah (LSKPP-TW) dengan kertas kerja Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LSKPDK-TW). LSKPDK-TW disusun dengan melakukan *mapping* BAS detail kertas kerja LKPKD-TW. Sedangkan kertas kerja LKPP-TW dihasilkan melalui Aplikasi SIKRI Modul MP. Data LKPKD-TW dimasukkan kedalam Aplikasi SIKRI Modul MP dan kemudian akan menghasilkan LKPK-TW dan LSKP-TW.

INTEGRITAS DATA

1. Data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berasal dari data *Preliminary* Tahun 2025 yang telah terekonsiliasi dari 522 (lima ratus dua puluh dua) UAKPA dari 41 (empat puluh satu) Kementerian Negara/Lembaga yang berada pada lingkup kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk Data LRA Laporan Keuangan Pemerintah Daerah *Preliminary* Tahun 2025, proses konsolidasi dilakukan terhadap 1 LKPD provinsi, 12 LKPD kabupaten, dan 2 LKPD kota. Seluruhnya merupakan data LKPD *Preliminary* Tahun 2025 yang diperoleh dari Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang tersedia pada halaman linktr.ee/gfskanwil. Sedangkan data Neraca dan LO Pemda menggunakan data estimasi dengan sumber data Neraca Tahun 2024 *Audited* dan LRA periode berjalan yang selanjutnya dilakukan *mapping* menggunakan Kertas Kerja Estimasi Neraca dan LO.
3. Pemutakhiran data dilakukan pada publikasi berikutnya setelah kekeliruan data ditemukan.

AKSES DATA

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah dapat diperoleh pada Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat, Jl. K.S. Tubun No. 36 Pontianak. Sedangkan Laporan Statistik Keuangan Pemerintahan Umum Tingkat Nasional dapat diperoleh pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2, Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat.

new DJPB
in Town



LAMPIRAN ANALISIS RASIO & ANALISIS INDIKATOR FISKAL

GFS Strategis Tahun 2025 *Preliminary*

KANWIL DJPB PROVINSI KALIMANTAN BARAT





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

JALAN KS TUBUN NO. 36, PONTIANAK 78121; TELEPON (0561) 733444, 733445; FAKSIMILE (0561) 732029;
SUREL KANWIL16.DJPBKALBAR@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KANWIL/KALBAR

**ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAN
ANALISIS INDIKATOR FISKAL PADA STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
KANTOR WILAYAH DJPb PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PRELIMINARY TAHUN 2025**

A. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

1. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	<p>Rasio Solvabilitas Jangka Pendek mengukur kemampuan Pemerintah dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari atau sama dengan satu tahun. Analisis terhadap rasio solvabilitas jangka pendek pada LKPK dan LKPKD Tingkat Wilayah Kalimantan Barat <i>Preliminary</i> Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.</p> <p>a. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada LKPK Tingkat Wilayah Kalimantan Barat <i>Preliminary</i> Tahun 2025 sebesar 484,47% yang berasal dari Aset Lancar sebesar Rp13.998.149.533.253,- dibagi Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp2.889.375.884.343,-.</p> <p>Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa secara konsolidasian, Provinsi Kalimantan Barat memiliki kemampuan keuangan yang sangat baik dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendeknya. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah Aset Lancar yang 4 kali lebih besar dari jumlah Kewajiban Jangka Pendeknya.</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>b. Rasio Solvabilitas Jangka Pendek pada LKPKD Tingkat Wilayah Kalimantan Barat <i>Preliminary</i> Tahun 2025 sebesar 444,65% yang berasal dari Aset Lancar sebesar Rp5.710.507.212.512,- dibagi dengan Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp1.284.283.446.159,-.</p> <p>Jumlah Aset Lancar yang 4 kali lebih besar dari Kewajiban Jangka Pendek tersebut menunjukkan Pemerintah Kalimantan Barat secara konsolidasian pada tingkat Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi Kewajiban Jangka Pendeknya.</p> <p>Jika dilihat lebih rinci, Solvabilitas Jangka Pendek tertinggi terdapat pada Pemerintah Kabupaten Landak dengan rasio sebesar 2.651,6%. Sementara itu, Solvabilitas Jangka Pendek terendah terdapat pada Pemerintah Kabupaten Ketapang dengan rasio sebesar 65,09%.</p>
2.	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang	<p>Rasio Solvabilitas Jangka Panjang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah dalam memenuhi Kewajiban Jangka Panjang, yaitu kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari satu tahun. Hasil analisis terhadap Rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada LKPK dan LKPKD Tingkat Wilayah Kalimantan Barat <i>Preliminary</i> Tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut.</p> <p>a. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada LKPK Tingkat Wilayah Kalimantan Barat <i>Preliminary</i> Tahun 2025 sebesar 4.909,76% yang berasal dari Total Aset sebesar Rp174.782.035.667.300,- dibagi Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp3.559.887.477.148,-.</p> <p>Berdasarkan perhitungan tersebut, diketahui bahwa secara konsolidasian, Provinsi Kalimantan Barat memiliki kemampuan keuangan yang sangat</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>baik dalam memenuhi Kewajiban Jangka Panjangnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan jumlah Total Aset yang 49 kali lebih besar dari jumlah Kewajiban Jangka Panjangnya.</p> <p>b. Rasio Solvabilitas Jangka Panjang pada LKPKD Tingkat Wilayah Kalimantan Barat <i>Preliminary</i> Tahun 2025 sebesar 29.035,62% yang berasal dari Total Aset sebesar Rp66.976.413.232.614,- dibagi dengan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp230.749.274.398,-.</p> <p>Jumlah Total Aset yang 290 kali lebih besar dari Kewajiban Jangka Panjang tersebut menunjukkan Pemerintah Kalimantan Barat secara konsolidasian pada tingkat Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memenuhi Kewajiban Jangka Panjangnya.</p> <p>Jika dilihat lebih rinci, Solvabilitas Jangka Panjang tertinggi terdapat pada Pemerintah Kota Singkawang dengan rasio sebesar 2.740,24%. Sementara itu, Solvabilitas Jangka Panjang terendah terdapat pada Pemerintah Kabupaten Bengkayang dengan rasio sebesar 1.757,15% (Berdasarkan pemda yang memiliki Kewajiban Jangka Panjang).</p>

2. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menggambarkan tingkat kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber penerimaan yang diperlukan daerah.



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS														
		<p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah dengan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Rasio Kemandirian = (Pendapatan Asli Daerah/Total Pendapatan termasuk Bantuan Pemerintah Pusat dan Provinsi) x 100%</i></p> <p>Semakin tinggi rasio kemandirian berarti tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah. Rasio kemandirian menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pembentuk PAD.</p> <p>Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah sebagai berikut.</p> <table border="1" data-bbox="703 1070 1410 1326"> <thead> <tr> <th>Persentase PAD</th> <th>Kemandirian Keuangan Daerah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>>50,00</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>40,01 – 50,00</td> <td>Baik</td> </tr> <tr> <td>30,01 – 40,00</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>20,01 – 30,00</td> <td>Sedang</td> </tr> <tr> <td>10,01 – 20,00</td> <td>Kurang</td> </tr> <tr> <td>0,00 – 10,00</td> <td>Sangat Kurang</td> </tr> </tbody> </table> <p>Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada lingkup Provinsi Kalimantan Barat bervariasi antara 6,68% sampai 50,10%. Rasio Kemandirian tertinggi terdapat pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 50,10%. Sementara itu, kabupaten/kota dengan Rasio Kemandirian tertinggi terdapat pada Pemerintah Kota Pontianak sebesar 38,41% dan terendah terdapat pada Pemerintah Kabupaten Melawi sebesar 6,68%.</p> <p>Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan terhadap Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tingkat wilayah Kalimantan Barat <i>Preliminary</i> Tahun 2025</p>	Persentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah	>50,00	Sangat Baik	40,01 – 50,00	Baik	30,01 – 40,00	Cukup	20,01 – 30,00	Sedang	10,01 – 20,00	Kurang	0,00 – 10,00	Sangat Kurang
Persentase PAD	Kemandirian Keuangan Daerah															
>50,00	Sangat Baik															
40,01 – 50,00	Baik															
30,01 – 40,00	Cukup															
20,01 – 30,00	Sedang															
10,01 – 20,00	Kurang															
0,00 – 10,00	Sangat Kurang															



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS												
		<p>menunjukkan kondisi kemandirian keuangan daerah sebagai berikut.</p> <table border="1" data-bbox="703 360 1410 891"> <thead> <tr> <th data-bbox="703 360 986 427">Kemandirian Keuangan Daerah</th> <th data-bbox="986 360 1410 427">Pemda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="703 427 986 461">Sangat Baik</td> <td data-bbox="986 427 1410 461">1. Provinsi Kalbar</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 461 986 495">Cukup</td> <td data-bbox="986 461 1410 495">1. Kota Pontianak</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 495 986 528">Sedang</td> <td data-bbox="986 495 1410 528">1. Kota Singkawang</td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 528 986 707">Kurang</td> <td data-bbox="986 528 1410 707"> 1. Kabupaten Mempawah 2. Kabupaten Ketapang 3. Kabupaten Kubu Raya 4. Kabupaten Sanggau 5. Kabupaten Sintang 6. Kabupaten Sambas </td> </tr> <tr> <td data-bbox="703 707 986 891">Sangat Kurang</td> <td data-bbox="986 707 1410 891"> 1. Kabupaten Bengkayang 2. Kabupaten Sekadau 3. Kabupaten Kayong Utara 4. Kabupaten Landak 5. Kabupaten Kapuas Hulu 6. Kabupaten Melawi </td> </tr> </tbody> </table> <p>Data di atas menunjukkan bahwa 40% Pemda tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Barat termasuk dalam kategori kemandirian keuangan daerah yang “Sangat Kurang”, 40% dalam kategori kemandirian “Kurang”, dan 20% lainnya dalam kategori “Sedang”, “Cukup” hingga “Sangat Baik”. Hal tersebut berarti sebagian besar daerah di Provinsi Kalimantan Barat masih memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pihak eksternal, seperti Transfer dari Pemerintah Pusat, untuk membiayai kegiatan operasional pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>Selain itu, secara rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah lingkup Provinsi Kalimantan Barat sebesar 16,74% atau termasuk kategori “Kurang” menunjukkan bahwa 83,26% dari total pendapatan daerah secara rata-rata masih berasal dari kontribusi pihak eksternal. Hal tersebut juga menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang masih sangat rendah dalam pembayaran pajak dan retribusi yang merupakan komponen pembentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).</p>	Kemandirian Keuangan Daerah	Pemda	Sangat Baik	1. Provinsi Kalbar	Cukup	1. Kota Pontianak	Sedang	1. Kota Singkawang	Kurang	1. Kabupaten Mempawah 2. Kabupaten Ketapang 3. Kabupaten Kubu Raya 4. Kabupaten Sanggau 5. Kabupaten Sintang 6. Kabupaten Sambas	Sangat Kurang	1. Kabupaten Bengkayang 2. Kabupaten Sekadau 3. Kabupaten Kayong Utara 4. Kabupaten Landak 5. Kabupaten Kapuas Hulu 6. Kabupaten Melawi
Kemandirian Keuangan Daerah	Pemda													
Sangat Baik	1. Provinsi Kalbar													
Cukup	1. Kota Pontianak													
Sedang	1. Kota Singkawang													
Kurang	1. Kabupaten Mempawah 2. Kabupaten Ketapang 3. Kabupaten Kubu Raya 4. Kabupaten Sanggau 5. Kabupaten Sintang 6. Kabupaten Sambas													
Sangat Kurang	1. Kabupaten Bengkayang 2. Kabupaten Sekadau 3. Kabupaten Kayong Utara 4. Kabupaten Landak 5. Kabupaten Kapuas Hulu 6. Kabupaten Melawi													



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
2.	Rasio Solvabilitas Anggaran	<p>Rasio Solvabilitas Anggaran menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan untuk menutupi belanja pemerintah selama periode anggaran. Semakin tinggi rasio solvabilitas suatu daerah maka semakin baik pula kemampuan pemerintah untuk menghasilkan pendapatan. Rasio solvabilitas anggaran diukur dengan formula berikut:</p> $\text{Rasio} = (\text{Total Pendapatan LRA} - \text{DAK LRA}) / (\text{Total Belanja} - \text{Belanja Modal})$ <p>Secara rata-rata, rasio solvabilitas anggaran pada wilayah Provinsi Kalimantan Barat <i>Preliminary</i> Tahun 2025 sebesar 109,34%. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata Pemda lingkup Kalimantan Barat dapat dikatakan mampu menghasilkan pendapatan untuk menutupi belanja pemerintah selama periode anggaran.</p> <p>Apabila dirinci, Pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki rasio solvabilitas anggaran paling tinggi terdapat pada Pemkot Pontianak dengan rasio sebesar 134,83% dan terendah pada Pemkab Sanggau dengan rasio sebesar 77,97%. Rasio solvabilitas anggaran di atas 100% menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan yang dapat membiayai seluruh belanjanya. Sebaliknya, pemerintah daerah dengan rasio solvabilitas anggaran kurang dari 100% dapat dikatakan pemerintah daerah tersebut belum dapat membiayai aktivitas belanjanya melalui pendapatan, sehingga pemerintah perlu mencari sumber pendapatan lain, seperti melalui aktivitas pembiayaan.</p>
3.	Rasio Solvabilitas Layanan	<p>Rasio solvabilitas layanan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat. Rasio</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>solvabilitas layanan diukur dengan formula sebagai berikut:</p> <p>Rasio = Total Aset / Jumlah Penduduk</p> <p>Semakin tinggi rasio solvabilitas layanan menunjukkan semakin baik pula kemampuan pemerintah dalam menyediakan pelayanan kepada publik.</p> <p>Rata-rata rasio solvabilitas layanan pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat <i>Preliminary</i> Tahun 2025 sebesar Rp8.455.610,- untuk menyelenggarakan pelayanan publik per individu. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata, pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat memiliki total aset yang lebih dari cukup untuk menyediakan dan mempertahankan kualitas pelayanan publik yang dibutuhkan dan diinginkan masyarakat.</p> <p>Selanjutnya, apabila dilihat secara rinci, Pemkot Pontianak memiliki rasio solvabilitas layanan tertinggi, yaitu sebesar Rp15.220.045,- untuk menyelenggarakan pelayanan publik per individu. Sementara itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memiliki rasio solvabilitas layanan terendah yaitu sebesar Rp2.981.408,- untuk menyelenggarakan pelayanan publik per individu. Namun, apabila dilihat di antara kabupaten/kota, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya menjadi daerah dengan rasio solvabilitas layanan terendah yaitu sebesar Rp3.848.478,-.</p>
4.	Rasio Solvabilitas Operasional	<p>Rasio solvabilitas operasional menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menghasilkan pendapatan untuk menutupi beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Rasio solvabilitas operasional dihitung dengan formula:</p> <p>Rasio = (Total Pendapatan LO – DAK LO) / Beban Operasi LO</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>Semakin tinggi rasio solvabilitas operasional suatu daerah, semakin baik pula kemampuan pemerintah dalam menghasilkan pendapatan.</p> <p>Pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat pada <i>Preliminary</i> Tahun 2025 secara rata-rata memiliki rasio solvabilitas operasional sebesar 91,78%. Rasio tertinggi terdapat pada Pemprov Kalimantan Barat dengan rasio sebesar 121,88% dan terendah pada Pemkab Sanggau dengan rasio sebesar 63,59%. Rasio solvabilitas operasional di atas 100% menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah dapat menutupi seluruh beban operasional pemerintah selama periode anggaran. Sedangkan rasio solvabilitas operasional kurang dari 100% menunjukkan pendapatan operasional pemerintah belum mampu menutupi seluruh beban operasional selama periode anggaran. Dengan demikian, secara rata-rata, rasio solvabilitas pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat sebesar 91,78% menunjukkan bahwa pendapatan operasional pemerintah hampir dapat memenuhi seluruh beban operasional pada satu periode anggaran namun belum optimal.</p>
5.	Rasio Fleksibilitas Keuangan	<p>Rasio fleksibilitas keuangan menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang. Rasio fleksibilitas keuangan diukur menggunakan formula sebagai berikut:</p> $\text{Rasio} = \frac{(\text{Total Pendapatan LO} - \text{DAK LO} - \text{Pembayaran Pokok Utang} - \text{Beban Operasional LO})}{(\text{Beban Operasional LO} + \text{Pembayaran Pokok Utang})}$ <p>Semakin tinggi rasio fleksibilitas keuangan maka semakin baik pula fleksibilitas pemerintah dalam</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>menghadapi kondisi peningkatan pendapatan atau utang.</p> <p>Rata-rata rasio fleksibilitas keuangan pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat sebesar -8,22% pada periode <i>Preliminary</i> Tahun 2025. Hal tersebut menunjukkan secara rata-rata pemda lingkup Provinsi Kalimantan Barat memiliki fleksibilitas keuangan yang sangat kurang baik. Pemerintah dapat dikatakan sangat kurang mampu meningkatkan sumber daya keuangan untuk menghadapi peningkatan komitmen, baik melalui peningkatan pendapatan atau peningkatan kapasitas utang.</p> <p>Rasio fleksibilitas keuangan tertinggi terdapat pada Pemprov Kalbar sebesar 21,88% dan terendah pada Pemkab Sanggau sebesar -36,41%. Rasio fleksibilitas keuangan bernilai negatif pada pemerintah daerah di Provinsi Kalimantan Barat disebabkan oleh jumlah Pendapatan-LO setelah dikurangi DAK-LO, Pembayaran Pokok Utang, dan Beban Operasional-LO belum dapat menutupi pembayaran Beban Operasional-LO dan Pembayaran Pokok Utang pada periode bersangkutan. Dengan kata lain, jumlah kas yang dimiliki pemerintah tidak mencukupi untuk pengeluaran yang sifatnya tidak terduga. Pemerintah memiliki sedikit fleksibilitas atau ruang untuk pengeluaran di luar beban operasional. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian pemerintah daerah bersangkutan dalam hal pengelolaan utang dan finansial untuk memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang serta menjalankan aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang. Pemerintah perlu menentukan belanja prioritas atau meningkatkan pendapatannya untuk memperbesar fleksibilitas keuangannya.</p>



B. Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

1. Analisis Keseimbangan Fiskal

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Keseimbangan Operasi Neto (<i>Net Operating Balance / NOB</i>)	<p>NOB merupakan perubahan pada saldo <i>Net Worth</i> (kekayaan bersih pemerintah) yang diakibatkan oleh transaksi selama tahun berjalan. Saldo NOB diperoleh dari saldo Pendapatan GFS dikurang Beban GFS.</p> <p>Selama periode <i>Preliminary</i> Tahun 2025, nilai NOB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sebesar negatif Rp9.740.352.249.685,- yang berasal dari NOB Pemerintah Pusat sebesar negatif Rp14.693.522.373.298,-, NOB Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp1.606.659.886.469,-, dan NOB Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.346.510.237.144,-.</p> <p>Beban GFS Pemerintah Umum yang lebih besar dari Pendapatan GFS Pemerintah Umum menunjukkan bahwa pemerintah umum di wilayah Kalimantan Barat berada dalam kondisi defisit. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kekayaan bersih pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami pertumbuhan negatif. NOB bernilai negatif terjadi pada tingkat Pemerintah Pusat.</p> <p>Sementara itu, pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, NOB bernilai positif yang menunjukkan Pendapatan GFS lebih besar dari Beban GFS, sehingga pemerintah memiliki surplus yang menandakan kondisi finansial yang relatif baik.</p>
2.	Keseimbangan Operasi Bruto (<i>Gross Operating Balance / GOB</i>)	<p>GOB merupakan perubahan pada saldo <i>Net Worth</i> (kekayaan bersih pemerintah) yang diakibatkan oleh transaksi selama tahun berjalan tanpa memperhitungkan konsumsi aset tetap (<i>consumption</i></p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p><i>of fixed capital/CFC</i>). GOB diperoleh melalui formula sebagai berikut:</p> <p><i>Keseimbangan Operasi Bruto (Gross Operating Balance/GOB) = Pendapatan GFS – (Beban GFS – Konsumsi Aset Tetap)</i></p> <p>GOB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar negatif Rp9.740.352.249.685,- yang berasal dari GOB Pemerintah Pusat sebesar negatif Rp14.693.522.373.298,-, GOB Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp1.606.659.886.469,-, dan GOB Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.346.510.237.144,-.</p> <p>GOB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sebesar negatif Rp9.740.352.249.685,- mencerminkan kondisi operasional sektor pemerintah yang belum mampu menanggung seluruh beban dari pendapatan yang diperolehnya, karena jumlah Pendapatan GFS lebih kecil dari Beban GFS, tanpa memperhitungkan beban konsumsi aset tetap periode bersangkutan. GOB yang bernilai negatif tersebut menunjukkan bahwa terdapat ketidakseimbangan antara pendapatan dan beban, sehingga pemerintah perlu mengevaluasi besarnya beban yang ditanggung serta potensi peningkatan pendapatan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Hal ini juga terjadi pada tingkat Pemerintah Pusat.</p> <p>Sementara itu, GOB pada tingkat Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota bernilai positif yang mencerminkan kondisi operasional sektor pemerintah mampu menanggung seluruh beban dari pendapatan yang diperolehnya, karena jumlah Pendapatan GFS yang lebih besar dari Beban GFS tanpa memperhitungkan Beban Konsumsi Aset Tetap. Dengan kata lain, GOB Pemerintah Provinsi dan</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		Pemerintah Kabupaten/Kota mengindikasikan kesehatan fiskal yang relatif lebih baik.
3.	Peminjaman / Pinjaman Neto (<i>Net Lending/Borrowing/NLB</i>)	<p>NLB menggambarkan seberapa besar sumber daya finansial yang mampu disalurkan ataupun diperoleh dari sektor ekonomi lain. Peminjaman/pinjaman neto sama dengan total kebutuhan pembiayaan. NLB diperoleh melalui formula berikut:</p> $\text{Peminjaman/Pinjaman Neto (Net Lending/Borrowing/NLB)} = \text{Pendapatan GFS} - (\text{Beban GFS} + \text{Investasi neto aset nonkeuangan})$ <p>Berdasarkan perhitungan, NLB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar negatif Rp14.217.272.343.668,- yang berasal dari NLB Pemerintah Pusat sebesar negatif Rp17.012.308.775.908,-, NLB Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.213.135.951.970, dan NLB Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.581.900.480.270,-.</p> <p>Nilai NLB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif menunjukkan posisi <i>net borrowing</i> atau adanya kekurangan sumber daya keuangan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah memerlukan sumber pembiayaan tambahan, seperti melalui utang atau pinjaman. Penambahan utang atau pinjaman tersebut perlu dicermati secara hati-hati oleh pemerintah berkaitan dengan kemampuan daerah dalam pembayaran pokok utang beserta bunganya. Defisit yang terjadi juga harus diwaspadai karena dapat mengurangi fleksibilitas fiskal pemerintah dalam menangani kebutuhan yang sifatnya mendesak.</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
4.	Keseimbangan Operasi Primer (<i>Primary Operating Balance</i>)	<p>Keseimbangan Operasi Primer (<i>Primary Operating Balance</i>) menunjukkan selisih <i>revenue</i> dan <i>expense</i> yang telah dikurangi dengan <i>interest expense</i>. Keseimbangan Operasi Primer diperoleh dengan formula sebagai berikut.</p> <p><i>Keseimbangan Operasi Primer (Primary Operating Balance) = NOB + Beban Bunga</i></p> <p>Keseimbangan Operasi Primer Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar negatif Rp9.729.536.540.882,-, berasal dari Pemerintah Pusat sebesar negatif Rp14.693.522.373.298,-, Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.606.659.886.469,-, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.357.325.945.947,-.</p> <p>NOB Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pemerintah belum dapat memenuhi seluruh pengeluaran operasionalnya, termasuk pembayaran kewajiban bunga utang, melalui pendapatan operasionalnya. NOB yang bernilai negatif tersebut terjadi pada tingkat Pemerintah Pusat, yang dengan kata lain, pemerintah memerlukan sumber pembiayaan lain untuk menutup defisit yang terjadi.</p> <p>Sementara itu, pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, NOB bernilai positif yang menunjukkan bahwa pemerintah memiliki kemampuan untuk memenuhi pengeluaran operasionalnya, termasuk kewajiban bunga utang, melalui pendapatan operasionalnya, serta masih memiliki surplus. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tingkat provinsi dan kabupaten/kota dapat memenuhi</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>belanjanya dari pendapatan tanpa harus bergantung pada pembiayaan atau utang.</p>
5.	<p>Keseimbangan Primer (<i>Primary Balance</i>)</p>	<p><i>Primary Balance</i> atau keseimbangan primer merupakan selisih <i>revenue</i> dan <i>expenditure</i> yang telah dikurangi dengan <i>interest expense</i>. <i>Primary balance</i> menggambarkan kemampuan pemerintah untuk memenuhi kewajiban <i>interest expense</i> tanpa perlu melakukan penambahan kewajiban baru. <i>Primary balance</i> dapat diperoleh menggunakan formula sebagai berikut.</p> <p><i>Keseimbangan Primer (Primary Balance) = NLB + Beban Bunga</i></p> <p>Keseimbangan primer Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar negatif Rp14.206.456.634.865,- yang berasal dari keseimbangan primer Pemerintah Pusat sebesar negatif Rp17.012.308.775.908,-, Pemerintah Provinsi sebesar Rp1.213.135.951.970,-, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.592.716.189.073,-.</p> <p>Keseimbangan primer Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pendapatan pemerintah setelah dikurangi belanja (tidak termasuk pembayaran bunga utang) tidak cukup untuk menutup beban bunga utang yang harus dibayarkan. Dengan kata lain, pemerintah masih harus menambah utang baru atau mencari sumber pembiayaan lain untuk membayar bunga utang yang ada. Hal tersebut berpotensi meningkatkan total utang pemerintah apabila tidak diimbangi dengan peningkatan penerimaan.</p>



2. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Pajak Langsung (<i>Direct Taxes</i>)	<p>Pajak langsung (<i>Direct Taxes</i>) merupakan penerimaan pajak yang perhitungannya mempertimbangkan situasi/keadaan/kemampuan masing-masing wajib pajaknya, misalnya pajak penghasilan perorangan dan badan usaha. Pajak langsung pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat diperoleh dengan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Pajak Langsung (Direct Taxes) = Taxes on Income, profits, and capital gain + recurrent taxes on immovable property + recurrent taxes on net wealth + other recurrent taxes on property</i></p> <p>Pajak Langsung Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp4.195.774.992.604,- yang berasal dari Pajak Langsung Pemerintah Pusat sebesar Rp3.843.261.103.198,- dan Pajak Langsung pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp352.513.889.406,-. Kontribusi Pajak Langsung yang sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat dapat disebabkan oleh basis pajak yang dimiliki pemerintah pusat lebih luas daripada pajak daerah. Di sisi lain, kontribusi pajak daerah yang relatif lebih kecil dapat mengindikasikan potensi pajak dari pemerintah daerah yang masih belum optimal. Hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk mengeksplorasi sektor-sektor yang memiliki potensi untuk menyumbang pendapatan pajak di daerahnya, yang pada gilirannya dapat meningkatkan PAD serta kemandirian daerah.</p>
2.	Pajak Tidak Langsung (<i>Indirect Taxes</i>)	<p>Pajak tidak langsung (<i>Indirect Taxes</i>) merupakan pajak yang perhitungannya tidak mempertimbangkan</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>situasi/keadaan/kemampuan individual masing-masing wajib pajak, misalnya pajak atas barang dan jasa. Pajak tidak langsung diperoleh dari formula:</p> <p><i>Pajak tidak langsung (indirect taxes) = taxes on payroll and workforce + taxes on goods and services + taxes on international trade and transactions + other taxes</i></p> <p>Pajak tidak langsung Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp11.126.033.265.765,- berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp7.786.618.752.184,-, Pemerintah Provinsi sebesar Rp2.265.831.798.078,-, dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp1.073.582.715.503,-.</p> <p>Apabila dibandingkan dengan Pajak Langsung, Pajak Tidak Langsung memiliki proporsi yang lebih besar dari total pendapatan pajak tingkat wilayah Kalimantan Barat, yaitu 72,62% dari total penerimaan pajak. Pajak tidak langsung tersebut sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat yang menyumbang 69,99% dari total pajak langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat memiliki kontribusi yang lebih dominan terhadap pajak tidak langsung yang dapat disebabkan oleh kontribusi PPN dan bea masuk yang berada dalam kendali pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berkontribusi sebesar 30,01% terhadap pajak tidak langsung yang dapat menjadi pertimbangan pemerintah daerah untuk memperkuat potensi pajak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.</p>
3.	Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>)	Pajak Modal (<i>Capital Taxes</i>) merupakan pajak yang dibebankan secara tidak berkala dan tidak sering atas nilai aset atau kekayaan neto unit institusi atau nilai aset yang ditransfer antar unit institusi sebagai



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>warisan, hadiah, dan transfer lain. Pajak Modal diperoleh dari formula:</p> <p><i>Pajak modal (capital taxes) = estate, inheritance, and gift taxes + other nonrecurrent taxes on property</i></p> <p>Pajak Modal Pemerintah Umum tingkat wilayah Kalimantan Barat berasal dari pemerintah kabupaten/kota tingkat wilayah Kalimantan Barat. Pajak Modal dapat berasal dari <i>Taxes on Property</i> atau Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pada Preliminary Tahun 2025, Pajak Modal tercatat sebesar Rp0,- akibat terjadinya pemindahan akun <i>Other nonrecurrent taxes on property</i> menjadi akun <i>Other recurrent taxes on property</i>.</p>
4.	<p>Belanja Konsumsi Final Pemerintah (<i>Government Final Consumption Expenditure</i>)</p>	<p>Belanja konsumsi final pemerintah (<i>government final consumption expenditure</i>) berasal dari kompensasi pegawai ditambah penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap, dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat sosial dalam bentuk barang/jasa), dikurangi penjualan barang dan jasa. Belanja konsumsi final pemerintah tersebut diperoleh menggunakan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Belanja konsumsi final pemerintah (government final consumption expenditure) = compensation of employees + use of goods and services + consumption of fixed capital + miscellaneous other expenses – sales of goods and services</i></p> <p>Belanja Konsumsi Final Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp20.355.683.860.861,- berasal dari Pemerintah Pusat sebesar Rp6.343.155.040.539,-, Pemerintah Provinsi sebesar</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>Rp2.872.793.107.662,- dan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp11.139.735.712.660,-.</p> <p>Belanja Konsumsi Final Pemerintah tersebut dapat menjadi indikator strategi pemerintah dalam mengalokasikan anggaran untuk keperluan operasional dan pelayanan kepada masyarakat. Belanja Konsumsi Final Pemerintah yang bernilai positif tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berperan dalam mendorong perekonomian di tingkat wilayah Provinsi Kalimantan Barat, misalnya melalui pembelian barang dan jasa dan kompensasi pegawai, yang berperan dalam mendukung perekonomian lokal serta memenuhi kebutuhan masyarakat.</p>
5.	Tabungan Bruto (<i>Gross Saving</i>)	<p>Tabungan bruto (<i>gross saving</i>) sama dengan keseimbangan operasi bruto dikurangi piutang transfer modal neto, termasuk hibah modal neto dan pajak modal, atau peminjaman neto/pinjaman neto tanpa investasi bruto aset non keuangan dan piutang transfer modal neto. Tabungan neto diperoleh dengan formula sebagai berikut:</p> <p><i>Tabungan bruto (gross saving) = GOB – net capital transfer.</i></p> <p>Tabungan Bruto Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 negatif sebesar Rp9.233.746.574.242,- yang berasal dari pemerintah pusat sebesar negatif Rp13.739.850.780.350,-, pemerintah provinsi sebesar Rp1.767.180.878.469,- dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp3.427.619.713.484,-.</p> <p>Tabungan Bruto Pemerintah Umum yang bernilai negatif menunjukkan bahwa keseimbangan operasi bruto lebih kecil daripada <i>net capital transfer</i>, yang berarti bahwa pemerintah mengalami defisit dalam</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>operasionalnya. Tabungan bruto bernilai negatif tersebut mengindikasikan perlunya kehati-hatian pemerintah dalam mengelola defisit, seperti ketika apabila pemerintah harus mencari sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut atau dengan memperbesar penerimaan daerah dari PAD. Tabungan Bruto bernilai negatif berasal dari Tabungan Bruto Pemerintah Pusat yang juga bernilai negatif.</p> <p>Sementara itu, Tabungan Bruto pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota yang bernilai positif menunjukkan bahwa pemerintah berada dalam kondisi surplus yang memberikan ruang bagi pemerintah untuk berinvestasi.</p>

3. Analisis Indikator Pembiayaan

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Total Pembiayaan (<i>Total Financing</i>)	<p>Total pembiayaan (<i>total financing</i>) merupakan transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban.</p> <p>Total Pembiayaan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar negatif Rp14.217.272.343.668,- yang berasal dari pemerintah pusat sebesar negatif Rp17.012.308.775.908,-, pemerintah provinsi sebesar Rp1.213.135.951.970,-, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp1.581.900.480.270,-.</p> <p>Total pembiayaan pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif tersebut menunjukkan transaksi kewajiban pemerintah yang lebih besar dari transaksi aset keuangan. Jumlah total pembiayaan tersebut seluruhnya berasal dari pembiayaan dalam negeri (<i>domestic financing</i>).</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>Angka negatif pada Total Pembiayaan menunjukkan situasi di mana pengeluaran pembiayaan lebih besar daripada penerimaannya. Hal tersebut mengindikasikan pemerintah lebih banyak membayar atau mengurangi utang daripada memperoleh pendapatan atau mengambil utang baru.</p>
2.	<p>Pembiayaan Dalam Negeri (<i>Domestic Financing</i>)</p>	<p>Pembiayaan dalam negeri (<i>domestic financing</i>) merupakan transaksi aset keuangan dengan unit institusi residen dikurangi transaksi kewajiban dengan unit institusi residen (debitur/kreditur dalam negeri). Pembiayaan dalam negeri diperoleh dengan formula:</p> <p><i>Pembiayaan dalam negeri (domestic financing) = transactions in financial assets with resident institutional units – transactions in liabilities with resident institutional units</i></p> <p>Pembiayaan Dalam Negeri Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2024 sebesar negatif Rp14.217.272.343.668,- yang berasal dari pemerintah pusat sebesar negatif Rp17.012.308.775.908,-, pemerintah provinsi sebesar Rp1.213.135.951.970,-, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp1.581.900.480.270,-.</p> <p>Pembiayaan pemerintah umum tingkat wilayah Kalimantan Barat seluruhnya berasal dari pembiayaan dalam negeri (<i>domestic financing</i>) ini mencerminkan bahwa pemerintah mengandalkan pembiayaan yang berasal dari dalam negeri untuk mendukung pelaksanaan program dan kebijakannya.</p>
3.	<p>Pembiayaan Luar Negeri (<i>Foreign Financing</i>)</p>	<p>Pembiayaan luar negeri (<i>foreign financing</i>) merupakan transaksi aset keuangan dengan unit institusi non residen dikurangi kewajiban dengan unit institusi non residen (debitur/kreditur luar negeri).</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		Sampai dengan 31 Desember 2024, tidak terdapat pembiayaan yang berasal dari luar negeri (<i>foreign financing</i>) pada pemerintah tingkat wilayah Kalimantan Barat.
4.	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri (<i>Domestic Bank Financing</i>)	Pembiayaan perbankan dalam negeri (<i>domestic bank financing</i>) merupakan transaksi aset keuangan dikurangi transaksi kewajiban dengan bank sentral dan korporasi penyimpan uang residen selain bank sentral. Pembiayaan perbankan dalam negeri (<i>domestic bank financing</i>) pemerintah pada tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2024 tidak dapat diidentifikasi nilainya.
5.	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri (<i>Domestic Nonbank Financing</i>)	Pembiayaan non perbankan dalam negeri (<i>domestic nonbank financing</i>) merupakan transaksi aset finansial dengan pihak selain bank sentral dan perbankan dikurangi dengan transaksi liabilitas dengan pihak selain bank sentral dan perbankan. Pembiayaan non perbankan dalam negeri (<i>domestic nonbank financing</i>) pemerintah pada tingkat wilayah Kalimantan Barat sampai dengan 31 Desember 2024 tidak dapat diidentifikasi nilainya.

4. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
1.	Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>)	Utang bruto (<i>gross debt</i>) merupakan posisi klaim keuangan yang membutuhkan pembayaran bunga dan pokok oleh debitur kepada kreditur pada tanggal tertentu di masa depan, termasuk semua kewajiban dalam instrumen utang (total kewajiban kecuali saham dan ekuitas lainnya, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai). Dengan kata lain, utang bruto menunjukkan total nilai dari seluruh utang yang dimiliki



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>oleh pemerintah pada suatu periode, tanpa mempertimbangkan aset atau investasi yang dimiliki oleh pemerintah.</p> <p>Utang Bruto (<i>Gross Debt</i>) Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat pada 31 Desember 2024 sebesar Rp6.523.870.213.074,- berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp5.008.837.492.517,-, pemerintah provinsi sebesar Rp277.852.734.729,-, dan pemerintah kabupaten/kota sebesar Rp1.325.125.661.645,-.</p> <p>Utang Bruto tersebut sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat, yaitu sebesar 76,78%. Sementara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota masing-masing menyumbang 4,26% dan 20,31% terhadap Utang Bruto pemerintah umum. Tingginya jumlah Utang Bruto yang dimiliki pemerintah dapat berdampak pada timbulnya beban keuangan yang besar bagi pemerintah yang selanjutnya dapat berimplikasi pada penurunan fleksibilitas keuangan pemerintah. Untuk itu, pemerintah perlu memiliki strategi pengelolaan utang yang efektif serta terus berupaya untuk dapat meningkatkan PAD.</p>
2.	Utang Neto (<i>Net Debt</i>)	<p>Utang neto (<i>net debt</i>) merupakan utang bruto dikurangi posisi aset keuangan terkait instrumen utang, termasuk semua aset keuangan, kewajiban dalam instrumen utang (aset keuangan/kewajiban tanpa saham dan ekuitas lainnya, derivatif keuangan dan opsi saham pegawai). Utang neto menggambarkan posisi utang pemerintah dengan mempertimbangkan nilai aset yang dapat digunakan untuk membayar utang.</p> <p>Utang Neto (<i>Net Debt</i>) Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat pada 31 Desember 2024 sebesar negatif Rp1.460.473.445.237,- berasal dari pemerintah pusat sebesar Rp2.576.063.747.349,-,</p>



No.	JENIS ANALISIS	HASIL ANALISIS
		<p>pemerintah provinsi sebesar negatif Rp1.986.589.802.015,- dan pemerintah kabupaten/kota sebesar negatif Rp2.124.554.242.154,-.</p> <p>Utang Neto Pemerintah Umum Tingkat Wilayah Kalimantan Barat yang bernilai negatif menunjukkan bahwa pemerintah memiliki aset yang dapat digunakan untuk membayar utangnya. Sementara itu, utang neto pemerintah pusat yang bernilai positif menunjukkan bahwa pemerintah memiliki lebih banyak utang daripada aset yang bisa digunakan untuk membayar utang. Hal tersebut dapat mengindikasikan adanya risiko keuangan.</p>



C. Lampiran

1. Perhitungan Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah

a. Analisis Rasio Keuangan pada Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

No	Kat.	Rasio	
		Rasio Solvabilitas Jangka Pendek	Rasio Solvabilitas Jangka Panjang
1.	LKPK	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} = \frac{13.998.149.533.253}{2.889.375.884.343} = 484,47\%$	$\frac{\text{Total Aset}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}} = \frac{174.782.035.667.300}{3.559.887.477.148} = 4.909,76\%$
2.	LKPKD	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Jangka Pendek}} = \frac{5.710.507.212.512}{1.284.283.446.159} = 444,65\%$	$\frac{\text{Total Aset}}{\text{Kewajiban Jangka Panjang}} = \frac{66.976.413.232.614}{230.749.274.398} = 29.025,62\%$

Rasio Solvabilitas Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada Kabupaten/Kota Lingkup Kalimantan Barat

No.	Pemerintah Daerah	Solvabilitas Jangka Pendek	Solvabilitas Jangka Panjang
1.	Provinsi Kalimantan Barat	611,15%	-
2.	Kabupaten Sambas	89,26%	-
3.	Kabupaten Sanggau	1735,24%	-
4.	Kabupaten Sintang	1884,16%	-
5.	Kabupaten Mempawah	2500,23%	-
6.	Kabupaten Kapuas Hulu	604,08%	-
7.	Kabupaten Ketapang	65,09%	-
8.	Kabupaten Bengkayang	405,96%	1757,15%
9.	Kabupaten Landak	2651,60%	-
10.	Kabupaten Melawi	131,05%	-
11.	Kabupaten Sekadau	860,35%	-
12.	Kabupaten Kayong Utara	716,75%	-
13.	Kabupaten Kubu Raya	1581,89%	-
14.	Kota Pontianak	923,31%	-
15.	Kota Singkawang	522,77%	2740,24%



b. Analisis Rasio Keuangan Pemerintah Daerah

No.	Pemerintah Daerah	Kemandirian Keuangan Daerah	Solvabilitas Anggaran	Solvabilitas Layanan	Solvabilitas Operasional	Fleksibilitas Keuangan
1.	Provinsi Kalimantan Barat	50,10%	123,28%	2.981.408	121,88%	21,88%
2.	Kabupaten Sambas	12,78%	115,22%	5.512.771	96,96%	-3,04%
3.	Kabupaten Sanggau	13,92%	77,97%	6.939.315	63,59%	-36,41%
4.	Kabupaten Sintang	13,20%	110,84%	11.905.918	106,05%	6,05%
5.	Kabupaten Mempawah	16,21%	105,73%	5.281.945	95,09%	-4,91%
6.	Kabupaten Kapuas Hulu	7,02%	112,50%	11.224.990	80,96%	-19,04%
7.	Kabupaten Ketapang	16,18%	120,23%	9.703.178	96,39%	-3,61%
8.	Kabupaten Bengkayang	9,66%	109,25%	7.846.932	89,39%	-10,61%
9.	Kabupaten Landak	7,98%	107,65%	6.701.262	86,76%	-13,24%
10.	Kabupaten Melawi	6,68%	100,34%	8.988.429	78,93%	-21,07%
11.	Kabupaten Sekadau	8,20%	101,05%	9.571.992	88,38%	-11,62%
12.	Kabupaten Kayong Utara	8,04%	120,57%	11.036.218	102,15%	2,15%
13.	Kabupaten Kubu Raya	14,36%	83,70%	3.848.478	78,75%	-21,25%
14.	Kota Pontianak	38,41%	134,83%	15.220.045	98,99%	-1,01%
15.	Kota Singkawang	28,31%	117,00%	10.071.264	92,47%	-7,53%



2. Perhitungan Analisis Indikator Fiskal pada Statistik Keuangan Pemerintah

a. Analisis Keseimbangan Fiskal

No	Pemerintah Daerah	Keseimbangan Operasi Neto	Keseimbangan Operasi Bruto	Pinjaman Neto	Keseimbangan Operasi Primer	Keseimbangan Primer
1.	Pemerintah Pusat	(14.693.522.373.298)	(14.693.522.373.298)	(17.012.308.775.908)	(14.693.522.373.298)	(17.012.308.775.908)
2.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1.606.659.886.469	1.606.659.886.469	1.213.135.951.970	1.606.659.886.469	1.213.135.951.970
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	3.346.510.237.144	3.346.510.237.144	1.581.900.480.270	3.357.325.945.947	1.592.716.189.073
4.	Pemerintah Umum	(9.740.352.249.685)	(9.740.352.249.685)	(14.217.272.343.668)	(9.729.536.540.882)	(14.206.456.634.865)

b. Analisis Indikator Fiskal Makroekonomi Lainnya

No	Pemerintah Daerah	Pajak Langsung	Pajak Tidak Langsung	Pajak Modal	Belanja Konsumsi Final Pemerintah	Tabungan Bruto
1.	Pemerintah Pusat	3.843.261.103.198	7.786.618.752.184	-	6.343.155.040.539	(13.739.850.780.350)
2.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	-	2.265.831.798.078	-	2.872.793.107.662	1.767.180.878.469
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	352.513.889.406	1.073.582.715.503	-	11.139.735.712.660	3.427.619.713.484
4.	Pemerintah Umum	4.195.774.992.604	11.126.033.265.765	-	20.355.683.860.861	(9.233.746.574.242)

c. Analisis Indikator Pembiayaan

No	Pemerintah Daerah	Total Pembiayaan	Pembiayaan Dalam Negeri	Pembiayaan Luar Negeri	Pembiayaan Perbankan Dalam Negeri	Pembiayaan Non Perbankan Dalam Negeri
1.	Pemerintah Pusat	(17.012.308.775.908)	(17.012.308.775.908)	0	N/A	N/A
2.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	1.213.135.951.970	1.213.135.951.970	0	N/A	N/A
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	1.581.900.480.270	1.581.900.480.270	0	N/A	N/A
4.	Pemerintah Umum	(14.217.272.343.668)	(14.217.272.343.668)	0	N/A	N/A



d. Analisis Indikator Kekayaan dan Utang

No	Pemerintah Daerah	Utang Bruto	Utang Neto
1.	Pemerintah Pusat	5.008.837.492.517	2.576.063.747.349
2.	Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	277.852.734.729	(1.986.589.802.015)
3.	Pemerintah Kabupaten/Kota	1.325.125.661.645	(2.124.554.242.154)
4.	Pemerintah Umum	6.523.870.213.074	(1.460.473.445.237)

Dibuat di Pontianak
Pada tanggal 25 Februari 2026
Kepala Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Barat



Ditandatangani secara elektronik
Rahmat Mulyono



*New DJPb
in Town*

Follow us:

 Kanwil DJPb Kalbar

 djpbkalbar

 DJPb_Kalbar



REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT WILAYAH
dan
LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT WILAYAH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025**

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
2025**



FACE

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN TINGKAT
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025
A. PENDAPATAN KONSOLIDASI	18.474.149.955.986
Pendapatan Perpajakan konsolidasi	15.331.796.183.062
Pendapatan Pajak Dalam Negeri	14.914.651.050.062
Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	417.145.133.000
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.139.357.063.900
Pendapatan Sumber Daya Alam	
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	262.970.454.331
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	2.068.588.528.824
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	12.026.049.111
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
Bantuan Keuangan - LRA	
Pendapatan Badan Layanan Umum	795.772.031.634
Pendapatan hibah	2.996.709.024
Pendapatan hibah dalam negeri	2.996.709.024
Pendapatan hibah luar negeri	
B. Belanja	32.691.422.299.654
Belanja pegawai	13.666.799.474.308
Belanja gaji dan tunjangan	12.461.683.290.053
Belanja honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan belanja pegawai transito	1.000.982.373.054
Belanja kontribusi sosial	204.133.811.201
Belanja barang dan jasa	9.620.234.622.151
Belanja barang	2.814.422.567.291
Belanja Jasa	1.942.431.478.314
Belanja Pemeliharaan	972.541.964.718
Belanja Perjalanan Dinas	747.137.833.665
Belanja Badan Layanan Umum (BLU)	553.905.542.870
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Masyarakat/Pemda	2.140.572.079.713
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS	449.223.155.580
Belanja Barang Untuk Diserahkan ke Mantan Presiden dan Mantan Wakil Presiden	
Belanja Modal	3.350.946.521.916
Belanja Modal Tanah	6.711.349.160
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	548.189.975.238
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	953.783.718.297
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.676.421.777.496
Belanja Modal Lainnya	98.714.756.664
Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)	67.124.945.061
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	10.815.708.803
Belanja Pembayaran Bunga Utang	10.815.708.803
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara	
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption	
Belanja Pembayaran Discount Surat Berharga Syariah Negara	
Belanja Denda	
Belanja Subsidi	364.617.500
Belanja Subsidi Perusahaan Negara	364.617.500
Belanja Subsidi Perusahaan Swasta	
Belanja Hibah	517.593.748.139
Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri	
Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional	
Belanja Hibah Kepada Pemerintah	17.381.946.858
Belanja Hibah Lainnya	500.211.801.281
Belanja Bantuan Sosial	32.093.879.121
Belanja Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	
Belanja Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	
Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	
Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	17.469.442.000
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	
Belanja Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	14.624.437.121
Belanja Lain-lain	30.727.055.625

Belanja Lain-lain	30.727.055.625
C. BELANJA TRANSFER	5.461.846.672.091
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	2.545.619.327.846
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	361.128.047.145
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	355.136.499.602
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.991.547.543
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.184.491.280.701
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	9.851.783.366
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.174.639.497.335
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Transfer Dana Otonomi Khusus	
Transfer Pemerintah Pusat Ke Daerah Dan Dana Desa	2.916.227.344.245
Dana Bagi Hasil	227.039.043.306
Dana Bagi Hasil Pajak	225.224.398.306
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
Dana Bagi Hasil Cukai	1.814.645.000
Dana Alokasi Umum	1.107.391.619.233
Dana Alokasi Umum	1.107.391.619.233
Dana Alokasi Khusus Fisik	77.019.957.103
Dana Alokasi Khusus Fisik	77.019.957.103
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana	3.523.178.000
Insentif Daerah	
Dana Otonomi Khusus	
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Dana Insentif Daerah	3.523.178.000
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.228.468.135.987
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	1.228.468.135.987
Hibah ke Daerah	
Hibah ke Daerah	
Dana Desa	272.785.410.616
Dana Desa	272.785.410.616
D. Surplus (Defisit) Anggaran (A-B-C)	(14.217.272.343.668)
E. Pembiayaan	635.440.410.383
Penerimaan Pembiayaan	885.456.939.311
Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	885.456.939.311
Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	
Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	
Penerimaan Cicilan Pokok Investasi Pemerintah	
Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	
Pengeluaran Pembiayaan	250.016.528.928
Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	203.016.528.928
Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	
Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	
Penyertaan Modal Negara	47.000.000.000
RDI/RPD	
Dukungan Infrastruktur	
Pengeluaran Investasi Pemerintah	
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	
Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	
Suspense Pembiayaan	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (D+C)	(13.581.831.933.285)

**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025
Aset	174.782.035.667.300
Aset lancar	13.998.149.533.253
Kas dan setara kas	4.888.847.170.725
Uang muka rekening BUN-khusus pusat	
Investasi jangka pendek	108.000.000.000
Belanja di bayar di muka dan uang muka belanja	26.313.367.728
Piutang	2.023.131.416.472
Piutang Perpajakan	1.194.939.930.890
Piutang Bukan Pajak	1.806.970.705.665
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	620.743.272
Bagian Lancar Piutang Penerusan Pinjaman	
Piutang lain-lain	24.395.647.057
Penyisihan piutang tak tertagih	(1.003.795.610.411)
Persediaan	6.951.857.578.328
Piutang PFK	
Investasi jangka panjang	4.311.306.591.487
Investasi jangka panjang non permanen	61.871.413
Investasi jangka panjang permanen	4.311.244.720.074
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
Aset tetap	151.921.861.379.047
Tanah	86.800.294.758.506
Peralatan dan mesin	25.912.066.653.053
Gedung dan bangunan	33.903.796.450.605
Jalan, irigasi, dan jaringan	78.637.151.177.212
Aset tetap lainnya	1.841.852.109.927
Konstruksi dalam pengerjaan	1.579.364.247.537
Konsesi Jasa	3.507.516.169.746
Akumulasi penyusutan	(80.260.180.187.539)
Aset Tetap Yang Belum Diregister	
Properti Investasi	5.380.003.147
Dana cadangan	
Dana cadangan	
Piutang jangka panjang	5.915.298.430
Tagihan piutang penjualan angsuran	1.595.364.867
Tagihan tuntutan perbendaharaan / tagihan tuntutan ganti rugi	4.391.966.658
Piutang jangka panjang kredit pemerintah	
Piutang jangka panjang lainnya	
Penyisihan piutang jangka panjang	(72.033.095)
Aset lainnya	4.539.422.861.936
Kemitraan dengan pihak ketiga	728.500.851.194
Aset tidak berwujud	703.976.046.460
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	203.573.682.348
Dana Penjaminan	
Dana Kelolaan BLU	
Aset lain-lain	3.618.015.098.850
Aset Lainnya Dari Unit Pemerintah Lainnya	
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(714.642.816.916)
Kewajiban / Utang	6.449.263.361.491
Kewajiban jangka pendek	2.889.375.884.343
Utang perhitungan pihak ketiga	518.107.784
Utang kepada pihak ketiga	1.101.899.842.156
Utang bunga	9.802.763.059
Utang subsidi	
Utang Transfer	656.666.814.743
Bagian lancar utang jangka panjang	27.332.811.713
Utang surat perbendaharaan negara	
Utang Yang Belum Ditagihkan	382.864.111
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	188.211.774.555
Pendapatan Diterima Dimuka	800.222.938.341
Uang Muka	19.562.000
Utang Jangka Pendek Lainnya	104.318.405.881
Kewajiban jangka panjang	3.559.887.477.148

Utang jangka panjang dalam negeri	233.076.991.398
Utang jangka panjang luar negeri	3.326.810.485.750
Kewajiban Konsesi Jasa	168.332.772.305.809
Ekuitas	

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
EKUITAS AWAL	168.590.512.919.163
Ekuitas Awal pemerintah Pusat	104.237.038.370.849
Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	64.353.474.548.314
Penyesuaian Ekuitas Awal	
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	168.590.512.919.163
SURPLUS / (DEFISIT) LO	(22.927.760.729.560)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	
Penyesuaian Nilai Aset	
Koreksi SILPA	
Koreksi Nilai Persediaan	41.063.226.816
Selisih Revaluasi Aset	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	310.004.019.395
Koreksi atas Reklasifikasi Aset	1.274.579.011
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	
Koreksi Lain-lain	1.394.759.262.268
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI EKUITAS	1.747.101.087.490
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	20.922.919.028.720
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI	
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(257.740.613.350)
EKUITAS AKHIR	168.332.772.305.813

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
KEGIATAN OPERASIONAL	(29.743.549.853.953)
Pendapatan Operasional-LO	15.720.682.587.254
Pendapatan perpajakan-LO	12.618.097.677.244
Pendapatan pajak dalam negeri-LO	12.235.850.005.244
Pendapatan pajak perdagangan internasional-LO	382.247.672.000
Pendapatan bukan pajak-LO	2.202.653.548.823
Pendapatan sumber daya alam-LO	
Pendapatan Bagian Laba BUMN/Kekayaan Negara Dipisahkan	262.970.454.331
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya - LO	1.939.683.094.492
Pendapatan Transfer - LO	66.524.062.111
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LO	66.524.062.111
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
Bantuan Keuangan - LO	
Pendapatan BLU-LO	801.495.846.606
Pendapatan Jasa BLU - LO	696.423.569.014
Pendapatan Hibah BLU - LO	15.977.028.976
Pendapatan Lainnya BLU - LO	89.095.248.616
Pendapatan hibah-LO	2.996.709.024
Pendapatan hibah dalam negeri dan luar negeri-LO	2.996.709.024
Pendapatan lainnya-LO	28.914.743.446
Pendapatan lainnya Pemda	
Pendapatan Penyesuaian Akrual	28.914.743.446
Beban Operasional	38.730.688.985.644
Beban pegawai	13.874.846.721.518
Beban gaji dan tunjangan	12.873.159.687.433
Beban honorarium/lembur/vakasi/tunj. Khusus dan Beban pegawai transitio	1.001.687.034.085
Beban kontribusi sosial	
Beban persediaan	592.029.804.530
Beban barang dan jasa	9.245.327.439.895
Beban barang	4.331.998.706.092
Beban jasa	1.928.821.509.402
Beban pemeliharaan	1.035.881.540.821
Beban perjalanan dinas	752.884.091.311
Beban BLU/BLUD	258.677.175.214
Beban barang untuk diserahkan/dijual kepada masyarakat/pemda/pihak ketiga	937.064.417.055
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Mantan Presiden Dan/Atau Mantan Wakil	
Presiden	
Beban bunga	10.815.708.803
Beban Pembayaran Bunga Utang	10.815.708.803
Beban Pembayaran Discount Surat Utang Negara	
Beban Pembayaran Loss on Bond Redemption	
Beban Denda	
Beban subsidi	364.617.500
Beban subsidi kepada perusahaan publik	364.617.500
Beban subsidi kepada perusahaan swasta	
Beban Subsidi - Estimasi	
Beban hibah	517.593.748.139
Beban hibah kepada pemerintah negara lain	
Beban hibah kepada organisasi internasional	
Beban hibah kepada pemerintah daerah	17.381.946.858
Beban Hibah Lainnya	500.211.801.281
Beban bantuan sosial	32.125.879.121
Beban Bantuan Sosial Untuk Rehabilitasi Sosial	
Beban Bantuan Sosial Untuk Jaminan Sosial	
Beban Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	32.000.000
Beban Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	17.469.442.000
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	
Beban Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	14.624.437.121
Beban lain-lain/beban tidak terduga	
Beban Lain-lain	
Beban akrual lainnya	7.724.041.610.575
Beban Penyusutan Aset Tetap	7.578.280.244.677
Beban Penyusutan Aset Lainnya/Amortisasi Aset Lainnya	45.513.612.524

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	100.247.753.374
BEBAN TRANSFER	6.733.543.455.563
Transfer Pempus Ke Daerah Dan Dana Desa	4.187.924.127.717
Dana Bagi Hasil	175.801.481.306
Dana Bagi Hasil Pajak	174.038.013.306
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
Dana Bagi Hasil Cukai	1.763.468.000
Dana Alokasi Umum	1.107.391.619.233
Dana Alokasi Umum	1.107.391.619.233
Dana Alokasi Khusus Fisik	765.716.342.948
Dana Alokasi Khusus Fisik	765.716.342.948
Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Dan Dana Insentif Daerah	3.523.178.000
Dana Otonomi Khusus	
Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
Dana Insentif Daerah	3.523.178.000
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	539.771.750.142
Dana Alokasi Khusus Non Fisik	539.771.750.142
Hibah ke Daerah	
Hibah ke Daerah	
Dana Desa	1.595.719.756.088
Dana Desa	1.595.719.756.088
Beban Transfer Lain-lain	
Beban Suspense Transfer	
BEBAN TRANSFER PEMDA	2.545.619.327.846
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	355.136.499.602
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.991.547.543
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah dan Partai Politik	9.851.783.366
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.174.639.497.335
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(23.010.006.398.390)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS SELISIH KURS BELUM TEREALISASI	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PELEPASAN ASET NON LANCAR	5.275.480.333
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
SURPLUS (DEFISIT) PEMPUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	76.970.188.497
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENJUALAN ASET NON LANCAR	
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
SURPLUS (DEFISIT) PEMDA KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL	82.245.668.830
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	(22.927.760.729.560)
POS LUAR BIASA	
PENDAPATAN LUAR BIASA	
BEBAN LUAR BIASA	
SURPLUS (DEFISIT) LO	(22.927.760.729.560)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
1. PERHITUNGAN CATATAN SAL	
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	496.639.976.305
B. Penyesuaian Awal Saldo Anggaran Lebih	
Saldo Anggaran Lebih Awal Setelah Penyesuaian	496.639.976.305
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL	496.639.976.305
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(23.440.088.861.564)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)	(22.943.448.885.259)
D. Penyesuaian SAL	
1. Penyesuaian Pembukuan	216.268.742.528
2. Penyesuaian Lain-lain	22.727.180.142.731
Total Penyesuaian SAL (A.II)	22.943.448.885.259
Rincian Penyesuaian Pembukuan:	
Koreksi SILPA	216.268.742.528
Selisih Kurs (Unrealized)	
Koreksi Kas BUN	
Koreksi Kas KPPN	
Koreksi Kas BLU	
Koreksi Kas Hibah	
Koreksi Utang PFK	
Koreksi Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN)	
Koreksi Kas di Bendahara Pengeluaran (BUN)	
Rincian Penyesuaian Catatan SAL/Lain-lain:	
Penyesuaian Transaksi RPL	
Penyesuaian Transaksi Rekening Escrow	
Penyesuaian Transaksi Kas Transitoris	
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL TAYL	
Pembulatan	22.727.180.142.731
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)	
2. PERHITUNGAN FISIK SAL	
SALDO AKHIR KAS BUN	
SALDO AKHIR KAS KPPN	
SALDO AKHIR KAS BLU	225.175.267.220
SALDO AKHIR KAS DI KL DARI HIBAH	
SALDO AKHIR KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	62.010.296
Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	
Saldo di Rek Escrow yang Memiliki Unsur SAL	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam bentuk Invoice	
Utang Kepada Pihak Ketiga (KPPN) Pengurang Fisik SAL	
Selisih Kiriman Uang	
Pendapatan Hibah dalam Rekening Khusus Ditangguhkan	
Pembiayaan diterima RKUN yang Ditangguhkan	
Uang Muka Belanja Pegawai (Prepayment)	
Penyetoran Dana Hibah Langsung Yang Disahkan	
Pengembalian Escrow PNPB	
Transito BLU	
Dana Optimalisasi Kas	
Total Penyesuaian Perhitungan Fisik SAL	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	

FACE

**LAPORAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH UMUM TINGKAT
WILAYAH**

**LAPORAN OPERASIONAL STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
REVENUE	18.351.119.932.760
Taxes	15.321.808.258.369
Social contributions	
Grants	27.025.651.719
Other revenue	3.002.286.022.672
EXPENSE	28.091.472.182.445
Compensation of employees	13.222.672.830.872
Use of goods and services	8.376.197.180.813
Consumption of fixed capital	
Interests	10.815.708.803
Subsidies	364.617.500
Grants	5.479.228.618.949
Social benefits	32.093.879.121
Other expense	970.099.346.387
Gross operating balance (1-2+23+NOBz)	(9.740.352.249.685)
Net operating balance (1-2+NOBz)	(9.740.352.249.685)
NET TRANSACTIONS IN ASSETS AND LIABILITIES	(9.740.352.249.685)
Net/gross investment in nonfinancial assets	4.476.920.093.983
Fixed Assets	3.328.091.921.124
Weapon systems	
Inventories	1.142.116.823.699
Nonproduced assets	6.711.349.160
Net lending / borrowing (1-2+NOBz-31)	(14.217.272.343.668)
TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING):	
Net acquisition of financial assets [321+322+323]	(14.292.755.872.596)
Domestic debtors	(14.292.755.872.596)
External debtors	
Net incurrence of liabilities [331+332]	(75.483.528.928)
Domestic creditors	(75.483.528.928)
External creditors	
Vertical check: Difference between net lending/borrowing and financing (1-2-31=32-33-NLBz=0)	

NERACA KONSOLIDASIAN STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025
NET WORTH	168.332.772.305.809
Nonfinancial assets	162.486.447.288.916
Fixed assets	68.734.294.952.082
Buildings and structures	59.069.655.477.259
Dwellings	8.173.168.468.479
Buildings other than dwellings	21.480.419.899.415
Other structures	29.416.067.109.365
Land improvements	
Machinery and equipment	4.499.826.713.269
Transport equipment	4.499.826.713.269
Machinery and equipment other than transport equipment	
Information, computer, and telecommunications (ICT) equipment	
Machinery and equipment not elsewhere classified	
Other fixed assets	5.164.812.761.554
Cultivated biological resources	
Animal resources yielding repeat products	
Tree, crop, and plant resources yielding repeat products	
Intellectual property products	5.164.812.761.554
Research and development	103.616.929.009
Mineral exploration and evaluation	
Computer software and databases	212.761.315.344
Entertainment, literary, and artistic originals	
Other intellectual property products	4.848.434.517.201
Weapon systems	
Inventories	6.951.857.578.328
Strategic stocks	75.479.400
Other inventories	6.951.782.098.928
Materials and supplies	2.474.038.772.194
Work in progress	
Finished goods	
Goods for resale	4.477.743.326.734
Military inventories	
Valuables	
Nonproduced assets	86.800.294.758.506
Land	86.800.294.758.506
Mineral and energy resources	
Other naturally occurring assets	
Noncultivated biological resources	
Water resources	
Other natural resources	
Radio spectrum	
Natural resources not elsewhere classified	
Intangible nonproduced assets	
Contracts, leases, and licenses	
Marketable operating leases	
Permits to use natural resources	
Permits to undertake specific activities	
Goodwill and marketing assets	
Financial assets [621+622]	12.295.588.378.385
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits [6212+6222]	5.200.420.853.073
Debt securities [6213+6223]	61.871.413
Loans [6216+6226]	
Equity and investment fund shares [6215+6225]	4.311.244.720.074
Equity [62151+62251]	4.311.244.720.074
Investment fund shares [62152+62252]	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]	
Nonlife insurance technical reserves [62161 +62261]	
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]	
Pension entitlements [62163 + 62263]	
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]	
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]	
Financial derivatives [62171 + 62271]	

Employee stock options [62172 + 62272]	2.783.860.933.824
Other accounts receivable [6218+6228]	16.526.316.480
Trade credit and advances [62181 + 62281]	2.767.334.617.344
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	12.295.588.378.385
Domestic debtors	
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits	5.200.420.853.073
Debt securities	61.871.413
Loans	
Equity and investment fund shares	4.311.244.720.074
Equity	4.311.244.720.074
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	2.783.860.933.824
Trade credit and advances	16.526.316.480
Miscellaneous other accounts receivable	2.767.334.617.344
External creditors	
Monetary gold and SDRs	
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	
Pension entitlements	
Claims of pension funds on pension manager	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes	
Financial derivatives and employee stock options	
Financial derivatives	
Employee stock options	
Other accounts receivable	
Trade credit and advances	
Miscellaneous other accounts receivable	
Liabilities [631+632]	6.449.263.361.491
Special Drawing Rights (SDRs) [6321]	
Currency and deposits [6212+6222]	
Debt securities [6213+6223]	
Loans [6216+6226]	258.082.086.111
Equity and investment fund shares [6215+6225]	
Equity [62151+62251]	
Investment fund shares [62152+62252]	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes [6216+6226]	
Nonlife insurance technical reserves [62161 +62261]	
Life insurance and annuities entitlements [62162 + 62262]	
Pension entitlements [62163 + 62263]	
Claims of pension funds on pension manager [62164 + 62264]	
Provisions for calls under standardized guarantee schemes [62165 + 62265]	
Financial derivatives and employee stock options [6217+6227]	
Financial derivatives [62171 + 62271]	
Employee stock options [62172 + 62272]	
Other accounts payable [6218+6228]	6.191.181.275.380
Trade credit and advances [62181 + 62281]	68.077.474.887
Miscellaneous other accounts receivable [62182 + 62282]	6.123.103.800.493
Domestic creditors	6.449.263.361.491
Currency and deposits	
Debt securities	
Loans	258.082.086.111
Equity and investment fund shares	
Equity	
Investment fund shares	
Insurance, pension, and standardized guarantee schemes	
Nonlife insurance technical reserves	
Life insurance and annuities entitlements	

<ul style="list-style-type: none"> Pension entitlements Claims of pension funds on pension manager Provisions for calls under standardized guarantee schemes Financial derivatives and employee stock options Financial derivatives Employee stock options Other accounts receivable Trade credit and advances Miscellaneous other accounts payable External creditors Special Drawing Rights (SDRs) Currency and deposits Debt securities Loans Equity and investment fund shares Equity Investment fund shares Insurance, pension, and standardized guarantee schemes Nonlife insurance technical reserves Pension entitlements Claims of pension funds on pension manager Provisions for calls under standardized guarantee schemes Financial derivatives and employee stock options Financial derivatives Employee stock options Other accounts receivable Trade credit and advances Miscellaneous other accounts receivable 	<p>6.191.181.275.380</p> <p>68.077.474.887</p> <p>6.123.103.800.493</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------

**LAPORAN SUMBER DAN PENGGUNAAN KAS STATISTIK KEUANGAN
PEMERINTAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES	
Cash receipts from operating activities	18.351.119.932.760
Taxes	15.321.808.258.369
Social Contribution	
Grants	27.025.651.719
Other Receipts	3.002.286.022.672
Cash payments for operating activities	28.091.472.182.445
Compensation of Employees	13.222.672.830.872
Purchase of Goods and Service	8.376.197.180.813
Interest	10.815.708.803
Subsidies	364.617.500
Grants	5.479.228.618.949
Social Benefits	32.093.879.121
Other Payments	970.099.346.387
NET CASH INFLOW FROM OPERATING ACTIVITIES	(9.740.352.249.685)
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN NON FINANCIAL ASSETS	
Purchases of nonfinancial assets	6.358.747.829.326
Fixed Assets	3.344.235.172.756
Inventories	3.007.801.307.410
Valuables	
Nonproduced Assets	6.711.349.160
Sales of nonfinancial assets	1.881.827.735.343
Fixed Assets	16.143.251.632
Inventories	1.865.684.483.711
Valuables	
Nonproduced Assets	
NET CASH OUTFLOW FROM INVESTMENTS IN NONFINANCIAL ASSETS	4.476.920.093.983
CASH SURPLUS/DEFISIT	(14.217.272.343.668)
CASH FLOW FROM TRANSACTIONS IN FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (FINANCING)	
NET ACQUISITION OF FINANCIAL ASSETS OTHER THAN CASH	47.000.000.000
Domestic debtors	47.000.000.000
External creditors	
NET INCURRENCE OF LIABILITIES	(75.483.528.928)
Domestic creditors	(75.483.528.928)
External creditors	
NET CASH INFLOW FROM FINANCING ACTIVITIES	122.483.528.928
NET CHANGE IN THE STOCK OF CASH	(14.339.755.872.596)
Vertical check: Difference between cash surplus/deficit and total net cash inflow from financial activities	
.....Central government	
.....Budgetary central government	

LEMBAR PEMERIKSAAN DAN REVIU BERJENJANG

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Tanggal Cetak :
 Tanggal LKPP :
 Tanggal LKPD :

LAPORAN REALISASI

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

NERACA

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>	<p style="text-align: center;">.....</p> <p style="text-align: center;">NIP.....</p> <p style="text-align: center;">.....</p>

LAPORAN ARUS KAS

Penyusun Laporan	Kepala Seksi Konsolidasi dan Pelaporan Arus Kas dan SAL	Kepala Subdirektorat PLKPP
..... NIP..... NIP..... NIP.....

LAPORAN OPERASIONAL

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP..... NIP..... NIP.....

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Penyusun Laporan	Mengetahui	Menyetujui
..... NIP..... NIP..... NIP.....

LAMPIRAN

**LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH**

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
A. Pendapatan Negara dan Hibah	
I. Pendapatan Perpajakan	11.639.867.780.075
1. Pajak Dalam Negeri	11.222.722.647.075
2. Pajak Perdagangan Internasional	417.145.133.000
II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.341.170.858.029
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
3. Pendapatan Badan Layanan Umum	600.634.463.242
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	740.536.394.787
III. Pendapatan Hibah	
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)	12.981.038.638.104
B. Belanja Negara	
I. Belanja Pemerintah Pusat	9.767.148.595.276
1. Belanja Pegawai	4.611.403.281.365
2. Belanja Barang	3.950.908.360.285
3. Belanja Modal	1.187.367.511.626
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	
5. Belanja Subsidi	
6. Belanja Hibah	
7. Belanja Bantuan Sosial	17.469.442.000
8. Belanja Lain-lain	
II. Transfer ke Daerah	20.226.198.818.736
1. Dana Bagi Hasil	1.313.884.911.500
2. Dana Alokasi Umum	12.980.979.228.401
3. Dana Alokasi Khusus	4.283.661.097.747
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	765.716.342.948
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	3.517.944.754.799
c. Hibah Kepada Daerah	
4. Dana Otonomi Khusus	
5. Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	
6. Dana Desa	1.595.719.756.088
7. Insentif Fiskal	51.953.825.000
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	29.993.347.414.012
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	(17.012.308.775.908)
D. Pembiayaan	
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Netto)	
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri-Perbankan	
2. Pemberian Pinjaman	
3. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	
4. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
5. Surat Berharga Negara (Neto)	
a. Penerimaan Surat Berharga Negara	
b. Pengeluaran untuk Pembayaran/Pelunasan Surat Berharga Negara	
6. Pinjaman dalam negeri (Neto)	
a. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri	
b. Pengeluaran Pembiayaan-Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri	
7. PMN/ Dana Investasi Pemerintah	
8. Kewajiban Penjaminan	
9. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	
10. Pembiayaan Lain-lain	
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri	
a. Penarikan Pinjaman Tunai	
b. Penarikan Pinjaman Kegiatan	
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)	
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran - SILPA (SIKPA) (D-C)	(17.012.308.775.908)

NERACA PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025
ASET	
Aset Lancar	
Kas dan Setara Kas:	
Rekening Kas BUN di BI	
Rekening Pemerintah Lainnya	
Rekening Kas di KPPN	
Kas dalam Transit	
Kas di Bendahara Pengeluaran	81.572.296
Kas di Bendahara Penerimaan	1.574.000
Kas Lainnya dan Setara Kas	286.715.332.756
Kas pada Badan Layanan Umum	329.912.864.933
Jumlah Kas dan Setara Kas	616.711.343.985
Uang Muka Dari Rekening BUN	
Investasi Jangka Pendek	
Investasi dalam Deposito	
Investasi dalam Surat Perbendaharaan Negara	
Investasi Jangka Pendek BLU	108.000.000.000
Bagian Lancar Investasi Non Permanen	
Investasi Jangka Pendek Lainnya	
Jumlah Investasi Jangka Pendek	108.000.000.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	6.930.168.603
Uang Muka Belanja (prepayment)	10.228.565.859
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	4.702.385.754
Piutang:	
Piutang Perpajakan	1.081.661.779.615
Piutang Bukan Pajak	1.027.852.644.182
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	
Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	620.743.272
Piutang Penerusan Pinjaman	
Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang Lainnya	
Piutang dari KUN (Uang Muka yang Akan Diterima)	
Piutang dari Kegiatan BLU	13.721.751.255
Piutang Lancar Kredit Pemerintah dan Piutang Jangka Pendek Lainnya	
Piutang PFK	
Jumlah Piutang (Bruto)	2.123.856.918.324
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	(641.661.439.432)
Jumlah Piutang (Bersih)	1.482.195.478.892
Persediaan	6.133.481.229.231
Persediaan yang Belum Diregister	
Jumlah Aset Lancar	8.362.249.172.324
Investasi Jangka Panjang	
Investasi Non Permanen	
Dana Restrukturisasi Perbankan	
Dana Bergulir	
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	
Jumlah Dana Bergulir (Bersih)	
Investasi dalam Obligasi	
Penyertaan Modal Pemerintah dalam Proyek Pembangunan	
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum Diragukan Tertagih	
Investasi Non Permanen Rekening Investasi BUN	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya	
Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Diragukan Realisasinya	
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya (Bersih)	
Jumlah Investasi Non Permanen	
Investasi Permanen	
Investasi Permanen Penyertaan Modal Pemerintah	
Investasi Permanen Badan Layanan Umum	
Investasi Permanen Lainnya	
Jumlah Investasi Permanen	
Jumlah Investasi Jangka Panjang	
Aset Tetap	
Tanah	68.884.649.958.886
Peralatan dan Mesin	14.383.331.898.475
Gedung dan Bangunan	10.254.209.967.227

Jalan, Irigasi dan Jaringan	36.996.322.635.021
Aset Tetap Lainnya	154.969.124.690
Konstruksi Dalam Pengerjaan	753.122.093.855
Tanah Belum Diregister	
Peralatan dan Mesin Belum Diregister	
Gedung dan Bangunan Belum Diregister	
Jalan, Irigasi dan Jaringan Belum Diregister	
Aset Tetap Lainnya Belum Diregister	
Aset Konsepsi Jasa	3.507.516.169.746
Jumlah Aset Tetap (Bruto)	134.934.121.847.900
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(36.235.467.885.359)
Jumlah Aset Tetap	98.698.653.962.541
Properti Investasi	
Properti Investasi	6.394.258.710
Jumlah Properti Investasi (Bruto)	6.394.258.710
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.014.255.563)
Jumlah Properti Investasi (Bersih)	5.380.003.147
Piutang Jangka Panjang	
Piutang Tagihan Penjualan Angsuran	
Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	504.152.822
Piutang Jangka Panjang Penerusan Pinjaman	
Piutang Jangka Panjang atas Kredit Pemerintah	
Piutang Jangka Panjang Subsidi	
Piutang Jangka Panjang Lainnya	
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)	504.152.822
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	(72.033.095)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)	432.119.727
Aset Lainnya	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	
Aset Tidak Berwujud	449.468.847.738
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	203.573.682.348
Dana Penjaminan	
Dana Kelolaan BLU	
Dana Jangka Panjang	
Aset Lain-lain	663.190.723.478
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman	
Aset Lainnya yang Belum Diregister	
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)	1.316.233.253.564
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(347.566.374.653)
Akumulasi Amortisasi Aset Lainnya	(155.152.850.381)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)	813.514.028.530
JUMLAH ASET	107.880.229.286.269
KEWAJIBAN	
Kewajiban Jangka Pendek	
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	
Utang kepada Pihak Ketiga	186.758.941.614
Utang Bunga	
Utang Subsidi	
Belanja subsidi yang masih harus dibayar	
Utang Transfer	731.273.666.326
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Utang Surat Berharga Negara - Jangka Pendek	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	42.621.530.687
Pendapatan Diterima Dimuka	718.627.581.983
Pendapatan Yang Ditangguhkan	
Utang Kepada KUN	
Utang Kepada RPL	
Utang Jangka Pendek Lainnya	398.007.157
Hibah Yg Belum Disahkan	
Uang Muka Rekening Khusus	
Uang Muka	
Uang Muka Dari KPPN	19.562.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	1.679.699.289.767
Kewajiban Jangka Panjang	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	
Unamortized Discount	
Unamortized Premium	
Pembiayaan Surat Berharga Negara Ditangguhkan	

Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	
Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN	
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	2.327.717.000
Utang Jangka Panjang Subsidi	
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	2.327.717.000
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri	
Kewajiban Konsesi Jasa	
Kewajiban Konsesi Jasa	3.326.810.485.750
Jumlah Kewajiban Konsesi Jasa	3.326.810.485.750
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	3.329.138.202.750
JUMLAH KEWAJIBAN	5.008.837.492.517
EKUITAS	102.871.391.793.752
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	107.880.229.286.269

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
EKUITAS AWAL	104.237.038.370.849
Penyesuaian Ekuitas Awal	
EKUITAS AWAL SETELAH PENYESUAIAN	104.237.038.370.849
SURPLUS / (DEFISIT) LO	(21.983.210.081.256)
KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	
Penyesuaian Nilai Aset	
Koreksi SILPA	
Koreksi Nilai Persediaan	41.063.226.816
Selisih Revaluasi Aset	
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	310.004.019.395
Koreksi Atas Reklasifikasi	1.274.579.011
Koreksi Atas Transaksi BMN Lainnya	
Mutasi Ekuitas Bersih UBL Bukan Satker	
Koreksi Lain-lain	(657.697.349.783)
JUMLAH KOREKSI-KOREKSI YANG LANGSUNG MENAMBAH/ MENGURANGI	(305.355.524.561)
EKUITAS	
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	
KEUNTUNGAN / KERUGIAN YANG BELUM TEREALISASI	20.922.919.028.720
REKLASIFIKASI KEWAJIBAN KE EKUITAS	
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1.365.646.577.097)
EKUITAS AKHIR	102.871.391.793.752

**LAPORAN OPERASIONAL PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
KEGIATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN OPERASIONAL	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	
Pendapatan Pajak Penghasilan	3.031.039.440.490
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	5.080.687.630.783
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	208.634.658.399
Pendapatan Cukai	211.706.930.000
Pendapatan Pajak Lainnya	11.852.942.585
Pendapatan Bea Masuk	55.016.153.000
Pendapatan Bea Keluar	327.231.519.000
Pendapatan Pajak Lain-lain	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	8.926.169.274.257
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	
Penerimaan Sumber Daya Alam	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN / Pendapatan Dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	640.545.703.901
Pendapatan Badan Layanan Umum	606.358.278.214
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1.246.903.982.115
PENDAPATAN HIBAH	
Pendapatan Hibah	
Jumlah Pendapatan Hibah	
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL	10.173.073.256.372
BEBAN OPERASIONAL	
Beban Pegawai	4.819.450.528.575
Beban Persediaan	590.729.806.480
Beban Barang dan Jasa	1.538.693.193.721
Beban Pemeliharaan	663.953.040.211
Beban Perjalanan Dinas	257.492.659.337
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	696.733.946.765
Beban Bunga	
Beban Subsidi	
Beban Hibah	
Beban Bantuan Sosial	17.501.442.000
Beban Transfer	20.120.463.243.736
Beban Lain-lain	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.433.263.392.259
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	100.247.753.374
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL	32.238.529.006.458
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(22.065.455.750.086)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	10.699.506.715
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	5.424.026.382
Jumlah Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	5.275.480.333
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
Jumlah Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA	
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	83.707.762.826
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	6.737.574.329
Jumlah Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	76.970.188.497
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	82.245.668.830
POS LUAR BIASA	
Pendapatan Luar Biasa	
Beban Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	
SURPLUS/(DEFISIT) LO	(21.983.210.081.256)

LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH PUSAT TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Perpajakan	
a. Pendapatan Pajak Penghasilan	3.676.807.025.798
b. Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	6.262.836.385.807
c. Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	166.454.077.400
e. Pendapatan Cukai	247.295.409.000
f. Pendapatan Pajak Lainnya	869.329.749.070
g. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	417.145.133.000
Total Penerimaan Perpajakan	11.639.867.780.075
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	
a. Pendapatan Sumber Daya Alam	
b. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan (KND)	
c. Pendapatan PNBP Lainnya	729.838.462.072
d. Pendapatan Badan Layanan Umum	600.634.463.242
Total Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.330.472.925.314
3. Penerimaan Hibah	
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)	12.970.340.705.389
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Pegawai	4.611.403.281.365
2. Belanja Barang dan Jasa	3.950.908.360.285
3. Belanja Pembayaran Bunga Utang	
4. Belanja Subsidi	
5. Belanja hibah	
6. Belanja Bantuan Sosial	17.469.442.000
7. Belanja Lain-lain	
8. Transfer Dana Bagi Hasil Pajak	597.460.483.900
9. Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	714.609.782.600
10. Transfer Dana Bagi Hasil Cukai	1.814.645.000
11. Dana Alokasi Umum	12.980.979.228.401
12. Transfer Dana Alokasi Khusus (Fisik)	765.716.342.948
13. Transfer Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan DIY dan Dana Insentif Daerah	51.953.825.000
14. Transfer Lainnya	3.517.944.754.799
15. Dana Desa	1.595.719.756.088
16. Hibah Kepada Daerah	
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)	28.805.979.902.386
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)	(15.835.639.196.997)
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
I. Arus Kas Masuk	
1. Pengelolaan dan Penjualan BMN	10.697.932.715
2. Penerimaan Kembali Investasi	
3. Penjualan Aset Program Restrukturisasi	
4. Penerimaan Pembiayaan Dana Bergulir	
5. Penerimaan Investasi Pemerintah	
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)	10.697.932.715
II. Arus Kas Keluar	
1. Belanja Modal	1.187.367.511.626
2. Pengeluaran Program Restrukturisasi	
3. Pengeluaran Pengembangan Pendidikan Nasional	
4. Pengeluaran Pembiayaan Dana Bergulir	
5. Penyertaan Modal Negara	
6. Pengeluaran Dukungan Infrastruktur	
7. Pengeluaran Investasi Pemerintah	
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)	1.187.367.511.626
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (B.I - B.II)	(1.176.669.578.911)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
I. Arus Kas Masuk	
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	
3. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Pokok Utang Luar Negeri	
4. Penerimaan Dari Penjadwalan Kembali Bunga Utang Luar Negeri	
5. Penerimaan Cicilan Pengembalian Pemberian Pinjaman	
6. Penerimaan Pembiayaan Lain	
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)	

II. Arus Kas Keluar	
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	
3. Pelunasan Pokok Utang Luar Negeri Melalui Penjadwalan Kembali	
4. Pemberian Pinjaman yang Bersumber dari Subsidiary Loan Agreement	
5. Pengeluaran Pembiayaan Lain	
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (C.I - C.II)	
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	
1. Perhitungan Pihak Ketiga (Netto)	
2. Transito (Netto)	(89.531.414.597)
3. Transaksi Non Anggaran Pihak Ketiga (Netto)	
4. Kiriman Uang Antar Rekening Bank (Netto)	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (D)	(89.531.414.597)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SEBELUM KOREKSI PEMBUKUAN	(17.101.840.190.505)
Penggunaan SAL	
Penyesuaian Pembukuan	(216.268.742.528)
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUAN	(17.318.108.933.033)
SALDO AWAL KAS	496.620.414.305
SALDO AKHIR KAS	(16.821.488.518.728)
Kas Lainnya & Setara Kas Selain Hibah yg Sudah Disahkan	
Kas BLU yg Belum Disahkan/Lainnya	
Kas/Dana yg Dibatasi Penggunaannya (Aset Lainnya)	
Kas Transito (Kiriman Uang)	
SALDO AKHIR KAS DAN SETARA KAS	(16.821.488.518.728)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PEMERINTAH PUSAT
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Jumlah SAL Awal Setelah Penggunaan SAL	
C. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	(17.012.308.775.908)
Jumlah SAL Sebelum Penyesuaian (A.1)	(17.012.308.775.908)
D. Penyesuaian SAL	
1. Penyesuaian Pembukuan	
2. Penyesuaian Lain-lain	
Total Penyesuaian SAL (A.II)	
E. SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (A.I+A.II)	(17.012.308.775.908)

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
PENDAPATAN - LRA	22.803.082.792.373
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	5.478.104.527.270
Pendapatan Pajak Daerah - LRA	3.691.928.402.987
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	939.017.981.130
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA	262.970.454.331
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	584.187.688.822
PENDAPATAN TRANSFER - LRA	17.263.254.604.860
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	15.891.889.612.388
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA	1.371.364.992.472
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	
Bantuan Keuangan - LRA	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA	61.723.660.243
Pendapatan Hibah - LRA	2.996.709.024
Dana Darurat - LRA	
Pendapatan Lainnya - LRA	58.726.951.219
BELANJA	20.008.046.360.133
BELANJA OPERASI	15.268.120.966.372
Belanja Pegawai	9.055.396.192.943
Belanja Barang dan Jasa	5.669.326.261.866
Belanja Bunga	10.815.708.803
Belanja Subsidi	364.617.500
Belanja Hibah	517.593.748.139
Belanja Bantuan Sosial	14.624.437.121
BELANJA MODAL	2.163.579.010.290
Belanja Modal Tanah	6.100.347.720
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	388.975.518.517
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	586.058.094.776
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.062.759.958.263
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	83.977.491.732
Belanja Modal Konstruksi dalam Pengerjaan	
Belanja Modal Aset Lainnya	2.873.905.086
Belanja Modal BLUD	32.833.694.196
BELANJA TAK TERDUGA	30.727.055.625
Belanja Tak Terduga	30.727.055.625
TRANSFER	2.545.619.327.846
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	361.128.047.145
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	355.136.499.602
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.991.547.543
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	2.184.491.280.701
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	9.851.783.366
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.174.639.497.335
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT LRA	2.795.036.432.240
PEMBIAYAAN	635.440.410.383
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	885.456.939.311
Penggunaan SiLPA	757.923.939.311
Pencairan Dana Cadangan	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Pinjaman Dalam Negeri	127.533.000.000
Penerimaan Kembali Piutang	
Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	
Pinjaman Luar Negeri	
Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya	
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	250.016.528.928
Pembentukan Dana Cadangan	
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	47.000.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	203.016.528.928
Pemberian Pinjaman Daerah	
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri	

Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

3.430.476.842.623

**NERACA KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2025
ASET	66.976.413.232.614
ASET LANCAR	5.710.507.212.512
Kas dan Setara Kas	4.272.135.826.740
Investasi Jangka Pendek	
Piutang Pendapatan	967.003.064.341
Piutang Lainnya	10.673.895.802
Penyisihan Piutang	(362.134.170.979)
Beban Dibayar Dimuka	4.452.247.512
Persediaan	818.376.349.097
Aset Untuk Dikonsolidasikan	
INVESTASI JANGKA PANJANG	4.311.306.591.487
Investasi Jangka Panjang Non Permanen	61.871.413
Investasi Jangka Panjang Permanen	4.311.244.720.074
ASET TETAP	53.223.207.416.506
Tanah	17.915.644.799.620
Peralatan dan Mesin	11.528.734.754.578
Gedung dan Bangunan	23.649.586.483.378
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	41.640.828.542.191
Aset Tetap Lainnya	1.686.882.985.237
Konstruksi Dalam Pengerjaan	826.242.153.682
Akumulasi Penyusutan	(44.024.712.302.180)
DANA CADANGAN	
Dana Cadangan	
ASET LAINNYA	3.731.392.012.109
Tagihan Jangka Panjang	5.483.178.703
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	728.500.851.194
Aset Tidak Berwujud	42.583.606.840
Aset Lain-lain	2.954.824.375.372
KEWAJIBAN	1.515.032.720.557
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	1.284.283.446.159
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	518.107.784
Utang Bunga	9.802.763.059
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	27.332.811.713
Pendapatan Diterima Dimuka	81.835.354.696
Utang Belanja	915.140.900.542
Utang Jangka Pendek Lainnya	249.653.508.364
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	230.749.274.398
Utang Dalam Negeri	230.749.274.398
Utang Jangka Panjang Lainnya	
EKUITAS	65.461.380.512.057

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH
TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
EKUITAS AWAL	64.353.474.548.314
Surplus/Defisit-LO	(944.550.648.304)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR	2.052.456.612.051
Koreksi Nilai Persediaan (BAS level 4)	
Koreksi Nilai Persediaan	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Koreksi Lainnya	2.052.456.612.051
JUMLAH EKUITAS AKHIR	65.461.380.512.061

**LAPORAN OPERASIONAL KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
PENDAPATAN - LO	21.480.148.446.901
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	5.478.104.527.270
Pendapatan Pajak Daerah - LO	3.691.928.402.987
Pendapatan Retribusi Daerah - LO	939.017.981.130
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	262.970.454.331
Lain-lain PAD Yang Sah - LO	584.187.688.822
PENDAPATAN TRANSFER - LO	15.940.320.259.388
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	15.891.889.612.388
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	48.430.647.000
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
Bantuan Keuangan - LO	
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	61.723.660.243
Pendapatan Hibah - LO	2.996.709.024
Dana Darurat - LO	
Pendapatan Lainnya - LO	58.726.951.219
BEBAN	22.424.699.095.205
BEBAN OPERASI - LO	19.879.079.767.359
Beban Pegawai - LO	9.055.396.192.943
Beban Barang dan Jasa	6.089.754.597.911
Beban Bunga	10.815.708.803
Beban Subsidi	364.617.500
Beban Hibah	517.593.748.139
Beban Bantuan Sosial	14.624.437.121
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.190.530.464.942
Beban Penyisihan Piutang	
Beban Lain-lain	
BEBAN TRANSFER	2.545.619.327.846
Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	355.136.499.602
Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5.991.547.543
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	9.851.783.366
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	2.174.639.497.335
Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(944.550.648.304)
SURPLUS NON OPERASIONAL - LO	
Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
DEFISIT NON OPERASIONAL	
Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(944.550.648.304)
POS LUAR BIASA	
PENDAPATAN LUAR BIASA - LO	
Pendapatan Luar Biasa - LO	
BEBAN LUAR BIASA	
Beban Luar Biasa	
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA	
SURPLUS/DEFISIT-LO	(944.550.648.304)

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT
WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Pajak Daerah	(3.691.928.402.987)
Penerimaan Retribusi Daerah	(939.017.981.130)
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(262.970.454.331)
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	(584.187.688.822)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	(372.236.085.594)
Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	(726.635.831.711)
Penerimaan Dana Alokasi Umum	(11.814.844.690.426)
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	(2.978.173.004.657)
Penerimaan Dana Otonomi Khusus	
Penerimaan Dana Penyesuaian	
Penerimaan Hibah	(2.996.709.024)
Penerimaan Dana Darurat	
Penerimaan Lainnya	(58.726.951.219)
Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	
Jumlah Arus Masuk Kas	(21.431.717.799.901)
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pegawai	9.055.396.192.943
Pembayaran Barang	5.669.326.261.866
Pembayaran Bunga	10.815.708.803
Pembayaran Subsidi	364.617.500
Pembayaran Beban Hibah	517.593.748.139
Pembayaran Beban Bantuan Sosial	14.624.437.121
Pembayaran Tak Terduga	30.727.055.625
Pembayaran Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	355.136.499.602
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	5.991.547.543
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten/Kota	5.991.547.543
Pembayaran Kejadian Luar Biasa	
Jumlah Arus Keluar Kas	15.665.967.616.685
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(37.097.685.416.586)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Arus Masuk Kas	
Pencairan Dana Cadangan	
Penjualan atas Tanah	
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	
Penjualan Aset Tetap Lainnya	
Penjualan Aset Lainnya	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen	

Jumlah Arus Masuk Kas	
Arus Keluar Kas	
Pembentukan Dana Cadangan	6.100.347.720
Perolehan Tanah	
Perolehan Peralatan dan Mesin	388.975.518.517
Perolehan Gedung dan Bangunan	586.058.094.776
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.062.759.958.263
Perolehan Aset Tetap Lainnya	83.977.491.732
Perolehan Aset Lainnya	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	47.000.000.000
Pengeluaran Pembelian Investasi Non Permanen	
Jumlah Arus Keluar Kas	2.174.871.411.008
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(2.174.871.411.008)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Arus Masuk Kas	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	(127.533.000.000)
Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	
Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Jumlah Arus Masuk Kas	(127.533.000.000)
Arus Keluar Kas	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	146.600.000.000
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bukan Bank	56.416.528.928
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Obligasi	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lainnya	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara	
Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Jumlah Arus Keluar Kas	203.016.528.928
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(330.549.528.928)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	
Arus Masuk Kas	
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Masuk Kas	
Arus Keluar Kas	
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
Jumlah Arus Keluar Kas	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	
Kenaikan/Penurunan Kas	(39.603.106.356.522)
Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	
Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di Bendahara Pengeluaran	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	
Saldo Akhir Kas	(39.603.106.356.522)

**LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH KONSOLIDASIAN
PEMERINTAH DAERAH TINGKAT WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2025 DAN 2024**

(Dalam Rupiah)

Uraian	2025
Saldo Anggaran Lebih Awal	
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
Sub Total	
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	
Sub Total	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya (BAS level 4)	
Lain-lain	
Saldo Anggaran Lebih Akhir	

LAMPIRAN I
NERACA SALDO BUKU BESAR
AKRUAL

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
1110100- Kas di Kas Daerah	0	2.777.736.488.934	2.777.736.488.934
1110200- Kas di Bendahara Penerimaan	0	567.833.894	567.833.894
1110300- Kas di Bendahara Pengeluaran	0	15.278.645.105	15.278.645.105
1110400- Kas di BLUD	0	958.870.583.918	958.870.583.918
1110500- Kas Lainnya	0	519.682.274.889	519.682.274.889
111611- Kas di Bendahara Pengeluaran	0	14.129.776	14.129.776
111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	39.124.000	28.318.520	67.442.520
111711- Kas di Bendahara Penerimaan	0	1.574.000	1.574.000
111821- Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	17.645.533	92.846.007	110.491.540
111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	567.765.633.184	(283.882.816.592)	283.882.816.592
111825- Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	3.206.530.719	(745.360.819)	2.461.169.900
111826- Kas Lainnya di BLU	118.738.755	142.115.969	260.854.724
111911- Kas dan Bank - BLU	350.475.195.426	(23.562.330.493)	326.912.864.933
111929- Setara kas Lainnya - BLU	7.000.000.000	(4.000.000.000)	3.000.000.000
1130100- Piutang Pajak Daerah	0	559794217880,95	559794217880,95
1130200- Piutang Retribusi	0	61184651476,92	61184651476,92
1130300- Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	15.385.215.084	15.385.215.084
1130400- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0	142753977041,06	142753977041,06
1130500- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0	74.606.851.583	74.606.851.583
113311- Deposito dan Investasi Jangka Pendek Lainnya dari Kas dan Bank BLU Yang Sudah Disahkan	68.000.000.000	40.000.000.000	108.000.000.000
113ZZZZ- Piutang Pendapatan (BAS Level 4)	0	113278151274,57	113278151274,57
114111- Belanja Pegawai Dibayar di Muka (prepaid)	66.011.619	(21.582.449)	44.429.170
114112- Belanja barang yang dibayar di muka (prepaid)	24.185.668.390	(17.299.928.957)	6.885.739.433
114211- uang muka belanja pegawai (prepayment)	485.860	(485.860)	0
114212- uang muka belanja barang (prepayment)	0	10.228.565.859	10.228.565.859
114311- Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	14.109.522.627	(9.407.136.873)	4.702.385.754
114ZZZZ- Piutang Lainnya (BAS Level 4)	0	10673895801,7	10673895801,7
1150100- Penyisihan Piutang Pendapatan	0	-216740146629,305	-216740146629,305
1150200- Penyisihan Piutang Lainnya	0	-13174853968,46	-13174853968,46
115121- Piutang PPh Pasal 21	9.671.616.173	1.391.624.339	11.063.240.512
115122- Piutang PPh Pasal 22	1.751.180.693	(121.182.679)	1.629.998.014
115123- Piutang PPh Pasal 22 Impor	211.332.325	2.184.534.850	2.395.867.175
115124- Piutang PPh Pasal 23	26.398.582.096	778.136.513	27.176.718.609
115125- Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	17.611.672.617	88.104.354	17.699.776.971
115126- Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	168.042.141.807	6.396.628.686	174.438.770.493
115127- Piutang PPh Pasal 26	68.580.840	4.083.737.362	4.152.318.202
115128- Piutang PPh Final	30.693.980.172	(1.478.898.081)	29.215.082.091
115129- Piutang PPh Non Migas Lainnya	0	2.826.656	2.826.656
115131- Piutang PPN Dalam Negeri	389.276.375.475	133.963.637.712	523.240.013.187
115132- Piutang PPN Impor	1.071.623.120	9.471.692.654	10.543.315.774
115153- Piutang PBB Perkebunan	91.716.119.350	(12.521.486.801)	79.194.632.549
115154- Piutang PBB Perhutanan	62.370.093.260	7.176.526.630	69.546.619.890
115155- Piutang PBB Pertambangan	32.022.664.977	5.036.878.172	37.059.543.149
115159- Piutang PBB Lainnya	1.898.855.523	(256.685.798)	1.642.169.725
115165- Piutang Bea Materai	2.424.000	0	2.424.000
115169- Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	4.060.800	(4.060.800)	0
115173- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPh	46.004.027.096	(620.383.773)	45.383.643.323
115174- Piutang Bunga/Denda Penagihan PPN	35.333.063.883	4.702.873.704	40.035.937.587
115179- Piutang Bunga/Denda Penagihan PTLL	0	2.438.708	2.438.708
115181- Piutang Bea masuk	749.547.000	(749.547.000)	0
115183- Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	396.284.000	(391.284.000)	5.000.000
115185- Piutang Pajak/pungutan ekspor	1.670.329.000	2.840.242.000	4.510.571.000
115186- Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	1.938.136.000	0	1.938.136.000
115187- Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	471.794.000	310.942.000	782.736.000
115211- Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	198.319.321.444	(2.498.129.115)	195.821.192.329
115212- Piutang Lainnya	2.551.322.177	(633.851.880)	1.917.470.297
115231- Piutang Transfer ke Daerah - Dana Transfer Umum (DTU)	674.923.757.077	152.110.066.000	827.033.823.077
115239- Piutang Transfer ke Daerah (TKD) - Dana Desa, Insentif Otonomi Khusus, dan Keistimewaan (DDIOKK)	1.512.601.549	1.567.556.930	3.080.158.479
115421- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	83.113.868	(83.113.868)	0
115431- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi - BLU	501.531.269	119.212.003	620.743.272

115711- Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	3.995.263.558	6.913.003.356	10.908.266.914
115712- Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	2.266.809.966	(63.613.000)	2.203.196.966
115719- Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	643.633.334	(46.998.171)	596.635.163
115791- Piutang BLU Lainnya dari Kegiatan Operasional	2.720.400	(2.719.051)	1.349
115813- Piutang Sewa Ruangan - BLU	41.500.000	(27.849.137)	13.650.863
115ZZZZ- Penyisihan Piutang (BAS Level 4)	0	-132219170381,01	-132219170381,01
116112- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPh Non Migas	(128.123.331.928)	(14.358.428.437)	(142.481.760.365)
116113- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PPN	(213.757.435.056)	(30.335.521.864)	(244.092.956.920)
116115- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak PBB dan BPHTB	(84.182.627.315)	6.876.693.335	(77.305.933.980)
116116- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Cukai dan Bea Materai	(4.060.800)	4.060.800	0
116117- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya	(16.830.425.879)	(22.390.445.567)	(39.220.871.446)
116118- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional	(3.732.166.155)	(10.051.765)	(3.742.217.920)
116211- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNPB	(110.323.177.253)	(20.849.675.250)	(131.172.852.503)
116212- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	(1.450.618.523)	(282.566.226)	(1.733.184.749)
116421- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	(415.570)	415.570	0
116611- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	(19.976.318)	(34.565.017)	(54.541.335)
116612- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	(2.086.047.841)	250.807.625	(1.835.240.216)
116619- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	(4.081.841)	(1.043.570)	(5.125.411)
116691- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari Kegiatan Operasional Lainnya BLU	(13.602)	13.595	(7)
116713- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Sewa Ruangan BLU	(28.565.000)	14.914.137	(13.650.863)
116732- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	(2.507.658)	(596.059)	(3.103.717)
116ZZZZ- Beban Dibayar Dimuka (BAS Level 4)	0	4452247511,8997902	4452247511,8997902
117111- Barang Konsumsi	277.920.872.545	27.332.400.098	305.253.272.643
117112- Amunisi	394.409.499.861	10.798.467.697	405.207.967.558
117113- Bahan untuk Pemeliharaan	4.215.181.245	(2.841.828.296)	1.373.352.949
117114- Suku Cadang	954.811.517.030	(34.658.458.906)	920.153.058.124
117122- Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	628.882.404.099	(74.409.511.934)	554.472.892.165
117123- Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	735.395.267	116.625.501	852.020.768
117124- Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	34.813.394.398	(2.670.800.781)	32.142.593.617
117125- Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	2.563.767.887.091	207.366.741.512	2.771.134.628.603
117126- Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	548.404.830.985	18.701.626.566	567.106.457.551
117127- Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	490.355.000	490.355.000
117128- Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	1.512.848.519	33.571.758.977	35.084.607.496
117129- Persediaan Dalam Proses	192.970.203.229	310.696.454.403	503.666.657.632
117131- Bahan Baku	20.714.916.545	258.432.278	20.973.348.823
117151- Persediaan BTD, BDN, dan BMMN	3.018.909.000	(317.486.000)	2.701.423.000
117191- Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	111.107.400	(35.628.000)	75.479.400
117199- Persediaan Lainnya	9.307.888.477	3.485.225.425	12.793.113.902
117ZZZZ- Persediaan (BAS Level 4)	0	818376349096,8842	818376349096,8842
1210400- Dana Bergulir	0	61871413,31	61871413,31
1220100- Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0	4311244720073,941	4311244720073,941
131111- Tanah	68.232.582.660.553	652.067.298.333	68.884.649.958.886
131ZZZZ- Tanah (BAS Level 4)	0	17915644799619,92	17915644799619,92
132111- Peralatan dan Mesin	13.280.952.865.951	1.102.379.032.524	14.383.331.898.475
132ZZZZ- Peralatan dan Mesin (BAS Level 4)	0	11528734754577,979	11528734754577,979
133111- Gedung dan Bangunan	9.995.330.692.127	258.879.275.100	10.254.209.967.227
133ZZZZ- Gedung dan Bangunan (BAS Level 4)	0	23649586483377,79	23649586483377,79
134111- Jalan dan Jembatan	27.143.158.996.190	624.746.152.959	27.767.905.149.149

134112- Irigasi	8.696.007.217.864	375.682.271.429	9.071.689.489.293
134113- Jaringan	149.922.881.835	6.805.114.744	156.727.996.579
134ZZZZ- Jalan, Irigasi, dan Jaringan (BAS Level 4)	0	41640828542191,24	41640828542191,24
135111- Aset Tetap Renovasi	54.803.017.651	5.818.689.000	60.621.706.651
135121- Aset Tetap Lainnya	88.510.725.281	5.836.692.758	94.347.418.039
135ZZZZ- Aset Tetap Lainnya (BAS Level 4)	0	1686882985236,549	1686882985236,549
1360100- Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	826242153682,17	826242153682,17
136111- Konstruksi Dalam pengerjaan	1.020.320.276.516	(267.198.182.661)	753.122.093.855
1370100- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	(10.161.524.880.942)	(10.161.524.880.942)
1370200- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	(7.244.257.153.241)	(7.244.257.153.241)
1370300- Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan	0	(26.559.207.127.349)	(26.559.207.127.349)
1370400- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	(59.723.140.648)	(59.723.140.648)
137111- Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(10.241.880.850.157)	(1.008.834.208.685)	(11.250.715.058.842)
137211- Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(1.812.582.926.564)	(268.458.572.184)	(2.081.041.498.748)
137311- Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(16.298.896.608.890)	(1.758.738.707.236)	(18.057.635.316.126)
137312- Akumulasi Penyusutan Irigasi	(3.954.273.881.485)	(599.407.970.057)	(4.553.681.851.542)
137313- Akumulasi Penyusutan Jaringan	(46.163.975.671)	(4.395.797.159)	(50.559.772.830)
137411- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(23.197.780.328)	(192.208.600)	(23.389.988.928)
138111- Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	6.425.542.000	0	6.425.542.000
138121- Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	3.501.090.627.746	0	3.501.090.627.746
138211- Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	(988.544.928)	(141.220.704)	(1.129.765.632)
138221- Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	(164.643.703.307)	(52.670.929.404)	(217.314.632.711)
138311- Properti Investasi	6.394.258.710	0	6.394.258.710
138411- Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(915.754.682)	(98.500.881)	(1.014.255.563)
1510100- Tagihan Penjualan Angsuran	0	1.595.364.867	1.595.364.867
151ZZZZ- Tagihan Jangka Panjang (BAS Level 4)	0	3.887.813.836	3.887.813.836
152111- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	161.246.126	16.736.423	177.982.549
152211- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi-Badan Layanan Umum	543.618.073	(217.447.800)	326.170.273
152ZZZZ- Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BAS Level 4)	0	728.500.851.194	728.500.851.194
1530600- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0	(211.923.591.882)	(211.923.591.882)
153ZZZZ- Aset Tidak Berwujud (BAS Level 4)	0	254.507.198.722	254.507.198.722
1540100- Aset Lain-lain	0	2.954.824.375.372	2.954.824.375.372
155111- Piutang Jangka Panjang lainnya	32.557.800	(32.557.800)	0
156311- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(71.706.562)	1.304.318	(70.402.244)
156411- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi BLU	(2.718.090)	1.087.239	(1.630.851)
156911- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Jangka Panjang Lainnya	(162.789)	162.789	0
162141- Paten	25.200.000	0	25.200.000
162151- Software	117.006.392.376	5.804.623.556	122.811.015.932
162161- Lisensi	10.611.729.812	157.200.463.941	167.812.193.753
162171- Hasil Kajian/Penelitian	104.135.469.509	(518.540.500)	103.616.929.009
162191- Aset Tak Berwujud Lainnya	39.655.574.863	15.522.804.181	55.178.379.044
162311- Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	0	25.130.000	25.130.000
163119- Dana Lainnya	1.487.860.786	(809.645.583)	678.215.203
163139- Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	292.384.433.446	(89.488.966.301)	202.895.467.145
163141- Dana di Rekening Penampungan - BLU	1.323.708.000	(1.323.708.000)	0
166112- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	533.840.345.520	63.185.687.116	597.026.032.636
166113- Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	59.401.749.842	(29.276.500)	59.372.473.342
166114- BMN Dalam Proses PMPP	6.792.217.500	0	6.792.217.500
169121- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(4.506.397.624)	(239.414.732)	(4.745.812.356)
169122- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(296.059.832.428)	(46.760.729.869)	(342.820.562.297)
169314- Akumulasi Amortisasi Paten	(7.357.500)	(1.635.000)	(8.992.500)
169315- Akumulasi Amortisasi Software	(83.241.012.718)	(13.014.484.618)	(96.255.497.336)
169316- Akumulasi Amortisasi Lisensi	(3.014.320.175)	(15.047.188.787)	(18.061.508.962)
169317- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	(20.264.122.087)	(4.661.257.644)	(24.925.379.731)
169318- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(15.930.748.352)	29.276.500	(15.901.471.852)
2110300- Utang PPh Pusat	0	(3.814.323)	(3.814.323)
2110400- Utang PPN Pusat	0	(743.042)	(743.042)
211ZZZZ- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) (BAS	0	-513550418,97	-513550418,97

Level 4)			
2120300- Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD	0	-112699999,98	-112699999,98
212111- Belanja pegawai yang masih harus dibayar	(50.735.035.347)	(1.892.822.773)	(52.627.858.120)
212112- Belanja barang yang masih harus dibayar	(10.168.923.413)	5.444.385.259	(4.724.538.154)
212113- Belanja modal yang masih harus dibayar	(485.996.060)	0	(485.996.060)
212121- Utang kepada Pihak Ketiga BLU	(22.849.545.574)	12.826.974.997	(10.022.570.577)
212191- Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	(170.340.062.917)	53.508.667.786	(116.831.395.131)
212192- Dana Pihak Ketiga	(1.235.287.628)	(589.155.872)	(1.824.443.500)
212193- Dana Pihak Ketiga BLU	(118.738.755)	(123.401.317)	(242.140.072)
212ZZZZ- Utang Bunga (BAS Level 4)	0	(9.690.063.059)	(9.690.063.059)
213ZZZZ- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (BAS Level 4)	0	(27.332.811.713)	(27.332.811.713)
2140200- Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III	0	-216511976,35	-216511976,35
2140400- Pendapatan Diterima Dimuka lainnya	0	-23486362,22	-23486362,22
214ZZZZ- Pendapatan Diterima Dimuka (BAS Level 4)	0	-81595356357,68	-81595356357,68
2150100- Utang Belanja Pegawai	0	(52.185.981.446)	(52.185.981.446)
2150200- Utang Belanja Barang dan Jasa	0	-159397144793,13	-159397144793,13
2150300- Utang Belanja Modal	0	(105.837.897.231)	(105.837.897.231)
2150500- Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	0	-60978183020,7	-60978183020,7
2150600- Utang Belanja Lain-lain	0	(26.532.429.749)	(26.532.429.749)
215111- Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	(251.723.337.326)	105.735.575.000	(145.987.762.326)
215112- Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar - Dana Transfer Umum (DTU)	0	(585.285.904.000)	(585.285.904.000)
215ZZZZ- Utang Belanja (BAS Level 4)	0	-510209264302,6396	-510209264302,6396
2160100- Utang Kelebihan Pembayaran PAD	0	(51.799.846)	(51.799.846)
2160400- Utang Transfer	0	(7.411.464.650)	(7.411.464.650)
2160500- Utang Jangka Pendek Lainnya	0	(96.600.000.000)	(96.600.000.000)
216ZZZZ- Utang Jangka Pendek Lainnya (BAS Level 4)	0	-145590243868,26	-145590243868,26
218111- Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	(382.864.111)	(382.864.111)
219111- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPh	(39.392.781.013)	31.630.138.521	(7.762.642.492)
219112- Utang Kelebihan Bayar Pajak PPN/PPnBM	(89.739.352.154)	55.431.700.651	(34.307.651.503)
219114- Utang Kelebihan Bayar Pajak PBB	(139.733.622)	(350.763.886)	(490.497.508)
219119- Utang Kelebihan Pembayaran Pajak Lainnya	0	(60.739.184)	(60.739.184)
219211- Pendapatan Sewa Diterima di Muka	(1.438.457.299)	(359.158.999)	(1.797.616.298)
219212- Pendapatan Bukan Pajak lainnya Diterima di Muka	(25.643.765.614)	8.650.527.391	(16.993.238.223)
219214- Pendapatan Diterima di Muka BLU	(35.516.006.464)	5.816.992.617	(29.699.013.847)
219241- Pajak Diterima Dimuka PPh	0	(114.574.908.422)	(114.574.908.422)
219242- Pendapatan Pajak Diterima Dimuka PPN	0	(182.982.831)	(182.982.831)
219249- Pendapatan Pajak Diterima Dimuka Pajak Lainnya	0	(555.379.822.362)	(555.379.822.362)
219511- Uang Muka dari KPPN	(19.562.000)	0	(19.562.000)
219961- Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	(15.143.046)	0	(15.143.046)
2210400- Utang Pemerintah Pusat	0	(155.131.387.578)	(155.131.387.578)
221929- Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya BLU	0	(2.327.717.000)	(2.327.717.000)
221ZZZZ- Utang Dalam Negeri (BAS Level 4)	0	(75.617.886.820)	(75.617.886.820)
226113- Kewajiban Konsesi Jasa Skema Pemberian Hak Usaha kepada Mitra	(3.353.911.382.573)	27.100.896.823	(3.326.810.485.750)
3110100- Ekuitas	0	-65461380512060,84	-65461380512060,84
311111- SAL	55.980.360.018.169	0	55.980.360.018.169
313111- Ditagihkan ke Entitas Lain	(56.396.809.706.138)	(29.341.271.090.645)	(85.738.080.796.783)
313121- Diterima dari Entitas Lain	186.060.616.395	10.027.307.857.855	10.213.368.474.250
313211- Transfer Keluar	0	60.058.347.179.237	60.058.347.179.237
313221- Transfer Masuk	0	(61.497.161.507.506)	(61.497.161.507.506)
3910100- Ekuitas Awal Pemerintah Daerah	0	-64353474548313,72	-64353474548313,72
391111- Ekuitas	(103.232.331.485.063)	20.120.463.243.736	(83.111.868.241.327)
391113- Koreksi Nilai Persediaan	0	(41.063.226.816)	(41.063.226.816)
391116- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	0	(304.510.624.691)	(304.510.624.691)
391118- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	0	(5.493.394.704)	(5.493.394.704)
391119- Koreksi Lainnya	(277.677.837.907)	656.887.704.200	379.209.866.293
391121- Ekuitas Transaksi Lainnya	0	809.645.583	809.645.583
391131- Pengesahan Hibah Langsung	0	(164.703.579.684)	(164.703.579.684)
391132- Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	0	757.428	757.428
391133- Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(5.438.645.405)	(5.438.645.405)
391151- Koreksi Atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya	0	(1.274.579.011)	(1.274.579.011)
3920300- Koreksi terhadap Ekuitas Lainnya	0	-2052456612050,9585	-2052456612050,9585
399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari	(19.562.000)	0	(19.562.000)

Kas BP KL			
399912- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari Kas BLU KL	(212.737.597.713)	0	(212.737.597.713)
399913- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari Kas Hibah KL	(283.882.816.592)	0	(283.882.816.592)
411111- Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	(12.784.180)	(12.784.180)
411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	(9.351.319)	(9.351.319)
411121- Pendapatan PPh Pasal 21	0	(615.315.609.938)	(615.315.609.938)
411122- Pendapatan PPh Pasal 22	0	(98.354.952.054)	(98.354.952.054)
411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	(29.663.032.916)	(29.663.032.916)
411124- Pendapatan PPh Pasal 23	0	(214.939.326.019)	(214.939.326.019)
411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	(165.716.363.668)	(165.716.363.668)
411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	(1.337.112.899.818)	(1.337.112.899.818)
411127- Pendapatan PPh Pasal 26	0	(55.893.787.670)	(55.893.787.670)
411128- Pendapatan PPh Final	0	(513.689.743.684)	(513.689.743.684)
411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	(331.589.224)	(331.589.224)
411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	(4.938.549.204.763)	(4.938.549.204.763)
411212- Pendapatan PPN Impor	0	(96.064.946.970)	(96.064.946.970)
411219- Pendapatan PPN Lainnya	0	(26.035.187.132)	(26.035.187.132)
411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	(18.734.605.937)	(18.734.605.937)
411222- Pendapatan PPnBM Impor	0	(116.864.144)	(116.864.144)
411229- Pendapatan PPnBM Lainnya	0	(1.186.821.837)	(1.186.821.837)
411313- Pendapatan PBB Perkebunan	0	(139.791.237.768)	(139.791.237.768)
411314- Pendapatan PBB Perhutanan	0	(47.285.500.537)	(47.285.500.537)
411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	(20.893.736.713)	(20.893.736.713)
411319- Pendapatan PBB Lainnya	0	(664.183.381)	(664.183.381)
411511- Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	(209.533.057.000)	(209.533.057.000)
411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	(2.173.873.000)	(2.173.873.000)
411611- Pendapatan Bea Meterai	0	(16.949.824)	(16.949.824)
411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Materai	0	(10.270.578)	(10.270.578)
411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	(2.106.220.457)	(2.106.220.457)
411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	(1.425.695.460)	(1.425.695.460)
411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	(8.179.246.951)	(8.179.246.951)
411659- Pendapatan Denda Penagihan Pajak Lainnya	0	(124.014.266)	(124.014.266)
412111- Pendapatan Bea Masuk	0	(53.030.164.000)	(53.030.164.000)
412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	(1.521.276.000)	(1.521.276.000)
412121- Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	(124.000)	(124.000)
412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	(464.589.000)	(464.589.000)
412211- Pendapatan Bea Keluar	0	(326.815.558.000)	(326.815.558.000)
412213- Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	(415.961.000)	(415.961.000)
419999- Pendapatan Pajak lain-lain	0	9.454.951	9.454.951
424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	(135.750.930.268)	(135.750.930.268)
424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	(357.557.105.354)	(357.557.105.354)
424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	(7.977.965.000)	(7.977.965.000)
424212- Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	(33.500.000)	(33.500.000)
424213- Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	0	(14.999.602.608)	(14.999.602.608)
424215- Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	(258.766.368)	(258.766.368)
424241- Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri- Perorangan - Barang / Jasa	0	(685.160.000)	(685.160.000)
424311- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	(293.025.000)	(293.025.000)
424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha	0	(14.267.790.794)	(14.267.790.794)
424313- Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	(42.519.836.515)	(42.519.836.515)
424421- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	(2.965.417.828)	(2.965.417.828)
424422- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	(6.162.359.181)	(6.162.359.181)
424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	(11.984.601.044)	(11.984.601.044)
424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(8.790.833)	(8.790.833)
424919- Pendapatan Lain-lain BLU	0	(1.381.844.741)	(1.381.844.741)
424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	(1.596.748.622)	(1.596.748.622)
424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	(1.336.152.727)	(1.336.152.727)
424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang	0	(6.274.411.084)	(6.274.411.084)
424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	(313.061.080)	(313.061.080)

425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	(91.498.800)	(91.498.800)
425121- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(312.890.765)	(312.890.765)
425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	(2.228.160.267)	(2.228.160.267)
425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	(8.158.455.683)	(8.158.455.683)
425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(2.179.997.903)	(2.179.997.903)
425132- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	(23.345.773)	(23.345.773)
425134- Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(84.896.955)	(84.896.955)
425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	(2.925.365.351)	(2.925.365.351)
425211- Pendapatan Paspor	0	(83.389.100.000)	(83.389.100.000)
425212- Pendapatan Visa	0	(1.149.500.000)	(1.149.500.000)
425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	(13.233.750.000)	(13.233.750.000)
425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	(3.497.205.000)	(3.497.205.000)
425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	(30.327.280)	(30.327.280)
425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	(220.000)	(220.000)
425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	(57.400.000)	(57.400.000)
425233- Pendapatan Ongkos Perkara	0	(423.278.500)	(423.278.500)
425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	0	(10.377.031.457)	(10.377.031.457)
425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	0	(2.351.790.000)	(2.351.790.000)
425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	0	(3.055.511.690)	(3.055.511.690)
425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	(879.802.200)	(879.802.200)
425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(512.180.000)	(512.180.000)
425242- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(73.000.000)	(73.000.000)
425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(17.024.481.649)	(17.024.481.649)
425244- Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	0	(503.765.903)	(503.765.903)
425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	(1.600.010.000)	(1.600.010.000)
425247- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	0	(737.500.000)	(737.500.000)
425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(677.383.382)	(677.383.382)
425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(20.300.000)	(20.300.000)
425259- Pendapatan Perizinan Lainnya	0	(6.664.131.637)	(6.664.131.637)
425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(9.364.110.000)	(9.364.110.000)
425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(8.110.810.000)	(8.110.810.000)
425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	0	(41.876.200.000)	(41.876.200.000)
425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor Kendaraan Bermotor (TCKB)	0	(327.560.000)	(327.560.000)
425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	0	(58.025.839.961)	(58.025.839.961)
425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	0	(23.851.237.060)	(23.851.237.060)
425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	0	(677.550.000)	(677.550.000)
425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	0	(1.137.650.000)	(1.137.650.000)
425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	0	(1.760.000.000)	(1.760.000.000)
425271- Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	0	(1.475.600.000)	(1.475.600.000)
425272- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	0	(1.475.600.000)	(1.475.600.000)
425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	0	(4.211.295.000)	(4.211.295.000)
425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	0	(5.828.300.000)	(5.828.300.000)
425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	0	(686.560.000)	(686.560.000)

425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	0	(9.528.703.000)	(9.528.703.000)
425283- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	0	(3.396.044.250)	(3.396.044.250)
425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	(827.713.729)	(827.713.729)
425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	0	(9.643.193.567)	(9.643.193.567)
425312- Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	0	(31.972.162.890)	(31.972.162.890)
425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	(2.756.081.068)	(2.756.081.068)
425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	(1.729.210.000)	(1.729.210.000)
425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	(1.602.595.000)	(1.602.595.000)
425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	0	(112.082.112)	(112.082.112)
425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	(3.540.639.660)	(3.540.639.660)
425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	(109.420.000)	(109.420.000)
425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan	0	(57.174.456.307)	(57.174.456.307)
425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	(6.668.400.000)	(6.668.400.000)
425359- Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	0	(995.335.000)	(995.335.000)
425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	(276.375.000)	(276.375.000)
425412- Pendapatan Biaya Pendidikan	0	(54.024.707.167)	(54.024.707.167)
425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	(270.533.333)	(270.533.333)
425421- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	(7.279.882.100)	(7.279.882.100)
425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	(1.700.000)	(1.700.000)
425432- Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	(3.644.703.000)	(3.644.703.000)
425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	0	(183.110.000)	(183.110.000)
425437- Pendapatan Penelitian, Survei dan Pengambilan Sampel Bidang Kehutanan	0	(73.971.750)	(73.971.750)
425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	(68.000.000)	(68.000.000)
425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	(28.403.528.877)	(28.403.528.877)
425514- Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	0	(10.291.495.660)	(10.291.495.660)
425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	(7.536.034.800)	(7.536.034.800)
425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	(4.308.567.446)	(4.308.567.446)
425517- Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran	0	(1.943.486.875)	(1.943.486.875)
425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	0	(14.558.983.755)	(14.558.983.755)
425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	(2.865.095.001)	(2.865.095.001)
425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	0	(419.542.000)	(419.542.000)
425533- Pendapatan Jasa Siaran LPP TVRI	0	(3.700.000)	(3.700.000)
425611- Pendapatan Wisata Alam	0	(532.455.000)	(532.455.000)
425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(354.183.325)	(354.183.325)
425619- Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	0	(402.709.000)	(402.709.000)
425621- Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0	(1.054.361.531)	(1.054.361.531)
425629- Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan Lainnya	0	(1.176.583.035)	(1.176.583.035)
425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	(2.006.550)	(2.006.550)
425692- Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	(182.620.000)	(182.620.000)
425699- Pendapatan Jasa Lainnya	0	(2.176.708.300)	(2.176.708.300)
425719- Pendapatan Bunga Lainnya	0	(82.701)	(82.701)
425761- Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	(3.672.124)	(3.672.124)
425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	(9.581.612)	(9.581.612)
425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	(5.750.000)	(5.750.000)
425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	(6.735.040.549)	(6.735.040.549)
425783- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	(4.777.314.169)	(4.777.314.169)
425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	(2.755.198.544)	(2.755.198.544)
425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	(35.341.894)	(35.341.894)
425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	(75.248.709)	(75.248.709)
425793- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	0	(55.662.636)	(55.662.636)

Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga			
425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	(14.523.687.278)	(14.523.687.278)
425839- Pendapatan Denda Lainnya	0	(232.785.031)	(232.785.031)
425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(566.700.136)	(566.700.136)
425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(3.930.500.208)	(3.930.500.208)
425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(3.259.263.733)	(3.259.263.733)
425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(40.737.414.544)	(40.737.414.544)
425931- Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	(103.110.300)	(103.110.300)
425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	(90.340.964)	(90.340.964)
491315- Pendapatan Penyesuaian Konsesi Jasa	0	(27.100.896.823)	(27.100.896.823)
491421- Pendapatan Sitaan/Rampasan	0	(28.914.743.446)	(28.914.743.446)
491429- Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	(7.627.335.814)	(7.627.335.814)
491511- Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	(242.839.090)	(242.839.090)
499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	0	(20.120.463.243.736)	(20.120.463.243.736)
511111- Belanja Gaji Pokok PNS	0	661.231.187.348	661.231.187.348
511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	9.082.435	9.082.435
511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	44.573.144.838	44.573.144.838
511122- Belanja Tunj. Anak PNS	0	13.023.323.219	13.023.323.219
511123- Belanja Tunj. Struktural PNS	0	8.964.675.527	8.964.675.527
511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	73.141.368.233	73.141.368.233
511125- Belanja Tunj. PPh PNS	0	12.201.705.921	12.201.705.921
511126- Belanja Tunj. Beras PNS	0	33.755.057.970	33.755.057.970
511129- Belanja Uang Makan PNS	0	112.736.762.257	112.736.762.257
511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	121.852.300	121.852.300
511135- Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	1.625.000	1.625.000
511137- Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	0	109.400.000	109.400.000
511139- Belanja Tunjangan SAR PNS	0	1.175.200.000	1.175.200.000
511151- Belanja Tunjangan Umum PNS	0	10.763.249.759	10.763.249.759
511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru	0	286.837.297.508	286.837.297.508
511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	68.909.982.417	68.909.982.417
511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0	10.554.572.200	10.554.572.200
511155- Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	0	6.000.000	6.000.000
511157- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	0	2.932.200.000	2.932.200.000
511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	4.774.395.000	4.774.395.000
511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	0	34.075.535.058	34.075.535.058
511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	483.681	483.681
511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	0	1.883.945.816	1.883.945.816
511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	0	515.348.422	515.348.422
511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	0	1.319.680.000	1.319.680.000
511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	0	246.510.000	246.510.000
511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	0	199.102.914	199.102.914
511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	1.644.064.386	1.644.064.386
511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	0	5.956.805.700	5.956.805.700
511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	0	4.675.000	4.675.000
511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	1.260.274.500	1.260.274.500
511196- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI	0	43.594.800	43.594.800
511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	1.010.228.351.622	1.010.228.351.622
511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	16.420.956	16.420.956
511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	62.741.243.358	62.741.243.358
511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	0	18.655.338.495	18.655.338.495
511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	40.947.990.000	40.947.990.000
511224- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	1.118.275.000	1.118.275.000
511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	0	10.522.163.754	10.522.163.754
511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	0	81.160.691.391	81.160.691.391
511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	0	558.607.735.000	558.607.735.000
511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	0	508.060.000	508.060.000
511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	0	2.172.150.000	2.172.150.000
511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	0	3.037.110.000	3.037.110.000
511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	0	486.480.000	486.480.000

511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	1.625.528.000	1.625.528.000
511237- Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI	0	183.900.000	183.900.000
511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI	0	4.241.685.000	4.241.685.000
511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI	0	28.948.267.150	28.948.267.150
511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	0	21.432.769.700	21.432.769.700
511245- Belanja Santunan Cacat TNI	0	43.358.800	43.358.800
511246- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/Perbatasan POLRI	0	10.982.937.093	10.982.937.093
511324- Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	10.349.913.679	10.349.913.679
511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	22.959.525.431	22.959.525.431
511339- Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	57.627.555.000	57.627.555.000
511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	1.190.116.055	1.190.116.055
511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	354.058.078	354.058.078
511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0	154.350.000	154.350.000
511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	48.612.937.635	48.612.937.635
511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	0	9.690.000.000	9.690.000.000
511529- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS	0	702.500.000	702.500.000
511611- Belanja Gaji Pokok PPPK	0	144.854.527.885	144.854.527.885
511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	2.442.357	2.442.357
511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	9.028.970.773	9.028.970.773
511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2.660.575.936	2.660.575.936
511623- Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	54.829.000	54.829.000
511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	11.305.375.061	11.305.375.061
511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	8.885.517.190	8.885.517.190
511628- Belanja Uang Makan PPPK	0	30.459.878.708	30.459.878.708
511633- Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	2.473.938.748	2.473.938.748
512211- Belanja Uang Lembur	0	18.069.649.670	18.069.649.670
512212- Belanja Uang Lembur PPPK	0	1.395.891.000	1.395.891.000
512411- Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	867.576.505.720	867.576.505.720
512414- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	114.644.987.695	114.644.987.695
521111- Belanja Keperluan Perkantoran	0	190.679.229.921	190.679.229.921
521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	113.081.640.625	113.081.640.625
521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	4.160.645.661	4.160.645.661
521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1.243.606.650	1.243.606.650
521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	53.579.093.787	53.579.093.787
521119- Belanja Barang Operasional Lainnya	0	229.883.394.992	229.883.394.992
521211- Belanja Bahan	0	121.598.340.636	121.598.340.636
521213- Belanja Honor Output Kegiatan	0	80.093.935.809	80.093.935.809
521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	217.676.986.093	217.676.986.093
521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	949.500.000	949.500.000
521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	4.896.890.000	4.896.890.000
521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	4.545.502.800	4.545.502.800
521253- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	455.883.769	455.883.769
522111- Belanja Langganan Listrik	0	61.714.644.605	61.714.644.605
522112- Belanja Langganan Telepon	0	2.486.274.482	2.486.274.482
522113- Belanja Langganan Air	0	8.878.857.516	8.878.857.516
522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	9.336.150.728	9.336.150.728
522121- Belanja Jasa Pos dan Giro	0	256.627.209	256.627.209
522131- Belanja Jasa Konsultan	0	41.281.224.402	41.281.224.402
522141- Belanja Sewa	0	51.405.911.408	51.405.911.408
522151- Belanja Jasa Profesi	0	14.663.141.004	14.663.141.004
522191- Belanja Jasa Lainnya	0	67.125.647.396	67.125.647.396
523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	132.881.788.668	132.881.788.668
523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	2.130.884.914	2.130.884.914
523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	119.504.009.664	119.504.009.664
523122- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	485.760.829	485.760.829
523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	688.069.986	688.069.986
523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	190.638.962.187	190.638.962.187
523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	83.273.352.567	83.273.352.567
523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	1.834.703.741	1.834.703.741
523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	9.255.738.902	9.255.738.902
524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	169.045.774.383	169.045.774.383
524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	971.385.294	971.385.294
524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	27.601.178.925	27.601.178.925

524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	31.943.787.024	31.943.787.024
524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	21.417.796.999	21.417.796.999
524211- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	70.659.025	70.659.025
525111- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	205.763.925.426	205.763.925.426
525112- Belanja Barang	0	59.180.702.173	59.180.702.173
525113- Belanja Jasa	0	73.016.072.171	73.016.072.171
525114- Belanja Pemeliharaan	0	11.921.724.274	11.921.724.274
525115- Belanja Perjalanan	0	6.442.077.687	6.442.077.687
525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	125.375.210.254	125.375.210.254
525141- Belanja Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	27.500.000	27.500.000
525142- Belanja Barang BLU kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	0	155.058.302	155.058.302
525162- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	922.632.314	922.632.314
526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	282.000.000	282.000.000
526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	863.250.000	863.250.000
526124- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	186.810.000.000	186.810.000.000
526311- Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	(75.390.056)	(75.390.056)
526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	202.768.389.949	202.768.389.949
573112- Belanja Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial Dalam Bentuk Barang	0	32.000.000	32.000.000
574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	17.469.442.000	17.469.442.000
591111- Belanja Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1.003.486.657.872	1.003.486.657.872
591211- Belanja Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	281.721.968.833	281.721.968.833
591311- Belanja Penyusutan Jalan dan Jembatan	0	1.447.112.138.633	1.447.112.138.633
591312- Belanja Penyusutan Irigasi	0	598.227.523.475	598.227.523.475
591313- Belanja Penyusutan Jaringan	0	4.098.251.333	4.098.251.333
591411- Belanja Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	192.588.600	192.588.600
591511- Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Pemerintah	0	141.220.704	141.220.704
591521- Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa Partisipasi Mitra	0	52.670.929.404	52.670.929.404
591611- Beban Penyusutan Properti Investasi	0	98.500.881	98.500.881
592114- Belanja Amortisasi Paten	0	1.635.000	1.635.000
592115- Belanja Amortisasi Software	0	16.135.341.997	16.135.341.997
592116- Belanja Amortisasi Lisensi	0	11.500.565.724	11.500.565.724
592117- Belanja Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	0	4.661.257.644	4.661.257.644
592221- Belanja Penyusutan Aset Lain-lain	0	239.414.732	239.414.732
592222- Belanja Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	12.975.397.427	12.975.397.427
593111- Belanja Persediaan konsumsi	0	480.942.059.536	480.942.059.536
593112- Belanja Persediaan amunisi	0	48.379.601.523	48.379.601.523
593113- Belanja Persediaan bahan untuk pemeliharaan	0	6.159.887.363	6.159.887.363
593114- Belanja Persediaan suku cadang	0	105.178.157.116	105.178.157.116
593121- Belanja Persediaan pita cukai, materai dan leges	0	1.299.998.050	1.299.998.050
593122- Belanja Persediaan tanah bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	69.658.030.352	69.658.030.352
593123- Belanja Persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	4.297.508.185	4.297.508.185
593124- Belanja Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	0	6.882.803.116	6.882.803.116
593125- Belanja persediaan Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	174.485.497.745	174.485.497.745
593126- Belanja Persediaan Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	9.889.378.880	9.889.378.880
593127- Belanja Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	0	1.366.233.691	1.366.233.691
593128- Belanja Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	0	38.206.246.853	38.206.246.853
593131- Belanja Persediaan bahan baku	0	11.565.183.312	11.565.183.312
593141- Belanja Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga	0	35.628.000	35.628.000
593149- Belanja persediaan lainnya	0	49.807.334.109	49.807.334.109

593311- Belanja Penyesuaian Nilai Persediaan	0	3.189.590.459	3.189.590.459
594112- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPh Non Migas	0	14.358.428.437	14.358.428.437
594113- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PPN	0	30.335.521.864	30.335.521.864
594115- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PBB dan BPHTB	0	(6.876.693.335)	(6.876.693.335)
594117- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Lainnya	0	22.390.445.567	22.390.445.567
594118- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Pajak Perdagangan Internasional	0	10.051.765	10.051.765
594211- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0	39.886.162.889	39.886.162.889
594212- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	(2.927.295)	(2.927.295)
594421- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi BLU	0	324.249	324.249
594611- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Kesehatan	0	54.541.335	54.541.335
594612- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pelayanan Pendidikan	0	89.258.500	89.258.500
594619- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya	0	4.216.280	4.216.280
594641- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	0	7	7
594931- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	0	(1.414.100)	(1.414.100)
594991- Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Piutang Jangka Panjang Lainnya	0	(162.789)	(162.789)
595112- Belanja Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	22.889.014	22.889.014
596111- Beban Pelepasan Aset	0	5.424.026.382	5.424.026.382
596121- Belanja Persediaan Rusak/Usang	0	3.525.494.486	3.525.494.486
596211- Belanja Kerugian Selisih Kurs Belum Terealisasi	0	22.489.384	22.489.384
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	181.819.580.500	181.819.580.500
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	11.727.346.200	11.727.346.200
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	52.416.763.700	52.416.763.700
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	300.310.408.500	300.310.408.500
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	31.657.415.000	31.657.415.000
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	446.496.229.000	446.496.229.000
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	751.269.000	751.269.000
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	30.276.922.600	30.276.922.600
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	19.979.047.000	19.979.047.000
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	19.282.857.000	19.282.857.000
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	111.668.030.000	111.668.030.000
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	1.763.468.000	1.763.468.000
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	10.507.962.953.000	10.507.962.953.000
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	294.855.878.401	294.855.878.401
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	18.900.000.000	18.900.000.000
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	1.206.955.054.000	1.206.955.054.000
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	803.727.205.000	803.727.205.000
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	148.578.138.000	148.578.138.000
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	765.716.342.948	765.716.342.948
643111- Insentif Fiskal	0	51.953.825.000	51.953.825.000
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	1.389.145.439.600	1.389.145.439.600
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	240.660.699.700	240.660.699.700
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	18.102.250.000	18.102.250.000
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	1.319.100.936.388	1.319.100.936.388

654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	341.571.049.711	341.571.049.711
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	69.838.308.000	69.838.308.000
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	27.754.100.000	27.754.100.000
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	68.790.099.400	68.790.099.400
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	25.219.650.000	25.219.650.000
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	4.341.863.000	4.341.863.000
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	1.943.583.000	1.943.583.000
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	6.171.342.000	6.171.342.000
655611- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0	5.305.434.000	5.305.434.000
662111- Belanja Dana Desa	0	1.595.719.756.088	1.595.719.756.088
8110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO	0	(717.428.700.359)	(717.428.700.359)
8110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO	0	(709.307.327.000)	(709.307.327.000)
8110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO	0	(813.732.932.159)	(813.732.932.159)
8110400- Pajak Air Permukaan - LO	0	(27.863.337.144)	(27.863.337.144)
8110500- Pajak Rokok - LO	0	(440.708.157.924)	(440.708.157.924)
8110600- Pajak Hotel - LO	0	(47.263.963.761)	(47.263.963.761)
8110700- Pajak Restoran - LO	0	(164.510.297.933)	(164.510.297.933)
8110800- Pajak Hiburan - LO	0	(29.713.873.989)	(29.713.873.989)
8110900- Pajak Reklame - LO	0	(32.101.334.006)	(32.101.334.006)
8111000- Pajak Penerangan Jalan - LO	0	(291.795.809.804)	(291.795.809.804)
8111100- Pajak Parkir - LO	0	(9.614.705.384)	(9.614.705.384)
8111200- Pajak Air Tanah - LO	0	(6.402.301.936)	(6.402.301.936)
8111300- Pajak Sarang Burung Walet - LO	0	(384.820.341)	(384.820.341)
8111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	0	(48.586.951.841)	(48.586.951.841)
8111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO	0	(114.706.411.713)	(114.706.411.713)
8111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO	0	(237.807.477.693)	(237.807.477.693)
8120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO	0	(830.484.498.675)	(830.484.498.675)
8120200- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO	0	(34.442.398.678)	(34.442.398.678)
8120500- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	0	(3.980.735.333)	(3.980.735.333)
8120600- Retribusi Pelayanan Pasar - LO	0	(7.831.916.074)	(7.831.916.074)
8121000- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	0	(49.076.000)	(49.076.000)
8121500- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	0	(12.228.631.418)	(12.228.631.418)
8121600- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO	0	(783.780.826)	(783.780.826)
8121700- Retribusi Tempat Pelelangan - LO	0	(53.080.000)	(53.080.000)
8121800- Retribusi Terminal - LO	0	(62.250.000)	(62.250.000)
8121900- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO	0	(997.092.500)	(997.092.500)
8122000- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO	0	(1.623.262.590)	(1.623.262.590)
8122100- Retribusi Rumah Potong Hewan - LO	0	(1.263.220.000)	(1.263.220.000)
8122200- Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO	0	(3.214.829.271)	(3.214.829.271)
8122300- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO	0	(4.191.051.000)	(4.191.051.000)
8122400- Retribusi Penyebrangan Air - LO	0	(26.851.125)	(26.851.125)
8122500- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO	0	(1.860.004.960)	(1.860.004.960)
8122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	0	(32.326.197.394)	(32.326.197.394)
8123200- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO	0	(3.599.105.286)	(3.599.105.286)
8130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	0	(262.970.454.331)	(262.970.454.331)
8140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO	0	(5.445.318.917)	(5.445.318.917)
8140300- Penerimaan Jasa Giro - LO	0	(42.058.104.025)	(42.058.104.025)
8140400- Pendapatan Bunga - LO	0	(23.242.782.963)	(23.242.782.963)
8140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO	0	(1.620.838.502)	(1.620.838.502)
8140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO	0	(129.067.248.016)	(129.067.248.016)
8140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO	0	(3.157.907.653)	(3.157.907.653)
8140800- Pendapatan Denda Pajak - LO	0	(17.049.381.340)	(17.049.381.340)

8140900- Pendapatan Denda Retribusi - LO	0	(24.513.518)	(24.513.518)
8141000- Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO	0	(443.221.010)	(443.221.010)
8141100- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	0	(57.947.895.092)	(57.947.895.092)
8141300- Pendapatan dari Pengembalian -LO	0	(106.886.771.594)	(106.886.771.594)
8141800- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO	0	(2.090.170.277)	(2.090.170.277)
8142000- Pendapatan BLUD - LO	0	(195.137.568.392)	(195.137.568.392)
8142100- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	0	(15.967.523)	(15.967.523)
8210100- Bagi Hasil Pajak - LO	0	(372.236.085.594)	(372.236.085.594)
8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0	(726.635.831.711)	(726.635.831.711)
8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0	(11.814.844.690.426)	(11.814.844.690.426)
8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0	(2.978.173.004.657)	(2.978.173.004.657)
8220400- Dana Insentif Daerah (DID)	0	(48.430.647.000)	(48.430.647.000)
8310300- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	0	(2.130.150.000)	(2.130.150.000)
8310400- Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO	0	(866.559.024)	(866.559.024)
8330100- Pendapatan Lainnya - LO	0	(58.726.951.219)	(58.726.951.219)
9110100- Beban Gaji dan Tunjangan - LO	0	6.067.354.695.952	6.067.354.695.952
9110200- Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO	0	2.647.699.657.633	2.647.699.657.633
9110300- Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO	0	340.341.839.358	340.341.839.358
9120100- Beban Bahan Pakai Habis	0	1.619.282.881.775	1.619.282.881.775
9120200- Beban Persediaan Bahan/ Material	0	425.199.469.641	425.199.469.641
9120300- Beban Jasa Kantor	0	1.062.734.640.472	1.062.734.640.472
9120400- Beban Premi Asuransi	0	416.542.706.247	416.542.706.247
9120700- Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	19.804.118.769	19.804.118.769
9120800- Beban Sewa Sarana Mobilitas	0	212.353.993	212.353.993
9120900- Beban Sewa Alat Berat	0	59.437.079.895	59.437.079.895
9121000- Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	2.903.403.068	2.903.403.068
9121500- Beban Perjalanan Dinas	0	495.391.431.974	495.391.431.974
9121800- Beban Pemeliharaan	0	371.928.500.610	371.928.500.610
9121900- Beban Jasa Konsultasi	0	104.391.695.528	104.391.695.528
9122000- Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	241.630.468.340	241.630.468.340
9122200- Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0	3.728.381.141	3.728.381.141
9122300- Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0	48.418.365.862	48.418.365.862
9122600- Honorarium Non PNS	0	3.101.967.516	3.101.967.516
9123000- Beban Jasa Pihak Ketiga	0	5.647.032.680	5.647.032.680
9123100- Beban Barang dan Jasa BLUD	0	760.176.944.820	760.176.944.820
9123200- Beban Barang dan Jasa dana BOS	0	449.223.155.580	449.223.155.580
9130100- Bunga Utang Pinjaman	0	10.815.708.803	10.815.708.803
9140100- Beban Subsidi	0	364.617.500	364.617.500
9150100- Beban Hibah kepada Pemerintah	0	17.381.946.858	17.381.946.858
9150400- Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0	26.309.857.239	26.309.857.239
9150500- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	347.459.819.373	347.459.819.373
9150600- Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***	0	126.442.124.669	126.442.124.669
9160100- Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	1.414.282.000	1.414.282.000
9160200- Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0	13.210.155.121	13.210.155.121
9170100- Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	940813597588,8339	940813597588,8339
9170200- Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	688275535623,482	688275535623,482
9170300- Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	2561441331729,504	2561441331729,504
9210100- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	355.136.499.602	355.136.499.602
9220100- Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	5.991.547.543	5.991.547.543
9230100- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi	0	1.500.000.000	1.500.000.000
9230200- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	0	8.351.783.366	8.351.783.366
9240100- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	2.174.639.497.335	2.174.639.497.335
9910100- Surplus/Defisit Laporan Operasional Pemerintah Daerah	0	-944550648303,82005	-944550648303,82005
Jumlah	0	- 66405931160368,3402 598	- 66405931160368,340259 8

LAMPIRAN II
NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
111611- Kas di Bendahara Pengeluaran	0	14.129.776	14.129.776
111613- Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	19.562.000	28.318.520	47.880.520
111822- Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari Hibah	283.882.816.592	(283.882.816.592)	0
111911- Kas dan Bank - BLU	212.737.597.713	12.437.669.507	225.175.267.220
311911- Ekuitas Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung	33.841.452.221	216.268.742.528	250.110.194.749
313111- Ditagihkan ke Entitas Lain	(110.769.283.048.349)	(30.269.651.833.042)	(141.038.934.881.391)
313121- Diterima dari Entitas Lain	58.884.117.398.943	13.222.988.047.094	72.107.105.446.037
391111- Ekuitas	51.353.705.314.517	20.226.198.818.736	71.579.904.133.253
399911- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Akrual dari Kas BP KL	(19.562.000)	(42.448.296)	(62.010.296)
399918- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari Koreksi Kas KPPN	15.308	0	15.308
399919- Ekuitas Konsolidasi BUN pada Ledger Kas dari Koreksi Kas BLU	998.453.055	0	998.453.055
4110100- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA	0	(717.428.700.359)	(717.428.700.359)
4110200- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA	0	(709.307.327.000)	(709.307.327.000)
4110300- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	0	(813.732.932.159)	(813.732.932.159)
4110400- Pajak Air Permukaan - LRA	0	(27.863.337.144)	(27.863.337.144)
4110500- Pajak Rokok - LRA	0	(440.708.157.924)	(440.708.157.924)
4110600- Pajak Hotel - LRA	0	(47.263.963.761)	(47.263.963.761)
4110700- Pajak Restoran - LRA	0	(164.510.297.933)	(164.510.297.933)
4110800- Pajak Hiburan - LRA	0	(29.713.873.989)	(29.713.873.989)
4110900- Pajak Reklame - LRA	0	(32.101.334.006)	(32.101.334.006)
4111000- Pajak Penerangan Jalan - LRA	0	(291.795.809.804)	(291.795.809.804)
4111100- Pajak Parkir - LRA	0	(9.614.705.384)	(9.614.705.384)
411111- Pendapatan PPh Minyak Bumi	0	(1.335.835.100)	(1.335.835.100)
411119- Pendapatan PPh Migas Lainnya	0	(9.856.819)	(9.856.819)
4111200- Pajak Air Tanah - LRA	0	(6.402.301.936)	(6.402.301.936)
411121- Pendapatan PPh Pasal 21	0	(804.986.212.406)	(804.986.212.406)
411122- Pendapatan PPh Pasal 22	0	(116.941.088.278)	(116.941.088.278)
411123- Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	0	534.174	534.174
411124- Pendapatan PPh Pasal 23	0	(266.810.147.587)	(266.810.147.587)
411125- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	0	(201.956.670.139)	(201.956.670.139)
411126- Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	0	(1.577.984.188.840)	(1.577.984.188.840)
411127- Pendapatan PPh Pasal 26	0	(84.018.768.868)	(84.018.768.868)
411128- Pendapatan PPh Final	0	(622.420.508.576)	(622.420.508.576)
411129- Pendapatan PPh Non Migas Lainnya	0	(344.283.359)	(344.283.359)
4111300- Pajak Sarang Burung Walet - LRA	0	(384.820.341)	(384.820.341)
4111400- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA	0	(48.586.951.841)	(48.586.951.841)
4111500- Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	0	(114.706.411.713)	(114.706.411.713)
4111600- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	0	(237.807.477.693)	(237.807.477.693)
411211- Pendapatan PPN Dalam Negeri	0	(6.186.693.578.307)	(6.186.693.578.307)
411212- Pendapatan PPN Impor	0	(25.710.744.841)	(25.710.744.841)
411219- Pendapatan PPN Lainnya	0	(16.993.812.082)	(16.993.812.082)
411221- Pendapatan PPnBM Dalam Negeri	0	(31.443.035.931)	(31.443.035.931)
411222- Pendapatan PPnBM Impor	0	(214.115.137)	(214.115.137)
411229- Pendapatan PPnBM Lainnya	0	(1.781.099.509)	(1.781.099.509)
411313- Pendapatan PBB Perkebunan	0	(126.187.365.511)	(126.187.365.511)
411314- Pendapatan PBB Perhutanan	0	(30.048.998.695)	(30.048.998.695)
411315- Pendapatan PBB Pertambangan Mineral dan Batubara	0	(9.865.438.271)	(9.865.438.271)
411319- Pendapatan PBB Lainnya	0	(352.274.923)	(352.274.923)
411511- Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	0	(245.100.623.000)	(245.100.623.000)
411514- Pendapatan Denda Administrasi Cukai	0	(2.194.786.000)	(2.194.786.000)
411611- Pendapatan Bea Meterai	0	(20.354.314)	(20.354.314)
411612- Pendapatan dari Penjualan Benda Meterai	0	(22.869.578)	(22.869.578)
411613- Pendapatan PPn Batubara	0	(286.000)	(286.000)
411618- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya Deposit	0	(858.196.811.069)	(858.196.811.069)
411619- Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya	0	(3.054.800.416)	(3.054.800.416)
411621- Pendapatan Bunga Penagihan PPh	0	(2.072.701.821)	(2.072.701.821)
411622- Pendapatan Bunga Penagihan PPN	0	(3.690.703.888)	(3.690.703.888)

411659- Pendapatan Denda Penagihan Pajak Lainnya	0	(2.271.221.984)	(2.271.221.984)
4120100- Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	0	(830.484.498.675)	(830.484.498.675)
4120200- Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	0	(34.442.398.678)	(34.442.398.678)
4120500- Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	0	(3.980.735.333)	(3.980.735.333)
4120600- Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	0	(7.831.916.074)	(7.831.916.074)
4121000- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	0	(49.076.000)	(49.076.000)
412111- Pendapatan Bea Masuk	0	(66.373.264.000)	(66.373.264.000)
412113- Pendapatan Denda Administrasi Pabean	0	(1.953.297.000)	(1.953.297.000)
412121- Pendapatan Bea Masuk Antidumping	0	(124.000)	(124.000)
412123- Pendapatan Bea Masuk Tindakan Pengamanan	0	(464.589.000)	(464.589.000)
4121500- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	0	(12.228.631.418)	(12.228.631.418)
4121600- Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA	0	(783.780.826)	(783.780.826)
4121700- Retribusi Tempat Pelelangan - LRA	0	(53.080.000)	(53.080.000)
4121800- Retribusi Terminal - LRA	0	(62.250.000)	(62.250.000)
4121900- Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	0	(997.092.500)	(997.092.500)
4122000- Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA	0	(1.623.262.590)	(1.623.262.590)
4122100- Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	0	(1.263.220.000)	(1.263.220.000)
412211- Pendapatan Bea Keluar	0	(348.248.840.000)	(348.248.840.000)
412213- Pendapatan Bunga Bea Keluar	0	(105.019.000)	(105.019.000)
4122200- Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA	0	(3.214.829.271)	(3.214.829.271)
4122300- Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	0	(4.191.051.000)	(4.191.051.000)
4122400- Retribusi Penyeberangan Air - LRA	0	(26.851.125)	(26.851.125)
4122500- Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA	0	(1.860.004.960)	(1.860.004.960)
4122600- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA	0	(32.326.197.394)	(32.326.197.394)
4123200- Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA	0	(3.599.105.286)	(3.599.105.286)
4130100- Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA	0	(262.970.454.331)	(262.970.454.331)
4140100- Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA	0	(5.445.318.917)	(5.445.318.917)
4140300- Penerimaan Jasa Giro - LRA	0	(42.058.104.025)	(42.058.104.025)
4140400- Pendapatan Bunga - LRA	0	(23.242.782.963)	(23.242.782.963)
4140500- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	0	(1.620.838.502)	(1.620.838.502)
4140600- Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA	0	(129.067.248.016)	(129.067.248.016)
4140700- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0	(3.157.907.653)	(3.157.907.653)
4140800- Pendapatan Denda Pajak - LRA	0	(17.049.381.340)	(17.049.381.340)
4140900- Pendapatan Denda Retribusi - LRA	0	(24.513.518)	(24.513.518)
4141000- Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA	0	(443.221.010)	(443.221.010)
4141100- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA	0	(57.947.895.092)	(57.947.895.092)
4141300- Pendapatan dari Pengembalian	0	(106.886.771.594)	(106.886.771.594)
4141600- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA	0	(2.090.170.277)	(2.090.170.277)
4141800- Pendapatan BLUD - LRA	0	(195.137.568.392)	(195.137.568.392)
4141900- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0	(15.967.523)	(15.967.523)
4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA	0	(372.236.085.594)	(372.236.085.594)
4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0	(726.635.831.711)	(726.635.831.711)
4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0	(11.814.844.690.426)	(11.814.844.690.426)
4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0	(2.978.173.004.657)	(2.978.173.004.657)
4220400- Dana Insentif Daerah	0	(48.430.647.000)	(48.430.647.000)
4220500- Dana Desa	0	(1.322.934.345.472)	(1.322.934.345.472)
424111- Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	0	(128.556.842.055)	(128.556.842.055)
424112- Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	0	(359.434.869.635)	(359.434.869.635)
424119- Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	0	(8.009.465.000)	(8.009.465.000)
424212- Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	(33.500.000)	(33.500.000)
424213- Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri-Pemda - Uang	0	(14.999.602.608)	(14.999.602.608)
424215- Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Uang	0	(258.766.368)	(258.766.368)
424311- Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan	0	(319.684.400)	(319.684.400)
424312- Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan	0	(14.652.994.949)	(14.652.994.949)

Usaha			
424313- Pendapatan Hasil Kerja Sama Pemerintah Daerah	0	(42.104.789.976)	(42.104.789.976)
424421- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	(3.004.264.685)	(3.004.264.685)
424422- Pendapatan dari Pelayanan BLU yang Bersumber dari Entitas Pemerintah Pusat di luar Kementerian Negara/Lembaga yang membawahi BLU	0	(6.484.040.762)	(6.484.040.762)
424911- Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	0	(12.033.767.095)	(12.033.767.095)
424915- Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(45.060.562)	(45.060.562)
424917- Pendapatan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan / TGR - BLU	0	(98.235.797)	(98.235.797)
424919- Pendapatan Lain-lain BLU	0	(1.381.844.741)	(1.381.844.741)
424921- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Tanah	0	(1.108.184.768)	(1.108.184.768)
424922- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Gedung	0	(1.375.280.000)	(1.375.280.000)
424923- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Ruang	0	(6.420.208.761)	(6.420.208.761)
424924- Pendapatan BLU Lainnya dari Sewa Peralatan dan Mesin	0	(313.061.080)	(313.061.080)
425112- Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Budidaya	0	(91.498.800)	(91.498.800)
425121- Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(312.890.765)	(312.890.765)
425122- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	(2.228.160.267)	(2.228.160.267)
425129- Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	0	(8.156.881.683)	(8.156.881.683)
425131- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(2.541.990.995)	(2.541.990.995)
425132- Pendapatan Sewa Peralatan dan Mesin	0	(23.345.773)	(23.345.773)
425134- Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	(84.896.955)	(84.896.955)
425151- Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	0	(2.931.968.574)	(2.931.968.574)
425211- Pendapatan Paspor	0	(81.993.300.000)	(81.993.300.000)
425212- Pendapatan Visa	0	(1.149.500.000)	(1.149.500.000)
425213- Pendapatan Izin Keimigrasian dan Izin Masuk Kembali (Re-entry permit)	0	(13.229.750.000)	(13.229.750.000)
425214- Pendapatan Pelayanan Keimigrasian Lainnya	0	(3.497.205.000)	(3.497.205.000)
425219- Pendapatan Pelayanan dan Administrasi Hukum Lainnya	0	(30.327.280)	(30.327.280)
425231- Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	(220.000)	(220.000)
425232- Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	0	(57.400.000)	(57.400.000)
425233- Pendapatan Ongkos Perkara	0	(416.836.500)	(416.836.500)
425236- Pendapatan Penjualan Barang Rampasan/Hasil Sitaan yang telah diputuskan/ditetapkan pengadilan	0	(11.790.943.148)	(11.790.943.148)
425237- Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	0	(1.849.238.000)	(1.849.238.000)
425238- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Lainnya	0	(3.055.511.690)	(3.055.511.690)
425239- Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	(879.802.200)	(879.802.200)
425241- Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(512.180.000)	(512.180.000)
425242- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(73.000.000)	(73.000.000)
425243- Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(2.275.511.151)	(2.275.511.151)
425244- Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Pencucian Uang	0	(503.765.903)	(503.765.903)
425246- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Korupsi	0	(1.600.010.000)	(1.600.010.000)
425247- Pendapatan Denda Hasil Tindak Pidana Pencucian Uang	0	(737.500.000)	(737.500.000)
425249- Pendapatan Uang Sitaan Tindak Pidana Lainnya yang Telah Diputuskan/Ditetapkan Pengadilan	0	(701.250.382)	(701.250.382)
425255- Pendapatan Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(20.300.000)	(20.300.000)
425259- Pendapatan Perizinan Lainnya	0	(7.633.276.602)	(7.633.276.602)
425261- Pendapatan Penerbitan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(9.364.110.000)	(9.364.110.000)
425262- Pendapatan Perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM)	0	(8.110.810.000)	(8.110.810.000)
425263- Pendapatan Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)	0	(41.876.200.000)	(41.876.200.000)
425264- Pendapatan Penerbitan Tanda Coba Nomor	0	(327.560.000)	(327.560.000)

Kendaraan Bermotor (TCKB)			
425265- Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)	0	(57.808.875.000)	(57.808.875.000)
425266- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	0	(23.315.740.000)	(23.315.740.000)
425267- Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi	0	(677.550.000)	(677.550.000)
425268- Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	0	(1.137.650.000)	(1.137.650.000)
425269- Pendapatan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Pilihan	0	(1.760.000.000)	(1.760.000.000)
425271- Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	0	(1.475.600.000)	(1.475.600.000)
425272- Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Lintas Batas Negara	0	(1.475.600.000)	(1.475.600.000)
425273- Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak dan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	0	(4.211.295.000)	(4.211.295.000)
425274- Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	0	(5.828.300.000)	(5.828.300.000)
425275- Pendapatan Pelayanan Satuan Pengaman	0	(686.560.000)	(686.560.000)
425276- Pendapatan Pengamanan Obyek Vital dan Obyek Tertentu	0	(9.528.703.000)	(9.528.703.000)
425283- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi di Bidang Perindustrian	0	(3.259.529.500)	(3.259.529.500)
425289- Pendapatan Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, dan Standardisasi Lainnya	0	(831.015.969)	(831.015.969)
425311- Pendapatan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP).	0	(9.643.193.567)	(9.643.193.567)
425312- Pendapatan dari BPJS Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL)	0	(33.818.499.247)	(33.818.499.247)
425313- Pendapatan Layanan Fasilitas Kesehatan	0	(2.756.081.068)	(2.756.081.068)
425314- Pendapatan Jasa Karantina Kesehatan	0	(1.727.785.000)	(1.727.785.000)
425315- Pendapatan Jasa Pemberian Vaksin Kesehatan	0	(1.602.595.000)	(1.602.595.000)
425321- Pendapatan Jasa Pengawasan Obat dan Makanan	0	(112.082.112)	(112.082.112)
425331- Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	0	(3.542.132.255)	(3.542.132.255)
425332- Pendapatan Jasa Karantina Perikanan	0	(109.420.000)	(109.420.000)
425341- Pendapatan Pelayanan Pertanahan	0	(49.436.435.707)	(49.436.435.707)
425351- Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	0	(6.668.400.000)	(6.668.400.000)
425359- Pendapatan Jasa Pelayanan Keagamaan Lainnya	0	(995.335.000)	(995.335.000)
425411- Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	0	(276.375.000)	(276.375.000)
425412- Pendapatan Biaya Pendidikan	0	(54.668.461.600)	(54.668.461.600)
425419- Pendapatan Pendidikan Lainnya	0	(308.450.000)	(308.450.000)
425421- Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	0	(7.279.882.100)	(7.279.882.100)
425429- Pendapatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Lainnya	0	(1.700.000)	(1.700.000)
425432- Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	(3.644.703.000)	(3.644.703.000)
425433- Pendapatan Layanan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	0	(183.110.000)	(183.110.000)
425437- Pendapatan Penelitian, Survei dan Pengambilan Sampel Bidang Kehutanan	0	(73.971.750)	(73.971.750)
425511- Pendapatan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor	0	(68.000.000)	(68.000.000)
425513- Pendapatan Jasa Kepelabuhanan	0	(28.626.917.193)	(28.626.917.193)
425514- Pendapatan Jasa Sarana Bantu Navigasi Pelayaran	0	(10.291.495.660)	(10.291.495.660)
425515- Pendapatan Jasa Perkapalan dan Kepelautan	0	(7.536.034.800)	(7.536.034.800)
425516- Pendapatan Jasa Kebandarudaraan	0	(4.330.341.018)	(4.330.341.018)
425517- Pendapatan Jasa Navigasi Penerbangan dan Telekomunikasi Pelayaran	0	(1.943.486.875)	(1.943.486.875)
425518- Pendapatan dari Konsesi Bidang Transportasi	0	(15.781.139.198)	(15.781.139.198)
425519- Pendapatan Jasa Transportasi Lainnya	0	(2.865.095.001)	(2.865.095.001)
425531- Pendapatan Jasa Siaran LPP RRI	0	(373.099.800)	(373.099.800)
425611- Pendapatan Wisata Alam	0	(532.455.000)	(532.455.000)
425612- Pendapatan Iuran di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	(354.183.325)	(354.183.325)
425619- Pendapatan Jasa di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lainnya	0	(402.709.000)	(402.709.000)
425621- Pendapatan Jasa Pelabuhan Perikanan	0	(1.057.985.410)	(1.057.985.410)
425629- Pendapatan Jasa Kelautan dan Perikanan	0	(1.176.583.035)	(1.176.583.035)

Lainnya			
425691- Pendapatan Jasa Pengawasan/Pemeriksaan	0	(2.007.190)	(2.007.190)
425692- Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, dan Informasi	0	(182.620.000)	(182.620.000)
425699- Pendapatan Jasa Lainnya	0	(2.177.088.300)	(2.177.088.300)
425719- Pendapatan Bunga Lainnya	0	(82.701)	(82.701)
425761- Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	0	(3.672.124)	(3.672.124)
425764- Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	(9.581.612)	(9.581.612)
425781- Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa	0	(5.750.000)	(5.750.000)
425782- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I	0	(6.744.240.549)	(6.744.240.549)
425783- Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas II	0	(4.779.071.929)	(4.779.071.929)
425784- Pendapatan Bea Lelang Pegadaian	0	(2.755.198.544)	(2.755.198.544)
425785- Pendapatan Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara	0	(35.341.894)	(35.341.894)
425791- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	(141.626.154)	(141.626.154)
425793- Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pihak Lain/Pihak Ketiga	0	(88.220.436)	(88.220.436)
425811- Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	0	(14.499.137.278)	(14.499.137.278)
425839- Pendapatan Denda Lainnya	0	(232.785.031)	(232.785.031)
425911- Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(617.022.417)	(617.022.417)
425912- Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(8.517.330.364)	(8.517.330.364)
425913- Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(86.448.270.398)	(86.448.270.398)
425919- Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(41.061.462.900)	(41.061.462.900)
425931- Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	(103.110.300)	(103.110.300)
425991- Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	(485.860)	(485.860)
425999- Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	109.409.052	109.409.052
4310300- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA	0	(2.130.150.000)	(2.130.150.000)
4310400- Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA	0	(866.559.024)	(866.559.024)
4330100- Pendapatan Lainnya - LRA	0	(58.726.951.219)	(58.726.951.219)
499991- Pendapatan Penyesuaian Dropping Dana Transfer	0	(20.226.198.818.736)	(20.226.198.818.736)
5110100- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	6.067.354.695.952	6.067.354.695.952
5110200- Belanja Tambahan Penghasilan PNS	0	2.443.565.846.432	2.443.565.846.432
5110300- Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	0	340.341.839.358	340.341.839.358
5110900- Belanja Pegawai Dana BLUD	0	204.133.811.201	204.133.811.201
511111- Belanja Gaji Pokok PNS	0	661.040.630.916	661.040.630.916
511119- Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	9.081.432	9.081.432
511121- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	0	44.572.950.556	44.572.950.556
511122- Belanja Tunj. Anak PNS	0	13.023.508.124	13.023.508.124
511123- Belanja Tunj. Struktural PNS	0	8.966.565.527	8.966.565.527
511124- Belanja Tunj. Fungsional PNS	0	73.107.758.660	73.107.758.660
511125- Belanja Tunj. PPh PNS	0	12.187.135.543	12.187.135.543
511126- Belanja Tunj. Beras PNS	0	33.757.809.930	33.757.809.930
511129- Belanja Uang Makan PNS	0	112.644.840.957	112.644.840.957
511134- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja PNS	0	121.852.300	121.852.300
511135- Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	0	1.625.000	1.625.000
511137- Belanja Tunj. Tugas Belajar Tenaga Pengajar Biasa pada PT untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS	0	109.400.000	109.400.000
511139- Belanja Tunjangan SAR PNS	0	1.175.200.000	1.175.200.000
511151- Belanja Tunjangan Umum PNS	0	10.767.619.759	10.767.619.759
511152- Belanja Tunjangan Profesi Guru	0	286.908.474.878	286.908.474.878
511153- Belanja Tunjangan Profesi Dosen	0	71.824.398.635	71.824.398.635
511154- Belanja Tunjangan Kehormatan Profesor	0	11.014.549.800	11.014.549.800
511155- Belanja Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru PNS	0	6.000.000	6.000.000
511157- Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	0	2.933.550.000	2.933.550.000
511158- Belanja Tunjangan Hakim Ad Hoc	0	4.774.395.000	4.774.395.000
511161- Belanja Gaji Pokok PNS TNI/Polri	0	34.075.355.558	34.075.355.558
511169- Belanja Pembulatan Gaji PNS TNI/Polri	0	483.681	483.681

511171- Belanja Tunj. Suami/Istri PNS TNI/Polri	0	1.883.945.816	1.883.945.816
511172- Belanja Tunj. Anak PNS TNI/Polri	0	515.348.422	515.348.422
511173- Belanja Tunj. Struktural PNS TNI/Polri	0	1.319.680.000	1.319.680.000
511174- Belanja Tunj. Fungsional PNS TNI/Polri	0	246.510.000	246.510.000
511175- Belanja Tunj. PPh PNS TNI/Polri	0	199.102.914	199.102.914
511176- Belanja Tunj. Beras PNS TNI/Polri	0	1.644.064.386	1.644.064.386
511179- Belanja Uang Makan PNS TNI/Polri	0	5.922.890.000	5.922.890.000
511191- Belanja Tunjangan Medis PNS TNI/POLRI	0	4.675.000	4.675.000
511193- Belanja Tunjangan Umum PNS TNI/Polri	0	1.260.274.500	1.260.274.500
511196- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau-Pulau Kecil Terluar dan/atau Wilayah Perbatasan bagi PNS POLRI	0	43.594.800	43.594.800
511211- Belanja Gaji Pokok TNI/POLRI	0	1.010.228.351.622	1.010.228.351.622
511219- Belanja Pembulatan Gaji TNI/POLRI	0	16.420.956	16.420.956
511221- Belanja Tunj. Suami/Istri TNI/POLRI	0	62.741.243.358	62.741.243.358
511222- Belanja Tunj. Anak TNI/POLRI	0	18.655.338.495	18.655.338.495
511223- Belanja Tunj. Struktural TNI/POLRI	0	40.947.990.000	40.947.990.000
511224- Belanja Tunj. Fungsional TNI/POLRI	0	1.118.275.000	1.118.275.000
511225- Belanja Tunj. PPh TNI/POLRI	0	10.522.163.754	10.522.163.754
511226- Belanja Tunj. Beras TNI/POLRI	0	81.160.691.391	81.160.691.391
511228- Belanja Tunj. Lauk pauk TNI/POLRI	0	558.607.735.000	558.607.735.000
511232- Belanja Tunj. Kowan/Polwan TNI TNI/POLRI	0	508.060.000	508.060.000
511233- Belanja Tunj. Babinkamtibmas TNI/POLRI	0	2.172.150.000	2.172.150.000
511234- Belanja Tunj. Khusus Papua untuk TNI/POLRI	0	3.037.110.000	3.037.110.000
511235- Belanja Tunj. Kompensasi Kerja Bidang Persandian TNI/POLRI	0	486.480.000	486.480.000
511236- Belanja Tunj. Brevet TNI/POLRI	0	1.625.528.000	1.625.528.000
511237- Belanja Tunj. Keahlian/Keterampilan TNI/POLRI	0	183.900.000	183.900.000
511238- Belanja Tunj. Keterampilan Khusus TNI/POLRI	0	4.241.685.000	4.241.685.000
511239- Belanja Tunjangan Operasi Pengamanan pada Pulau Terluar dan Wilayah Perbatasan TNI	0	28.948.267.150	28.948.267.150
511244- Belanja Tunjangan Umum TNI/Polri	0	21.432.769.700	21.432.769.700
511245- Belanja Santunan Cacat TNI	0	43.358.800	43.358.800
511246- Belanja Tunjangan Khusus Wilayah Pulau Kecil Terluar/Perbatasan POLRI	0	10.982.937.093	10.982.937.093
511324- Belanja Tunj. PPh Pejabat Negara	0	9.374.569.108	9.374.569.108
511332- Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	0	22.959.525.431	22.959.525.431
511339- Belanja Tunjangan Penghasilan Pejabat Negara	0	54.311.855.000	54.311.855.000
511511- Belanja Gaji Pokok Pegawai Non PNS	0	1.190.116.055	1.190.116.055
511512- Belanja Tunjangan Pegawai Non PNS	0	354.058.078	354.058.078
511519- Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0	154.350.000	154.350.000
511521- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS	0	48.624.187.635	48.624.187.635
511522- Belanja Tunjangan Tenaga Penyuluh Non PNS	0	9.690.000.000	9.690.000.000
511529- Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik dan Tenaga Penyuluh Lainnya Non PNS	0	702.500.000	702.500.000
511611- Belanja Gaji Pokok PPPK	0	144.854.107.485	144.854.107.485
511619- Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	2.442.604	2.442.604
511621- Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	9.028.960.263	9.028.960.263
511622- Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	2.660.571.732	2.660.571.732
511623- Belanja Tunjangan Struktural PPPK	0	54.829.000	54.829.000
511624- Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	11.310.475.061	11.310.475.061
511625- Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	8.885.517.190	8.885.517.190
511628- Belanja Uang Makan PPPK	0	30.065.177.508	30.065.177.508
511633- Belanja Tunjangan Umum PPPK	0	2.473.938.748	2.473.938.748
5120100- Belanja Bahan Pakai Habis	0	1.619.282.881.775	1.619.282.881.775
5120200- Belanja Bahan/Material	0	4.771.133.596	4.771.133.596
5120300- Belanja Jasa Kantor	0	1.062.734.640.472	1.062.734.640.472
5120400- Belanja Premi Asuransi	0	416.542.706.247	416.542.706.247
5120700- Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	0	19.804.118.769	19.804.118.769
5120800- Belanja Sewa Sarana Mobilitas	0	212.353.993	212.353.993
5120900- Belanja Sewa Alat Berat	0	59.437.079.895	59.437.079.895
5121000- Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	0	2.903.403.068	2.903.403.068
5121500- Belanja Perjalanan Dinas	0	495.391.431.974	495.391.431.974
5121800- Belanja Pemeliharaan	0	371.928.500.610	371.928.500.610
5121900- Belanja Jasa Konsultansi	0	104.391.695.528	104.391.695.528
5122000- Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	0	241.630.468.340	241.630.468.340
512211- Belanja Uang Lembur	0	18.069.649.670	18.069.649.670
512212- Belanja Uang Lembur PPPK	0	1.395.891.000	1.395.891.000
5122200- Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0	3.728.381.141	3.728.381.141
5122300- Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0	48.418.365.862	48.418.365.862

5122600- Honorarium Non PNS	0	3.101.967.516	3.101.967.516
5122900- Belanja Jasa Pihak Ketiga	0	5.647.032.680	5.647.032.680
5123000- Belanja Barang dan Jasa BLUD	0	760.176.944.820	760.176.944.820
5123100- Belanja Barang dan Jasa dana BOS	0	449.223.155.580	449.223.155.580
512411- Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	0	868.350.717.783	868.350.717.783
512414- Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0	113.166.114.601	113.166.114.601
5130100- Bunga Utang Pinjaman	0	10.815.708.803	10.815.708.803
5140100- Belanja Subsidi	0	364.617.500	364.617.500
5150100- Belanja Hibah kepada Pemerintah	0	17.381.946.858	17.381.946.858
5150400- Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat	0	26.309.857.239	26.309.857.239
5150500- Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan	0	347.459.819.373	347.459.819.373
5150600- Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar ***	0	126.442.124.669	126.442.124.669
5160100- Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan	0	1.414.282.000	1.414.282.000
5160200- Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat	0	13.210.155.121	13.210.155.121
5211100- Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	0	5.428.526.720	5.428.526.720
521111- Belanja Keperluan Perkantoran	0	190.693.076.283	190.693.076.283
521112- Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	115.482.494.022	115.482.494.022
521113- Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	0	4.160.645.661	4.160.645.661
521114- Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	1.244.750.101	1.244.750.101
521115- Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	0	53.845.755.787	53.845.755.787
521119- Belanja Barang Operasional Lainnya	0	231.362.648.438	231.362.648.438
5211300- Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	0	671.821.000	671.821.000
521211- Belanja Bahan	0	121.700.388.347	121.700.388.347
521213- Belanja Honor Output Kegiatan	0	80.106.335.809	80.106.335.809
521219- Belanja Barang Non Operasional Lainnya	0	219.318.352.855	219.318.352.855
521231- Belanja Barang Pemberian Penghargaan dalam bentuk uang	0	949.500.000	949.500.000
521233- Belanja Barang Pemberian Bantuan Operasional dalam bentuk uang	0	4.896.890.000	4.896.890.000
521252- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	0	3.586.601.573	3.586.601.573
521253- Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	0	124.265.750	124.265.750
521811- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	0	104.753.538.347	104.753.538.347
521813- Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Meterai dan Leges	0	6.999.900	6.999.900
521821- Belanja Barang Persediaan bahan baku	0	994.165.320	994.165.320
521822- Belanja Barang Persediaan barang dalam proses	0	2.161.163.876	2.161.163.876
521832- Belanja Barang Persediaan Lainnya	0	3.460.646.473	3.460.646.473
5220100- Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat	0	3.403.135.500	3.403.135.500
5220200- Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung	0	5.167.605.000	5.167.605.000
5220300- Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu	0	7.260.415.112	7.260.415.112
5220400- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	0	69.336.824.158	69.336.824.158
5220500- Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	0	1.824.894.115	1.824.894.115
5220600- Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor	0	492.206.650	492.206.650
5220700- Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor	0	330.705.000	330.705.000
5220900- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0	55.563.650	55.563.650
5221000- Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	0	77.733.300	77.733.300
5221100- Belanja modal Pengadaan Alat Ukur	0	85.710.499	85.710.499
522111- Belanja Langganan Listrik	0	62.591.285.023	62.591.285.023
522112- Belanja Langganan Telepon	0	2.489.965.436	2.489.965.436
522113- Belanja Langganan Air	0	8.978.688.055	8.978.688.055
522119- Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0	9.459.140.213	9.459.140.213
5221200- Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan	0	705.171.555	705.171.555
522121- Belanja Jasa Pos dan Giro	0	256.627.209	256.627.209
522131- Belanja Jasa Konsultan	0	44.093.743.180	44.093.743.180
5221400- Belanja modal Pengadaan Alat Kantor	0	6.420.278.457	6.420.278.457
522141- Belanja Sewa	0	46.009.941.639	46.009.941.639
5221500- Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga	0	71.600.242.210	71.600.242.210
522151- Belanja Jasa Profesi	0	14.738.956.130	14.738.956.130
5221600- Belanja modal Pengadaan Komputer	0	43.155.473.332	43.155.473.332

5221700- Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0	1.443.473.702	1.443.473.702
5221800- Belanja modal Pengadaan Alat Studio	0	8.139.941.942	8.139.941.942
5221900- Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi	0	641.770.352	641.770.352
522191- Belanja Jasa Lainnya	0	78.411.719.636	78.411.719.636
5222000- Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar	0	24.494.200	24.494.200
5222100- Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran	0	49.148.829.666	49.148.829.666
5222200- Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan	0	38.861.425.304	38.861.425.304
5222300- Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	0	9.487.148.122	9.487.148.122
5222400- Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	0	70.751.139.471	70.751.139.471
5222500- Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	0	20.736.000	20.736.000
5222600- Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	0	64.265.670	64.265.670
5222900- Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0	470.114.040	470.114.040
5223500- Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	0	6.221.510	6.221.510
5230100- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	0	559.604.651.437	559.604.651.437
5230200- Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0	10.656.622.347	10.656.622.347
5230900- Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti	0	7.202.217.875	7.202.217.875
5231000- Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu	0	8.594.603.117	8.594.603.117
523111- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	133.067.451.974	133.067.451.974
523112- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0	640.937.085	640.937.085
523119- Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0	2.129.084.914	2.129.084.914
523121- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	119.962.250.461	119.962.250.461
523122- Belanja Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	485.760.829	485.760.829
523123- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0	16.836.102.196	16.836.102.196
523125- Belanja Barang Persediaan Bahan Bakar Minyak dan Pelumas (BMP) dan Pelumas Khusus Non Pertamina	0	40.722.691.396	40.722.691.396
523129- Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	688.069.986	688.069.986
523131- Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	0	190.641.381.495	190.641.381.495
523132- Belanja Pemeliharaan Irigasi	0	83.273.352.567	83.273.352.567
523133- Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	1.837.520.741	1.837.520.741
523136- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Jaringan	0	65.222.000	65.222.000
523191- Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	393.019.562	393.019.562
523199- Belanja Pemeliharaan Lainnya	0	9.870.618.902	9.870.618.902
5240100- Belanja modal Pengadaan Jalan	0	764.997.281.842	764.997.281.842
5240200- Belanja modal Pengadaan Jembatan	0	105.496.695.740	105.496.695.740
5240300- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi	0	29.610.875.665	29.610.875.665
5240400- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut	0	35.803.395.534	35.803.395.534
5240600- Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	0	12.395.587.850	12.395.587.850
5240800- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku	0	22.441.166.817	22.441.166.817
5240900- Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor	0	13.510.832.250	13.510.832.250
5241100- Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih	0	3.418.590.120	3.418.590.120
524111- Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	169.593.221.905	169.593.221.905
524112- Belanja Perjalanan Dinas Tetap	0	971.385.294	971.385.294
524113- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	0	27.877.119.925	27.877.119.925
524114- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	31.766.007.024	31.766.007.024
524119- Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	0	21.468.008.518	21.468.008.518
5241200- Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor	0	208.708.000	208.708.000
5241300- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik	0	298.035.000	298.035.000
5241500- Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik	0	6.879.974.000	6.879.974.000

5242000- Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum	0	30.276.043.205	30.276.043.205
5242100- Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	0	33.538.492.290	33.538.492.290
524211- Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	0	70.659.025	70.659.025
5242300- Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas	0	183.239.000	183.239.000
5242400- Belanja modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	0	3.701.040.950	3.701.040.950
5250300- Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan	0	48.801.563.044	48.801.563.044
5250400- Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	0	1.945.330.096	1.945.330.096
5250500- Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	0	813.351.133	813.351.133
5250800- Belanja modal Pengadaan Dana BOS dan JKN	0	32.417.247.459	32.417.247.459
525111- Belanja Gaji dan Tunjangan	0	215.378.056.263	215.378.056.263
525112- Belanja Barang	0	59.179.195.397	59.179.195.397
525113- Belanja Jasa	0	71.746.966.422	71.746.966.422
525114- Belanja Pemeliharaan	0	11.921.724.274	11.921.724.274
525115- Belanja Perjalanan	0	6.442.077.687	6.442.077.687
525119- Belanja Penyediaan Barang dan Jasa BLU Lainnya	0	126.136.719.824	126.136.719.824
525121- Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	0	37.925.324.735	37.925.324.735
525124- Belanja Barang Persediaan Pita Cukai, Materai dan Leges - BLU	0	70.610.000	70.610.000
525129- Belanja Barang Persediaan Lainnya - BLU	0	23.999.677.652	23.999.677.652
525141- Belanja Barang BLU kepada BLU Lain dalam Satu Kementerian Negara/Lembaga	0	27.500.000	27.500.000
525142- Belanja Barang BLU kepada BLU Lain yang berada dalam Kementerian Negara/Lembaga Lain	0	155.058.302	155.058.302
525162- Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel BLU	0	922.632.314	922.632.314
526112- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	3.087.579.590	3.087.579.590
526113- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	7.662.336.750	7.662.336.750
526114- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	499.594.496.461	499.594.496.461
526115- Belanja Barang Fisik Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	2.512.148.650	2.512.148.650
526122- Belanja Peralatan Dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	282.000.000	282.000.000
526123- Belanja Gedung Dan Bangunan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	863.250.000	863.250.000
526124- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda dalam bentuk uang	0	186.810.000.000	186.810.000.000
526223- Belanja Gedung dan Bangunan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	0	13.589.144.016	13.589.144.016
526224- Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tugas Pembantuan Untuk Diserahkan kepada Pemerintah Daerah	0	70.126.090.988	70.126.090.988
526311- Belanja Barang Bantuan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	0	151.469.230.149	151.469.230.149
526312- Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah	0	202.768.389.949	202.768.389.949
5270100- Belanja Modal Aset Lainnya	0	2.873.905.086	2.873.905.086
5280100- Belanja Modal BLUD	0	32.833.694.196	32.833.694.196
5310100- Belanja Tak Terduga	0	30.727.055.625	30.727.055.625
531111- Belanja Modal Tanah	0	420.000.000	420.000.000
531114- Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	0	191.001.440	191.001.440
532111- Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	157.526.698.321	157.526.698.321
532112- Belanja Modal Bahan Baku Peralatan dan Mesin	0	19.018.000	19.018.000
532114- Belanja Modal Sewa Peralatan dan Mesin	0	18.700.000	18.700.000
532118- Belanja Modal Perjalanan Peralatan dan Mesin	0	25.460.000	25.460.000
532121- Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	1.624.580.400	1.624.580.400
533111- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	325.047.906.930	325.047.906.930
533112- Belanja Modal Bahan Baku Gedung dan Bangunan	0	7.158.382.000	7.158.382.000
533113- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	0	1.463.730.000	1.463.730.000
533115- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	0	1.616.416.000	1.616.416.000
533121- Belanja Penambahan Nilai Gedung dan	0	32.439.188.591	32.439.188.591

Bangunan			
534111- Belanja Modal Jalan dan Jembatan	0	88.033.881.287	88.033.881.287
534121- Belanja Modal Irigasi	0	285.165.000.200	285.165.000.200
534122- Belanja Modal Bahan Baku Irigasi	0	10.992.800	10.992.800
534124- Belanja Modal Sewa Peralatan Irigasi	0	327.950.000	327.950.000
534125- Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Irigasi	0	4.080.149.269	4.080.149.269
534128- Belanja Modal Perjalanan Irigasi	0	1.121.668.897	1.121.668.897
534131- Belanja Modal Jaringan	0	34.957.000	34.957.000
534141- Belanja Penambahan Nilai Jalan dan Jembatan	0	234.887.219.780	234.887.219.780
536111- Belanja Modal Lainnya	0	10.441.937.890	10.441.937.890
536112- Belanja Modal Bahan Baku Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	116.867.740	116.867.740
536114- Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	112.500.000	112.500.000
536117- Belanja Modal Perjalanan Aset Tetap Lainnya/ Aset Lainnya	0	538.590.216	538.590.216
536121- Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	653.464.000	653.464.000
537112- Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU	0	18.677.674.786	18.677.674.786
537113- Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	0	14.779.644.179	14.779.644.179
537115- Belanja Modal Lainnya - BLU	0	833.931.900	833.931.900
574111- Belanja Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial Dalam Bentuk Uang	0	17.469.442.000	17.469.442.000
6110100- Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	355.136.499.602	355.136.499.602
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	194.066.820.500	194.066.820.500
611112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	12.671.906.200	12.671.906.200
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	57.159.495.700	57.159.495.700
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	333.562.261.500	333.562.261.500
6120100- Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota	0	5.991.547.543	5.991.547.543
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	38.844.621.000	38.844.621.000
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	490.000.900.000	490.000.900.000
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	751.269.000	751.269.000
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	31.359.642.600	31.359.642.600
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	22.702.463.000	22.702.463.000
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	19.282.857.000	19.282.857.000
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	111.668.030.000	111.668.030.000
613111- Belanja Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	0	1.814.645.000	1.814.645.000
6210100- Bantuan Keuangan ke Propinsi	0	1.500.000.000	1.500.000.000
6210200- Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota	0	8.351.783.366	8.351.783.366
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	10.507.962.953.000	10.507.962.953.000
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	294.855.878.401	294.855.878.401
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	18.900.000.000	18.900.000.000
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	1.206.955.054.000	1.206.955.054.000
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	803.727.205.000	803.727.205.000
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	148.578.138.000	148.578.138.000
6220100- Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	2.174.639.497.335	2.174.639.497.335
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	765.716.342.948	765.716.342.948
643111- Insentif Fiskal	0	51.953.825.000	51.953.825.000
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	1.389.145.439.600	1.389.145.439.600
654112- Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah	0	240.660.699.700	240.660.699.700
654211- Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah	0	18.102.250.000	18.102.250.000
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	1.319.100.936.388	1.319.100.936.388
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	341.571.049.711	341.571.049.711
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	69.838.308.000	69.838.308.000
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	27.754.100.000	27.754.100.000
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional	0	68.790.099.400	68.790.099.400

Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)			
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	25.219.650.000	25.219.650.000
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	4.341.863.000	4.341.863.000
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	1.943.583.000	1.943.583.000
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	6.171.342.000	6.171.342.000
655611- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0	5.305.434.000	5.305.434.000
662111- Belanja Dana Desa	0	1.595.719.756.088	1.595.719.756.088
7110100- Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya	0	(757.923.939.311)	(757.923.939.311)
7140100- Pinjaman Dalam Negeri dari Bank	0	(127.533.000.000)	(127.533.000.000)
7190100- Pembentukan SiLPA/SiKPA untuk Mapping LSKP	0	3.430.476.842.623	3.430.476.842.623
7220200- Penyertaan Modal pada BUMD	0	47.000.000.000	47.000.000.000
7230100- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank	0	146.600.000.000	146.600.000.000
7230200- Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0	56.416.528.928	56.416.528.928
815111- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan	0	(26.871.766.924)	(26.871.766.924)
815113- Penerimaan Pengembalian Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	(5.388.332.667)	(5.388.332.667)
815511- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan	0	(232.978.272.896)	(232.978.272.896)
815513- Penerimaan Pengembalian Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	(48.099.083.833)	(48.099.083.833)
815514- Penerimaan Pengembalian Tambahan Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa Tambahan Uang Persediaan Tahun Anggaran Yang Lalu	0	(19.562.000)	(19.562.000)
815619- Penerimaan Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	(207.538.187.740)	(207.538.187.740)
817714- Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	0	(16.221.646.860)	(16.221.646.860)
817717- Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	0	(1.595.719.756.088)	(1.595.719.756.088)
825111- Pengeluaran Uang Persediaan	0	26.885.896.700	26.885.896.700
825113- Pengeluaran Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	5.388.332.667	5.388.332.667
825511- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan	0	233.026.153.416	233.026.153.416
825513- Pengeluaran Tambahan Uang Persediaan Pengguna PNB (Swadana)	0	48.099.083.833	48.099.083.833
825619- Pengeluaran Non Anggaran Pembentukan Dana Belanja Pemerintah pada Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	0	297.027.154.041	297.027.154.041
827714- Pengembalian Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga Pemotongan DAU atau DBH untuk Alokasi Dana Desa (ADD)	0	16.221.646.860	16.221.646.860
827717- Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Dana Hasil Pemotongan (DHP) untuk Dana Desa	0	1.595.719.756.088	1.595.719.756.088
Jumlah	0	0	0

LAMPIRAN III
NERACA SALDO BUKU BESAR
AKRUAL ELIMINASI/KONSOLIDASI

NERACA SALDO BUKU BESAR AKRUAL

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
1130500- Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan	0	(74.606.851.583)	(74.606.851.583)
215111- Transfer ke Daerah yang Masih Harus Dibayar	0	74.606.851.583	74.606.851.583
611111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	(130.668.595.836)	(130.668.595.836)
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	(241.567.489.758)	(241.567.489.758)
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Iuran Tetap	0	(31.657.415.000)	(31.657.415.000)
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	(446.496.229.000)	(446.496.229.000)
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	(751.269.000)	(751.269.000)
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	(30.276.922.600)	(30.276.922.600)
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	(19.979.047.000)	(19.979.047.000)
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	(19.282.857.000)	(19.282.857.000)
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	(111.668.030.000)	(111.668.030.000)
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	(10.507.962.953.000)	(10.507.962.953.000)
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	(294.855.878.401)	(294.855.878.401)
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	(18.900.000.000)	(18.900.000.000)
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	(99.563.434.767)	(99.563.434.767)
621124- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Kesehatan	0	(803.727.205.000)	(803.727.205.000)
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	(148.578.138.000)	(148.578.138.000)
643111- Insentif Fiskal	0	(48.430.647.000)	(48.430.647.000)
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	(1.389.145.439.600)	(1.389.145.439.600)
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	(1.319.100.936.388)	(1.319.100.936.388)
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	(269.926.628.669)	(269.926.628.669)
8142100- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO	0	15.967.523	15.967.523
8210100- Bagi Hasil Pajak - LO	0	372.236.085.594	372.236.085.594
8210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	0	660.111.769.600	660.111.769.600
8210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	0	11.814.844.690.426	11.814.844.690.426
8210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	0	2.978.173.004.657	2.978.173.004.657
8220400- Dana Insentif Daerah (DID)	0	48.430.647.000	48.430.647.000
8330100- Pendapatan Lainnya - LO	0	58.726.951.219	58.726.951.219
Jumlah	0	0	0

LAMPIRAN IV
NERACA SALDO BUKU BESAR KAS
ELIMINASI/KONSOLDASI

NERACA SALDO BUKU BESAR KAS

AKUN	SALDO AWAL	MUTASI	SALDO AKHIR
4141900- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	0	15.967.523	15.967.523
4210100- Bagi Hasil Pajak - LRA	0	372.236.085.594	372.236.085.594
4210200- Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA	0	714.609.782.600	714.609.782.600
4210300- Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	0	11.814.844.690.426	11.814.844.690.426
4210400- Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	0	2.978.173.004.657	2.978.173.004.657
4220400- Dana Insentif Daerah	0	48.430.647.000	48.430.647.000
4220500- Dana Desa	0	1.322.934.345.472	1.322.934.345.472
4330100- Pendapatan Lainnya - LRA	0	58.726.951.219	58.726.951.219
6111111- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 21	0	(194.066.820.500)	(194.066.820.500)
6111112- Belanja Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25/29 OP	0	(12.671.906.200)	(12.671.906.200)
611211- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Propinsi	0	(57.159.495.700)	(57.159.495.700)
611212- Belanja Dana Bagi Hasil PBB untuk Kabupaten/Kota	0	(108.337.863.194)	(108.337.863.194)
612311- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - luran Tetap	0	(38.844.621.000)	(38.844.621.000)
612312- Belanja Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum - Royalti	0	(490.000.900.000)	(490.000.900.000)
612511- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - IIUPH/IHPH	0	(751.269.000)	(751.269.000)
612512- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - PSDH	0	(31.359.642.600)	(31.359.642.600)
612513- Belanja Dana Bagi Hasil Kehutanan - Dana Reboisasi	0	(22.702.463.000)	(22.702.463.000)
612611- Belanja Dana Bagi Hasil Perikanan	0	(19.282.857.000)	(19.282.857.000)
612711- Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit	0	(111.668.030.000)	(111.668.030.000)
621111- Transfer Dana Alokasi Umum Tidak Ditentukan Penggunaannya	0	(10.507.962.953.000)	(10.507.962.953.000)
621121- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Penggajian PPPK Daerah	0	(294.855.878.401)	(294.855.878.401)
621122- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Pembangunan Sarana dan Prasarana, Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	0	(18.900.000.000)	(18.900.000.000)
621123- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan Bidang Pendidikan	0	(903.290.639.767)	(903.290.639.767)
621126- Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah	0	(148.578.138.000)	(148.578.138.000)
631212- Belanja Dana Alokasi Khusus Penugasan	0	(688.696.385.845)	(688.696.385.845)
643111- Insentif Fiskal	0	(48.430.647.000)	(48.430.647.000)
654111- Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah	0	(419.440.253.313)	(419.440.253.313)
654311- Belanja Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	0	(1.319.100.936.388)	(1.319.100.936.388)
654711- Belanja Dana Bantuan Operasional Kesehatan	0	(341.571.049.711)	(341.571.049.711)
654712- Belanja Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana	0	(69.838.308.000)	(69.838.308.000)
654812- Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil	0	(27.754.100.000)	(27.754.100.000)
654911- Belanja Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP-PAUD)	0	(68.790.099.400)	(68.790.099.400)
654912- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan	0	(25.219.650.000)	(25.219.650.000)
654921- Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Museum dan Taman Budaya	0	(4.341.863.000)	(4.341.863.000)
655211- Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	0	(1.943.583.000)	(1.943.583.000)
655411- Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	(6.171.342.000)	(6.171.342.000)
655611- Dana Bantuan Pengembangan Program Perpustakaan Daerah	0	(5.305.434.000)	(5.305.434.000)
662111- Belanja Dana Desa	0	(1.322.934.345.472)	(1.322.934.345.472)
Jumlah	0	0	0